

MASJID SEBAGAI SIMBOL PERLAWANAN RAKYAT

Kilas Kisah Konflik Pembangunan Bandara
di Kulonprogo Yogyakarta

all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hal ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MASJID SEBAGAI SIMBOL PERLAWANAN RAKYAT

Kilas Kisah Konflik Pembangunan Bandara
di Kulonprogo Yogyakarta

Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA.

Yuni Ma'rufah, MSI.



Copyright © 2022, Ahmad Sihabul Millah & Yuni Ma'rufah

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

MASJID SEBAGAI SIMBOL PERLAWANAN RAKYAT

Kilas Kisah Konflik Pembangunan Bandara
di Kulonprogo Yogyakarta

Penulis:

Dr. Ahmad Sihabul Millah, MA.

Yuni Ma'rufah, MSI.

Editor/ Penyunting:

Khoirul Imam

Layout:

Minan Nuri Rohman

Cover:

M. Aqibun Najih

Penerbit:

Lintang Hayuning Buwana

Dakawon Nasri, Rt 009/Rw 008, Sumbersari,

Kec. Moyudan, Kab. Sleman, DIY 55563

Telp. +6281578140142

Email: lintangbooks@gmail.com

Cetakan Pertama, Desember 2022

xii + 144; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-623-93716-6-1



KATA PENGANTAR

Masjid merupakan tempat atau bangunan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat untuk beribadah. Selain itu, masjid juga menjadi wahana merajut persaudaraan, saling mengasihi, dan saling membantu sesama muslim. Dengan ungkapan lain, bangunan suci ini merupakan tempat ibadah, sekaligus tempat menciptakan integrasi sosial sesama umat Islam. Masjid sebagian besar berfungsi sebagai tempat shalat, mengaji, beribadah, pemberdayaan ekonomi jamaah, dan lainnya. Studi ini mendeskripsikan masjid sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap negara dalam pembangunan bandara di Kulonprogo Yogyakarta.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai fenomena di atas, tulisan ini akan fokus membahas beberapa hal. Pertama, konteks yang melatari masjid sebagai basis perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara di Yogyakarta. Kedua, isu dan dinamika perlawanan masyarakat dalam konflik tersebut. Ketiga praktek resolusi konflik berbasis masjid dalam kejadian tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah penyelidikan empiris

yang meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas, dan di mana multi sumber fakta digunakan. Studi kasus yang akan dipilih adalah *intrinsic case study*, yakni studi untuk memahami fenomena, keteraturan, dan kekhususan kasus. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam konflik pembangunan bandara internasional yang berbasis di masjid Al-Hidayah. Adapun lokasi penelitian di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun temuan utama buku ini adalah sebagai berikut. Konteks konflik yang menyebabkan masjid sebagai basis perlawanan rakyat adalah kebijakan pemerintah yang kontraproduktif dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Bagi pemerintah, pembangunan bandara NYIA adalah keharusan. Sebab beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama kapasitas terminal Bandara Adisutjipto tidak lagi bisa menampung pesawat yang *take off and landing*. **Kedua** transportasi udara yang baru di Yogyakarta memang dirasa perlu. **Ketiga**, bandara Adisutjipto adalah milik Pangkalan TNI AU yang sebenarnya bukan untuk komersil. Kebijakan ini lebih memihak pada pemilik modal daripada masyarakat.

Selanjutnya, ada beberapa Isu konflik yang menyebabkan masjid sebagai basis perlawanan masyarakat dalam konflik pembangunan Bandara. **Pertama**, persoalan livelihood atau mata pencarian. **Kedua**, konflik itu kemudian diperparah dengan persoalan agraria yang tidak jelas dengan langkah-langkah dan mekanisme pemerintah yang tidak menampung aspirasi warga terdampak. **Ketiga**, pudarnya hubungan sosial.

Pembangunan bandara yang diikuti dengan penggusuan berdampak pada merengangnya hubungan sosial baik dalam lingkup keluarga atau pertemanan. **Keempat**), kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harga taksir yang seharusnya. **Kelima**), status tanah wakaf, kesakralan dan pergeseran fungsi masjid.

Sedangkan dinamika konflik meliputi beberapa hal. Pertama, situasi konflik. Latar belakang yang mengawali adanya konflik antara pemerintah atau angkasa pura dengan warga adalah, adanya kegiatan pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo. Keresahan sudah mulai muncul semenjak adanya wacana pembangunan bandara. Kuatnya penolakan akan proyek pembangunan Bandara adalah murni dari warga yang terdampak. *Kedua*, sikap konflik. Dalam konteks proyek pembangunan bandara, banyak sikap konflik yang muncul. Secara global, sikap konflik menyangkut aspek-aspek kognisi dan emosi, seperti rasa bermusuhan yang dialami pihak-pihak yang terlibat konflik. Segala bentuk sikap yang diekspresikan oleh warga terdampak proyek Bandara NYIA, karena mereka diintimidasi pemilik modal, dan penguasa. *Ketiga*, adalah perilaku konflik. Perilaku ini muncul dalam bentuk bentuk perlawanan dengan tulisan-tulisan atau panduk, Spiritualitas berupa *Mujahadah*, dan perlawanan sikap.

Ada beberapa resolusi konflik berbasis masjid yang diambil dalam kasus pembangunan Bandara NYIA dan warga terdampak. Pertama membangun komunikasi. Kedua, kedua belah pihak melakukan negosiasi. Ketiga ada pihak ketiga yang melakukan mediasi. Keempat pemerintah melakukan relokasi masjid.

Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama melakukan penulisan buku ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Diktis Kemnetrian Agama RI yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penulisan buku ini.
2. Dosen dan Peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) IIQ (Institut Ilmu Al Qur'an) An Nur Bantul Yogyakarta yang telah memberi masukan dan saran yang sangat berharga guna terwujudnya penelitian ini.
3. Warga masyarakat Desa Palihan Temon Kulonprogo Yogyakarta.
4. Teman-teman semua yang telah memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, S.W.T, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Tim Peneliti



DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~~ v

Daftar Isi ~~ ix

BAB 1

PENDAHULUAN ~~ 1

- A. Latar Belakang ~~ 1
- B. Rumusan Masalah ~~ 7
- C. Tujuan dan Signifikansi ~~ 8
- D. Kajian Pustaka ~~ 9
- E. Metode ~~ 11
- F. Sistematika Pembahasan ~~ 15

BAB II

MASJID: ANTARA MEDIA INTEGRASI DAN KONFLIK ~~ 17

- A. Masjid dan Jamaah ~~ 17
- B. Integrasi Umat ~~ 24
- C. Teori Konflik ~~ 25
- D. Sumber-Sumber Konflik ~~ 28

- E. Sumber Konflik Agama ~~ 30
- F. Macam-Macam Konflik ~~ 41
- G. Analisis Konflik ~~ 43
- H. Resolusi Konflik ~~ 46

BAB III

POTRET DESA DAN MASJID DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN BANDARA ~~ 49

- A. Sekilas Tentang Desa Palihan ~~ 49
 - 1. Sejarah ~~ 49
 - 2. Letak Geografis ~~ 50
 - 3. Kondisi Kependudukan ~~ 52
 - 4. Kondisi Pemerintahan ~~ 60
- B. Masjid Al-Hidayah Sebelum dan Sesudah Relokasi ~~ 63
 - 1. Sejarah ~~ 63
 - 2. Kegiatan Masjid ~~ 73
 - 3. Masjid Pasca Relokasi ~~ 76

BAB IV

MASJID SEBAGAI BASIS PERLAWANAN MASYARAKAT DALAM KONFLIK PEMBANGUNAN BANDARA ~~ 81

- A. Kebijakan Negara Yang Kontraproduktif ~~ 83
- B. Sumber Konflik ~~ 86

C.	Pihak-Pihak Konflik	~~ 103
1.	Pihak Primer Konflik	~~ 105
2.	Pihak Sekunder Konflik	~~ 106
D.	Dinamika Konflik	~~ 108
1.	Situasi Konflik	~~ 110
2.	Sikap Konflik	~~ 120
3.	Perilaku Konflik	~~ 125
E.	Resolusi Konflik Berbasis Masjid	~~ 132
1.	Komunikasi	~~ 133
2.	Negosiasi	~~ 134
3.	Mediasi	~~ 135
4.	Relokasi Masjid	~~ 138
	Daftar Pustaka	~~ 141

BAB I



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi keterkaitan masjid sebagai tempat ibadah dan perjuangan bagi umat Islam sudah banyak dilakukan. Kekosongan studi yang belum banyak dilakukan adalah penelitian yang mencoba mendeskripsikan secara kritis masjid sebagai basis perlawanan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini akan melihat dan menelisik lebih dalam tentang masjid sebagai basis gerakan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah yang melakukan penggusuran lahan, rumah, dan fasilitas umum untuk pembangunan bandara di Kulonprogo Yogyakarta. Bagi sebagian masyarakat, kebijakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan jauh dari rasa keadilan. Dengan demikian, penelitian ini akan punya kontribusi pada pengayaan teori sosiologi agama, terutama agama dan resolusi konflik.

Masjid merupakan tempat atau bangunan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat untuk

beribadah. Selain itu, masjid juga menjadi wahana merajut persaudaraan, saling mengasihi, dan saling membantu sesama muslim. Dengan ungkapan lain, bangunan suci ini merupakan tempat ibadah, sekaligus tempat menciptakan integrasi sosial sesama umat Islam.

Dalam catatan sejarah Islam, masjid memiliki fungsi yang beragam. Pada masa Nabi Muhammad, masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah (shalat, zikir), tempat konsultasi dan komunikasi (ekonomi-sosial budaya), tempat pendidikan, tempat santunan sosial, tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, tempat pengobatan para korban perang, tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, tempat menerima tamu, tempat menawan tahanan, dan pusat penerangan atau pembelaan agama.¹

Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, masjid ternyata tidak sekedar menjadi tempat ibadah shalat lima waktu, tetapi juga sebagai markas atau basis gerakan perlawanan menentang penjajah Belanda. Umat muslim saat itu memanfaatkan masjid sebagai sarana diskusi, serta menyiapkan strategi melawan kompeni. Sebut saja Masjid Al Makmur yang berdiri di kawasan Cikini, Jakarta. Masjid ini dikenal sebagai simbol perlawanan rakyat terutama Syarikat Islam terhadap pemerintahan kolonial Belanda (www.ppp.or.id). Di masa perjuangan Pangeran Imam Bonjol melawan Belanda, masjid juga menjadi tempat menyiapkan strategi perang dan serangan fajar setelah shalat subuh. Belanda meyakini bahwa masjid hanya sebagai tempat

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), hlm. 51

ibadah (www.buletinkritis.wordpress.com). Keyakinan dan sekaligus kelemahan Belanda ini kemudia benar-benar dimanfaatkan Pageran Imam Bonjol dan para pejuang untuk menggalang kekuatan dari masjid.

Dalam konteks Indonesia kekinian, masjid kebanyakan hanya dijadikan tempat ibadah, belajar mengaji, belajar agama, dan sederat ritual keagamaan lainnya. Namun demikian, ada yang berbeda dan sangat unik dengan Masjid Al Hidayah di Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Masjid ini berada di lahan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang akan dijadikan Bandara. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai posko gerakan rakyat menentang pengusuran rumah, tanah, dan tempat ibadah (masjid) yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*. Dengan kata lain, masjid yang semula hanya berfungsi sebagai tempat ibadah bergeser menjadi ajang konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

Dari hasil obeservasi peneliti ke lokasi, berbagai macam poster dan tulisan bernada protes dan ketidaksukaan warga dipasang di depan dan di samping masjid (*observasi 28 Juli 2017*). Untuk melawan aparat agar masjid tidak digusur, masyarakat membuat poster dengan tulisan ayat al-Qur'an, beserta terjemahannya, yakni Surah al-Baqoroh: 144: "*dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? Mereka tidak pantas*

memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.” Poster lain yang juga menempel di dinding masjid berbunyi: “*Masjid untuk Ibadah Bukan Bandara*”, “*Masjid Ini Tidak Dijual*”, “*Kita Makan Nasi Bukan Makan Beton*”, “*STOP Pembangunan Bandara*” dan lain-lainnya.

Dari beberapa poster yang terpasang di dinding masjid tersebut menandakan bahwa pembangunan bandara Internasional di Kulonprogo masih menyisahkan banyak persoalan. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah aksi penolakan dan penentangan yang dilakukan oleh 200-an warga desa Palihan. Pada saat pemerintah atau dalam hal ini diwakili PT Angkasa Pura melakukan penggusuran rumah dan tanah warga dengan mesin *backhoe* dengan kawalan ratusan aparat keamanan, mereka menghadang dan memblokade alat berat tersebut. Walhasil bentrokan antara aparat dan masyarakat tak bisa dihindarkan. Puluhan warga terluka akibat aksi berdarah tersebut (*dokumen PWPP/KP 2018*)

Warga penentang bandara yang rumahnya digusur, kemudian pindah ke masjid al Hidayah. Ada 20 anggota kepala keluarga (KK) yang tinggal di masjid saat konflik berlangsung (Surat *Kabar Harjo* 25 Juli 2018). Ratusan warga penentang lainnya juga setiap hari berkumpul di masjid. Mereka tidak mau menempati tempat relokasi atau kontrakan yang disediakan oleh pihak PT Angkasa Pura dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Sebab mereka tidak pernah diajak komunikasi sebelumnya. Mereka menjadikan

masjid sebagai tempat berlindung sementara dan posko dalam rangka menyiapkan strategi melawan petugas. Bagi mereka masjid tidak boleh digusur, apalagi dibongkar. Mereka menanggapi bahwa masjid untuk ibadah, bukan untuk bandara (*wawancara dengan Ibu Ponirah 5 Desember 2017*). Bahkan keturunan dari ahli waris yang mewakafkan tanah masjid juga menentang penggusuran tanah, rumah, pakarangan, sawah, dan masjid. Bagi mereka, penggusuran akan menyebabkan kehilangan tempat tinggal, sumber kehidupan dari sektor pertanian, sarana ibadah, jaringan sosial, nilai historis kampung dan lainnya. Namun yang paling berat bagi mereka adalah kehilangan mata pencarian dari sektor pertanian.

Meskipun banyak warga yang menentang, pemerintah tetap menjalankan proyek pembangunan bandara internasional di Kulonprogo Yogyakarta. Pemerintah bersikukuh bahwa pembangunan bandara merupakan keharusan sebab bandara Adisucipto Yogyakarta sudah overload dan tidak layak jadi bandara internasional. Pemerintah juga beranggapan bahwa keberadaan bandara internasional di Kulonprogo akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Konsep dan prinsip dasar pembangunan bandara versi pemerintah: komunalistik religious, penggajian berdasarkan nilai prospek, peningkatan kesejahteraan, relokasi hunian gratis, bebas pajak, dan berbagi kesepakatan ruang usaha (*Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012*). Pemerintah juga berjanji akan mengganti rumah, tanah, ladang, fasilitas ibadah (termasuk

Masjid Alhidayah), dan fasilitas umum yang terkena dampak penggusuran.

Dari fakta di atas terlihat jelas bahwa klaim dan kepentingan masyarakat dengan pemerintah jelas berbeda dan sulit dipertemukan. Dua kepentingan yang berbeda yang tidak bisa disatukan inilah yang disebut dengan istilah konflik.² Adapun konflik antara rakyat dengan pemerintah secara struktural termasuk kategori konflik vertikal. Dalam posisi ini, rakyat seolah harus mengalah dengan kekuatan negara. Rakyatlah yang kemudian jadi korban proyek tersebut.

Untuk memuluskan proyek bandara internasional, negara melakukan kekerasan terhadap masyarakat di dua level, yakni level diskursus dan level fisik. Kekerasan di level diskursus, pemerintah mengkampanyekan bahwa pembangunan bandara adalah upaya mensejahterahkan masyarakat Kulonprogo. Kekerasan di level fisik, pemerintah melakukan penggusuran terhadap tanah, rumah, areal perswahan milik warga baik yang sepakat atau yang menolak. Konflik pembangunan bandara ini muncul dari kelompok masyarakat yang menolak pembangunan bandara karena harus menggusur tanah, rumah, lahan pertanian, dan fasilitas umum yang mereka miliki.

Dari latar belakang di atas, ada beberapa hal yang unik, sekaligus menarik mengapa penelitian ini harus dilakukan. *Pertama*, dalam konflik pembangunan bandara internasional di Kulonprogo, masjid digunakan sebagai posko perlawanan

² Dean. G . Pruitt dan Jeffrey Rubin, *Teori Konflik Sosial*. penerjemah Helly P. Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9-10

rakyat terhadap negara. Warga memfungsikan masjid tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah wajib dan sunah, melainkan juga tempat tinggal korban penggusuran dan tempat merancang aksi penolakan. Dengan kata lain, masjid dijadikan benteng perlawanan terhadap tindak kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat.

Kedua, masjid yang seharusnya menjadi wahana integrasi bagi umat Islam, apapun jabatan dan posisinya, justru menjadi “posko” yang melahirkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Dari dalam masjid, segala aktivitas masyarakat dari perencanaan, aksi dan evaluasi terkait dengan penolakan terhadap pembangunan bandara dilakukan. Bahkan ketika masjid hendak digusur pun, masyarakat masih tetap bertahan di area masjid, sehingga bentrok antara aparat dan masyarakat pun tidak terelakkan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa konteks yang melatari masjid sebagai basis perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara di Desa Palihan Temon Kulonprogo Yogyakarta?
2. Bagaimana isu dan dinamika perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara yang berbasis di masjid tersebut?

3. Bagaimana resolusi untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan bandara yang berbasis di masjid tersebut?

C. Tujuan dan Signifikansi

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melatari masjid sebagai basis perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara di Desa Palihan Temon Kulonprogo Yogyakarta.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi isu dan dinamika perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara yang berbasis di masjid.
3. Mengetahui resolusi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan bandara yang berbasis di masjid tersebut.

Berdasarkan tujuan di atas, maka ada dua signifikasi dari penelitian ini. Pertama, manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan pada pemerintah dan pemangku kebijakan akan pentingnya mengakomodir aspirasi masyarakat dalam proyek pembangunan bandara internasional di Kulonprogo Yogyakarta untuk mencegah konflik dan kekerasan antara

warga dan aparat. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan bahwa apa yang mereka klaim tentang bandara sebagai upaya mensejahterakan rakyat belum tentu diterima oleh masyarakat. Kedua, manfaat teoritis, penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan sosiologi agama (Islam), khususnya agama dan resolusi konflik.

D. Kajian Pustaka

Dari penelusuran peneliti terhadap sejumlah buku, jurnal online, dan *google scholar*, belum ada tulisan atau penelitian yang memotret masjid sebagai basis gerakan perlawanan masyarakat terhadap negara dalam proyek pembangunan bandara internasional di Kulonprogo Yogyakarta. Namun ada beberapa tulisan dan penelitian yang memiliki tema berdekatan.

Nurhadi (2018) pernah menulis hasil riset dengan judul *Masjid: Kajian Historis Perubahan Masyarakat Pasca Perang Jawa di Magetan tahun 1835-1850*.³ Penelitian ini mengungkap masalah yang berkaitan dengan perubahan masyarakat yang terjadi pasca Perang Jawa dalam kaitannya dengan masjid-masjid pada laskar Perang Jawa yang dipimpin pangeran Dipenogero. Wilayah Magetan dan timur Yogyakarta menjadi wilayah yang dianggap mendukung pelarian laskar Diponegoro, sekaligus menjadikan sejumlah masjid sebagai basis perjuangan terhadap penjajah.

³ Nurhadi, *Masjid: Kajian Historis Perubahan Masyarakat Pasca Perang Jawa di Magetan tahun 1835-1850*, 2018

Pambuko (2013) mempublikasikan karya dengan *Masjid Syuhada Sebagai Monumen Perjuangan Rayogyakarta dalam Upaya Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia*. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 ini menemukan fakta bahwa Masjid Syuhada yang berdiri di kota Yogyakarta merupakan simbol dan kenang-kenangan perjuangan masyarakat Yogyakarta pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran dan diplomasi dengan pihak Belanda banyak dimulai dari kota Yogyakarta. Pada saat itu ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta dan masjid sebagai monumen perjuangan rakyat Yogyakarta melawan Belanda.

Resnanto (2017) mempublikasikan karya dengan judul *Dinamika Konflik Agraria Pasca Adanya Rencana Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016*⁴. Dalam tulisan ini, dia mendeskripsikan konflik agraria terjadi dikarenakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam menetapkan lokasi pembangunan bandara internasional. Kebijakan ini memiliki dampak psikologis, dampak ekonomi, serta dampak sosial dan budaya bagi masyarakat di Kecamatan Temon, Kulonprogo Yogyakarta.

Azizi, dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul *Gerakan Organisasi Wahana Tri Tunggal Melawan Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah*

⁴ Resnanto, *Dinamika Konflik Agraria Pasca Adanya Rencana Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016*, (2017)

*Istimewa Yogyakarta: Jalan Menemukan Kembali Hak Atas Kota.*⁵ Penelitian ini mendeskripsikan bahwa pembentukan *Organisasi Wahana Tri Tunggal* yang menentang pemerintah daerah Kulon progo, karena munculnya UUKeistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 yang memberikan izin pada pembangunan bandara internasional. Selain itu, keputusan sepihak yang dilakukan pemerintah dan pengembang dalam membangun bandara di lahan produktif, menjadikan warga yang tergabung pada Wahana Tri Tunggal bergerak merebut kembali hak-hak atas kehidupan mereka.

Dari beberapa karya di atas belum ada karya yang berkaitan langsung dengan masjid sebagai basis perlawanan rakyat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara di Kulonprogo Yogyakarta. Penelitian ini memiliki nilai penting dalam merangka memotret secara komprehensif konteks sosial, ekonomi dan politik yang melatari masjid sebagai basis perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara di Kulonprogo Yogyakarta, serta mengidentifikasi isu, dinamika dan resolusi untuk mengatasi konflik antara masyarakat dan negara tersebut.

E. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah

⁵ Azizi, dkk ., *Gerakan Organisasi Wahana Tri Tunggal Melawan Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta: Jalan Menemukan Kembali Hak Atas Kota.* (2017)

penyelidikan empiris yang meneliti fenomena dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak nampak dengan tegas, dan di mana multi sumber fakta digunakan. Studi kasus yang akan dipilih adalah *intrinsic case study*, yakni studi untuk memahami fenomena, keteraturan, dan kekhususan kasus.⁶ Alasan utama pemilihan ini dikarenakan adanya keinginan untuk memahami dan menyingkap perlawanan antara masyarakat dan negara dalam konflik pembangunan bandara yang berbasis di masjid tersebut secara komprehensif dan mendetail, baik dari segi kekhususan, atau keteraturannya.

2. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam konflik pembangunan bandara internasional yang berbasis di masjid Al-Hidayah. Adapun lokasi penelitian di Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Pertama*, wawancara mendalam (*depth interview*) dengan berpedoman pada *interview guide* dan bersifat tak struktur. Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang segala sesuatu kepada

⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, penerjemah M.Djauzi Muzakir, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.18

informan untuk mendapatkan penafsiran utuh tentang konflik perebutan masjid. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh jawaban yang lebih luas dan bervariasi. Wawancara pun dilakukan seperti percakapan sehari-hari dan berjalan tidak formal.⁷

Informan yang akan diwawancarai adalah takmir masjid, pengurus masjid, masyarakat penentang pendirian bandara internasional, aktivis-aktivis yang mendampingi masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah desa Palihan, pemerintah kecamatan Temon, pemerintah kabupaten Kulonproga, Pihak Angkasa Pura, dan masyarakat lain yang mempunyai data yang diperlukan.

Kedua adalah observasi. Salah satu observasi yang akan digunakan dalam studi kasus adalah observasi langsung ke lapangan.⁸ Untuk melakukan itu, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lapangan berkaitan dengan adanya informasi tentang perlawanan masyarakat terhadap negara dalam konflik pembangunan bandara yang berbasis di masjid Kulonprogo Yogyakarta. Observasi yang dilakukan bisa bersifat formal maupun tidak formal. Observasi formal dilakukan untuk mengukur peristiwa tipe pelaku tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan. Sedangkan observasi tidak formal dilakukan selama melakukan kunjungan, termasuk pada saat mengumpulkan data-data lainnya.

⁷ Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardani., *Observasi dan Wawancara*, Malang: Banyumedia, 2004, hlm.74

⁸ Robert K, Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Op.Cit., hlm. 81

Ketiga, metode dokumentasi. Dokumen-dokumen yang akan dipelajari adalah berbentuk teks-teks dan foto-foto. Teks-teks berbentuk, catatan harian warga, koran harian, laporan Ta'mir Masjid, dan data lain yang mendukung. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen berupa profil masjid: jumlah jamaah, jenis kegiatan, dan jenis usahanya. Sedangkan dokumen foto memberikan informasi visual tentang pengorganisasian masyarakat dalam menentang negara dalam konflik pembangunan bandara yang berbasis di masjid Kulonprogo Yogyakarta.

4. Analisa Data

Seperti dalam penelitian kualitatif pada umumnya, data-data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan akan dijadikan bahan utama dalam analisa. Ada tiga teknik analisa data dalam studi kasus, yaitu penjadwalan pola, pembuatan pola, dan analisis deret waktu.⁹ Selain itu, analisis data juga menggunakan tiga pola yang dikemukakan Miles dan Huber, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁰ Semua tahapan ini dilakukan secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

Analisis data diawali dengan menelaah data lapangan yang telah didapat baik dari hasil observasi ke lapangan, wawancara, atau hasil telaah dari dokumen-dokumen. Keseluruhan data tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan

⁹ Robert K, Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, *Ibid.*, 113.

¹⁰ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm.22-23

masalah dan tujuan penelitian. Setelah itu baru diadakan pengklasifikasian dan interpretasi data sehingga menghasilkan kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan dibagi lima bab. Bab I, pendahuluan, akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu juga akan membahas penelitian terdahulu. Bab ini juga memaparkan konteks sosial, ekonomi dan politik yang melatari masjid sebagai basis perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam konflik pembangunan bandara di Desa Palihan Temon Kulonprogo Yogyakarta.

Bab II akan banyak diskusi tentang kerangka teori. Beberapa teori yang akan dibahas adalah seputar masjid antara sebagai media integrasi social dan konflik; teori sumber-sumber konflik, dinamika konflik pelaku konflik, isu konflik, analisis konflik dan resolusi konflik.

Bab III akan menggambarkan profil Masjid Alhidayah Palihan, Kecamatan Temon Kulonprogo Yogyakarta, termasuk tentang awal sejarah berdirinya, jenis kegiatan, jumlah jamaah, jenis usaha, susunan pengurus masjid dan lainnya. Bab ini juga akan menggambarkan potret desa Palihan, yang meliputi letak geografis, jumlah penduduk, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hal lain terkait dengan pembangunan bandara Internasional.

Bab IV akan mendeskripsikan tentang masjid sebagai basis perlawanan masyarakat terhadap pemerintah dalam pembangunan bandara yang meliputi: konteks sosial, ekonomi, dan situasi konflik; sumber-sumber konflik; pihak-pihak konflik; isu konflik; dan dinamikanya. Bab ini juga akan menyajikan resolusi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan bandara yang berbasis di masjid tersebut. Dalam bab ini akan jelaskan mengenai upaya resolusi konflik dan alternatif resolusi konflik.

Adapun bab V, berisi kesimpulan-kesimpulan mengenai pembahasan sebelumnya, dan kemudian diakhiri dengan penutup.

BAB II



MASJID: ANTARA MEDIA INTEGRASI DAN KONFLIK

A. Masjid dan Jamaah

Istilah masjid amat akrab di telinga umat Islam. Sebab bangunan tersebut merupakan tempat bagi kaum muslim beribadah kepada Allah. Kata masjid dalam al-Qur'an terulang sebanyak dua puluh delapan kali. Dari segi bahasa kata masjid berasal dari kata *Sajada-Sujudan*, yang mengandung makna patuh, taast, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim.¹ Dari akar kata ini, maka masjid bisa didefinisikan sebagai tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama salat berjamaah,² bagi umat Islam. Menurut Masdar Mas'udi masjid juga dimaknai sebagai tempat bersujud dan berdoa menyatakan puji syukur kepada Allah menurut tata cara syariat Islam.³

¹ Budiman Mustofa, *Menejemen Masjid: Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan potensi Masjid*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), hlm. 16

² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), hlm. 50

³ Masdar F. Masudi, *Memakmurkan Masjid Nadhiyin untuk Umat dan Bangsa*,

Definisi di atas selaras dengan firman Allah: *“Sesungguhnya Masjid-Masjid itu milik Allah, karena itu janganlan menyembah selain Allah sesuatu apapun”* (Q.S.al-Jin: 18). Dari ayat ini nampak jelas bahwa masjid adalah tempat menyembah dan ibadah untuk Allah. Selain itu, masjid juga merupakan bangunan yang menjadi milik dan rumah Allah. Hal ini semakin diperjelas oleh Sabda Rasulullah SAW: *“Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) bumi sebagai masjid dan sarana Pensucian diri”* (HR.Bukhari dan Muslim).

Al-Quran juga menyebutkan fungsi masjid antara lain di dalam firman-Nya:

Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak (pula) oleh jual-beli, atau aktivitas apa pun dan teringat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang (QS An-Nur [24]: 36-37).

Menurut Quraish Shihab, tasbih bukan hanya berarti mengucapkan Subhanallah, melainkan lebih luas lagi, sesuai dengan makna yang dicakup oleh kata tersebut beserta konteksnya. Sedangkan arti dan konteks-konteks tersebut dapat disimpulkan dengan kata taqwa.⁴

Dari beberapa dalil naqli di atas sungguh amat jelas bawah masjid memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai tempat

(P3M: Jakarta, 2006), hlm. 249

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Op.Cit*, hlm. 51

menyembah pada Allah dan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pensucian diri. Apakah bentuknya terkait langsung dengan Allah (ibadah vertikal) atau yang terkait dengan manusia (ibadah horizontal). Sejarah mencatat, masjid pada masa Nabi Muhammad, memiliki beberapa fungsi: tempat ibadah (shalat, zikir), tempat konsultasi dan komunikasi (ekonomi-sosial budaya), tempat pendidikan, tempat santunan sosial, tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, tempat pengobatan para korban perang, tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, tempat menerima tamu, tempat menawan tahanan, dan pusat penerangan atau pembelaan agama.⁵

Pada masa silam masjid memiliki berperan sedemikian luas. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai, norma, dan jiwa agama.
2. Kemampuan pembina-pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid.

Pada jaman dahulu, manifestasi pemerintahan terlaksana di dalam masjid, baik pada pribadi-pribadi pemimpin pemerintahan yang menjadi imam/khatib maupun di dalam ruangan-ruangan masjid yang dijadikan tempat-tempat kegiatan pemerintahan dan syura (musyawarah). Keadaan itu kini telah berubah, sehingga timbullah

⁵ M. Quraish Shihab...*Op.Cit*, hlm 51

lembaga-lembaga baru yang mengambil-alih sebagian peranan masjid di masa lalu, yaitu organisasi-organisasi keagamaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhrawi umat beragama. Lembaga-lembaga itu memiliki kemampuan material dan teknis melebihi masjid.

Fungsi dan peranan masjid besar seperti yang disebutkan pada masa keemasan Islam itu tentunya sulit diwujudkan pada masa kini. Namun, ini tidak berarti bahwa masjid tidak dapat berperan di dalam hal-hal tersebut. Fungsi masjid menurut M.E.Ayub, sebagaimana dikutip oleh Nana Rumkana, paling sedikit ada sembilan, di antaranya adalah sebagai berikut⁶:

1. Masjid adalah tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri pada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslim beritikaf, membersihkan diri, mengembangkan batin, keagamaan sehingga terpeliharalah keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslim berkonsultasi mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.

⁶ Nana Rumkana, *Masjid dan Dakwah*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2002), hlm. 50

5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid tempat menghimpun dana, menyiapkan dan membaginya.
9. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Menurut Harun Nasution fungsi di atas saat ini telah bergeser dan hanya menjadi tempat beribadah dalam pengertian sempit. Fungsi sosial masjid sudah tergantikan oleh institusi lainnya. Misalnya pendidikan sekarang tidak lagi di masjid akan tetapi di lembaga khusus, demikian juga dengan masalah ekonomi dan politik telah memiliki tempat tersendiri.⁷

Setiap masjid mesti memiliki jamaah. Yang dimaksud jamaah adalah orang yang mengikuti kegiatan peribadatan dan keagamaan serta sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh masjid.⁸ Jamaah masjid harus dibina agar

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm.249

⁸ Anas Ajudin, *Pemberdayaan Masyarakat berbasis Masjid: studi di Masjid al-Wustho Mangkunegaran Surakarta*, laporan Penelitian tidak diterbitkan, 2008, hlm. 9

menjadi kesatuan manusia yang memiliki budi pekerti sesuai ajaran-ajaran Islam. Pembinaan jamaah bisa dilakukan oleh imam masjid, pengurus masjid, dan takmir masjid. Pembinaan terhadap jamaah bisa di bidang keagamaan, sosial, ekonomi atau budaya. Sehingga mereka memiliki kultur dan kebiasaan berlandaskan Islam dan berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadis. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka membina dan memelihara jamaah antara lain:⁹

1. Menyelenggarakan pengajian-pengajian, kuliah subuh peringatan hari-hari besar Islam dan Nasional.
2. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak, pemuda dan orang tua, baik pria maupun wanita, dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama.
3. Pembinaan remaja yang diselenggarakan secara koordinatif dan bekerja sama dengan lembaga lain, pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan.
4. Pembinaan remaja secara terarah, terkordinir dan berencana hendaknya dilakukan oleh koordinator masjid tingkat propinsi dengan langkah-langka: penelitian, penyusunan pola pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Memeberikan pertolongan dana sakit dan kematian dan pertolongan lainnya bagi jamaah yang mendapat musibah dab nenerlukan.

⁹ Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah*, *op.cit*, hlm. 147

6. Membantu pengurusan zakat dan sadekah oleh badan amil zakat, penyembelihan korban, khitanan dan lainnya.
7. Mengusahakan adanya perpustakaan masjid.

Dengan cara-cara di atas, jamaah masjid akan memiliki kesehatan jiwa dan fisik dalam upaya memakmurkan masjid. Pemakmuran masjid bukan hanya meramikan kegiatan masjid, tapi juga menyangkut kemakmuran ekonomi dan pengetahuan agama jamaah. Oleh sebab itu, aspek ilmu agama juga menjadi bagian penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap jamaah. Adapun beberapa materi pelajaran yang sebaiknya diprioritaskan bagi jamaah adalah sebagai berikut¹⁰:

1. Aqidah Islamiyah.
2. Akhlakul karimah.
3. Syariah dan ibadah.
4. Ijtimiyah Islamiyah dan Ukhuwa Islamiyah.
5. Wawasan Perkembangan dunia Islam.

Materi-materi di atas diharapkan mampu memperdalam pengetahuan keagamaan para jamaah, sehingga mereka bisa mengamalkan untuk beribadah baik yang bersifat vertikal (kepada Allah) atau horisontal (ibadah muamalah sesama maunisia). Berbagai macam Ibadah vertikal adalah seperti shalat, puasa, haji dan lain-lainya. Adapun ibadah horisontal seperti mengjung silaturahmi pada saudara, membantu sesama, menjalin persaudaraan dan lain-lainnya.

¹⁰ Nana Rukmana, *Masjid dan Dakwah*, *ibid*, hlm. 149

Melalui ibadah yang bersifat vertikal jamaah diharapkan menjadi hamba Allah yang muhlis, shaleh, dan akan mendapat ridla-Nya. Adapun dari sisi ibadah yang bersifat horisontal, sesama jamaah diharapkan mampu menjaga persaudaraan sesama muslim, sehingga terciptalah integrasi sesama umat muslim atau dengan umat agama lainnya.

B. Integrasi Umat

Masjid merupakan tempat merajut persaudaraan sejati, saling mengasihi, mengayomi dan membantu satu dengan yang lain. Di sini masjid menjadi tempat menyatukan hati dan langkah untuk kemaslahatan umat.¹¹ Dalam konteks ini, masjid menjadi media integrasi sosial bagi komunitasnya. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut.¹² Masyarakat terintegrasi karena tumbuhnya konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental.

Masjid bila dikelola dengan baik dan penuh keikhlasan akan menjadi wahana bagi terciptanya berbagai model integrasi, yakni integrasi keluarga, integrasi kekerabatan, integrasi perkumpulan, integrasi masyarakat, integrasi suku bangsa, dan integrasi bangsa.

¹¹ Masdar F. Masudi, *Op.Cit*, hlm.9

¹² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, penejemah: Robert M.Z. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 204-205

Namun di sisi lain, keberadaan masjid bisa menjadi media konflik baik bagi sesama jamaah atau dengan kelompok lain. Menurut A. Malik Mtt, tempat seperti masjid juga bisa menjadi penyebab ketegangan atau konflik baik antara umat beragama atau antar sesama.¹³ Hal ini dipicu oleh perbedaan dalam menafsirkan teks al-Qur'an dan Hadis.

Setiap jamaah wajib menghormati jamaah lainnya sebagai wujud persaudaraan dalam suka dan duka. Setiap jamaah diwajibkan mengohramati dan menghargai jamaah lainnya.

Namun pada akhir-akhir ini, sering dengan masuknya berbagai macam aliran keagamaan, terutama Islam radikal dan fundamental, kerukunan dan rasa solidaritas jamaah masjid mulai terpecah belah. Aliran keagamaan yang baru biasanya membawa ajaran baru dan seringkali menyalahkan dan terkadang mengkafirkan jamaah lain yang berbeda dengan dirinya. Pada saat itulah benih-benih konflik antar komunitas keagamaan di antara jamaah masjid mulai terjadi.

C. Teori Konflik

Konflik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam masjid. Konflik selalu hadir, meski manusia berusaha menghindarinya. Kejadiannya tidak mengenal ruang dan waktu. Apakah masyarakat dalam keadaan susah atau bahagia, apakah pada waktu pagi, siang atau malam. Dengan ungkapan lain, konflik terbebaskan dari ruang dan waktu.

¹³ Drs. A. Malik Mtt, M.Si, *Pura dan Masjid : Konflik dan Integrasi Pada Suku Tengger, Kecamatan Sumber, Probolinggo*, (Jakarta: BPPA, 2007), hlm.10

Pada saat masyarakat meramaikan masjid, konflik juga membayang-banyangi mereka. Pada saat ada ketidakjelasan dalam kepengrusan masjid, ada sebagian orang kemudian menentangnya. Bahkan ketika ada kelompok keagamaan lain yang masuk meramaikan masjid, tak jarang kelompok keagamaan lokal yang merasa memiliki masjid kemudian mencurigai. Di situlah kemudian benih-benih konflik terjadi.

Dari kasus tersebut, maka timbul pertanyaan, apa itu konflik? Konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceive divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.¹⁴ Dengan bahasa lain, konflik bisa diartikan sebagai hubungan antara dua pihak, atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.¹⁵

Melengkapi definisi di atas, maka tepatlah jika meminjam definisi konflik yang ditawarkan Coser. Ia mendefinisikan konflik sebagai bentuk perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.¹⁶

¹⁴ Dean. G . Pruitt dan Jeffrey Rubin, *Teori Konflik Sosial*. penerjemah Helly P. Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9-10

¹⁵ Chris Mitchel, *The Structure of International Conflict*. (London: Macmilan, 1981), hlm. 8

¹⁶ Lewis A, Coser, "Conflict" dalam *Enclopedy of Social Science*, (London: Free

Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam setiap konflik terdapat beberapa unsur,¹⁷ yaitu:

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat. Jadi ada interaksi antara mereka yang terlibat.
2. Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik. Tujuan itulah yang menjadi menjadi sumber konflik.
3. Ada beberapa perbedaan pikiran, perasaan, tindakan, di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan/sasaran.
4. Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan. Ini meliputi situasi antarpribadi, antarkelompok, dan antarorganisasi.

Bagi Burton studi konflik memiliki dua fokus perhatian.¹⁸ Pertama, menjelaskan gejala konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna menemukan pendekatan konstruktif guna memecahkannya. Kedua, memberikan penjelasan terhadap permasalahan konflik, untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik. Studi yang mencari penjelasan memungkinkan adanya peramalan.

Berpijak dari sejumlah pengertian di atas, penelitian ini membatasi diri dengan mendefinisikan konflik sebagai suatu

Paperback Press, 1972), hlm. 232-236

¹⁷ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 250

¹⁸ John Burton, *Conflict: Resolution and Prevention*, (New York: The Macmillan Press, 1990), hlm. 3

“perwujudan perbedaan cara pandang” antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama. Sorotan dan titik tekan penelitian ini adalah konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah dengan menggunakan masjid sebagai basis perlawanan terhadap pembangunan bandara kulonprogo Yogyakarta

D. Sumber-Sumber Konflik

Konflik lahir bukan di ruang hampa. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan, yakni perasaan mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan oleh seseorang. Kepentingan terbagi menjadi tiga macam: kepentingan bersifat universal (seperti kebutuhan rasa aman, identitas, restu sosial, kebahagiaan, kejelasan, dan lain-lain), kepentingan bersifat spesifik bagi para pelakunya (semisal keinginan suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahan), dan kepentingan yang bersifat lebih penting daripada yang lain.¹⁹

Dahrendrof membagi kepentingan menjadi dua macam: kepentingan *laten* (bersifat terselubung, masih di bawah permukaan kesadaran) dan kepentingan *manifest* (nyata dan disadari). Kepentingan laten tidak langsung disadari dan dimaksudkan oleh pihak yang bersangkutan. Meski demikian, kepentingan tersebut tetap ada dan memiliki pengaruh. Kalau di bawah kondisi-kondisi tertentu, kepentingan yang pada mulanya tidak disadari dan kemudian sedikit demi sedikit disadari, maka kepentingan laten itu akan berubah menjadi kepentingan manifest.²⁰

¹⁹ Dean. G. Pruitt, dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial..Op.Cit*, hlm. 21

²⁰ K. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 217

Bila kepentingan-kepentingan di atas tidak terpenuhi dan pihak-pihak tertentu tidak bisa mengendalikannya, maka sistem sosial yang ada di masyarakat akan terganggu. Dan pada saat itulah konflik sosial akan terjadi. Hal yang memperuncing tingginya tingkat kepentingan dan pada gilirannya melahirkan konflik adalah ketidaksesuaian aspirasi. Ketidaksesuaian ini bekerja melalui tiga cara: tingkat aspirasi suatu pihak, persepsi satu pihak atas aspirasi pihak lain, dan tidak ditemukan alternatif yang menguntungkan semua pihak.²¹ Ketiga cara ini bukan urutan yang menghasilkan ketidaksesuaian, tetapi hanya sebagai salah satu media yang melahirkan ketidaksesuaian dan kemudian memunculkan berbagai macam kepentingan.

Sementara itu, Fisher menyebutkan bahwa sumber konflik atau hal-hal yang menyebabkan lahirnya konflik ada enam macam:²²

- a. Teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
- b. Teori negosiasi prinsip. Teori ini beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c. Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam masyarakat disebabkan

²¹ Dean. G. Pruitt, dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial....Op.Cit*, hlm, 27-38

²² Simon Fisher, etc, *Mengelola Konflik....Op.Cit*, hlm. 8-9

oleh kebutuhan dasar manusia –fisik, mental, dan sosial- yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.

- d. Teori identitas. Teori ini berargumen bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.
- e. Teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
- f. Teori transformasi konflik. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

E. Sumber Konflik Agama

Dalam kehidupan sehari-hari agama seringkali memiliki peran ganda. Pada satu sisi, agama berperan sebagai pembimbing manusia mencapai kemuliaan. Namun di sisi lain, keberadaan agama justru melahirkan sikap-sikap yang cenderung menimbulkan konflik dan kekerasan. Dua kutub peran agama inilah yang selalu menghantui kelangsungan hidup manusia.²³

²³ Maarif Jumain, *Manual Advokasi: Resolusi Konflik antar Etnik dan Agama*, (Solo: CISCORO, 2004), hlm. 44

Kutub yang paling membahayakan dan bisa mengancam kestabilan hidup masyarakat adalah tatkala agama dijadikan 'kambing hitam' untuk melegitimasi konflik yang disertai dengan kekerasan. Konflik bisa diartikan sebagai hubungan antara dua pihak, atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.²⁴ Dalam bahasa lain, Lewis A. Coser mendefinisikan konflik sebagai bentuk perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.²⁵

Bila dilihat dari sudut pandang teoritis, konflik menurut Ralf Dahrendorf merupakan fenomena yang selalu hadir (*inherent omni-presence*) dalam setiap masyarakat manusia. Menurutny, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak bisa dihindarkan. Namun pihak yang menolak sudut pandang itu mengatakan bahwa akan menjadi persoalan besar tatkala cara untuk untuk mengeskpresikan perbedaan kepentingan diwujudkan dalam ekspresi yang tidak demokratis dan merusak, melalui penggunaan cara kekerasan fisik.²⁶

²⁴ Chris Mitchel, *The Structure of International Conflict*. (London: Macmilan, 1981), hlm.8

²⁵ Lewis A Coser. "Conflict" dalam *Enclopedy of Social Science*, (London: Free Paperback Press,1972), hlm. 232-236

²⁶ Dahrendorf, Ralf, *Calas and Class Conflict In Industrial Society* (Standford, CA,;

Dengan meminjam bahasa Coser atau Dahrendrof, maka konflik dalam beragama kerap kali terjadi karena ketidakselarasan individu atau kelompok terhadap nilai-nilai status, kuasa atau pandangan yang berkaitan dengan doktrin dan keyakinan agama tertentu. Doktrin dan keyakinan tersebut kemudian menjelama dalam praktik keberagamaan yang destruktif dan rentan konflik. Menurut penulis, ada beberapa sikap beragama yang rentan konflik yang semestinya dibuang jauh-jauh dari pemahaman dan praktik pemeluk agama agar tercipta keharmonisan dan kehidupan saling berdampingan.

Pertama, memperlakukan agama sebagai ideologi. Agama bisa menjadi perekat masyarakat karena memberi kerangka penafsiran dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial, di satu sisi, dan bisa menjadi sumber kekerasan dan merusak tatanan sosial karena disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, di sisi lain. Sejauh mana suatu tatanan sosial dianggap sebagai representasi religius yang dikehendaki Tuhan. Masalah tatanan sosial itu akan menjurus ke konflik jika terjadi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan masalah ketidakadilan dan kekuasaan.

Apalagi, kalau ada kelompok yang mempunyai pemahaman eksklusif dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial tersebut. Pemaknaan atau penafsiran cenderung menyembunyikan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Penyembunyian kepentingan itu terkait dengan peran ideologi agama, dalam arti sebagai

Standford University Press:1959), hlm. 241

faktor integrasi dan pembenaran dominasi. Apa yang ditafsirkan dan mendapat pembenaran dari agama adalah hubungan kekuasaan karena setiap tindakan dan setiap kekuasaan selalu mencari legitimasi. (Haryatmoko, 2003: 65).

Kedua, sikap standar ganda. Hugh Goddard, seorang teologi Islam di Nottingham University, Inggris, dalam buku monumentalnya, *Christians & Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding* (1995), mencatat bahwa yang membuat hubungan Kristen dan Islam menjadi kesalahpahaman, bahkan menimbulkan suasana saling menjadi ancaman dan permusuhan ialah sikap standar ganda (*Double Standards*).

Artinya, orang-orang Kristiani atau Islam selalu memakai standar yang berbeda untuk dirinya, yang biasanya standar tersebut bersifat ideal dan normatif untuk agama sendiri, sementara untuk agama lain, menerapkan standar lain, yang lebih realistis dan bersifat historis. Melalui standar ganda inilah, muncul prasangka-prasangka teologis, yang memperkeruh hubungan antarumat beragama.

Dalam soal teologi, misalnya, standar yang menimbulkan masalah klaim kebenaran ialah standar bahwa agama kita adalah agama yang paling sejati berasal dari Tuhan, sedangkan agama lain hanyalah konstruksi manusia atau mungkin juga berasal dari Tuhan tapi telah dirusak, dipalsukan oleh ulah manusia.²⁷ Dalam pergulatan sejarah, standar ganda ini dipakai untuk menghakimi agama orang

²⁷ Rahman, Budi Munawar, *Islam Pluralis, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 34

lain di bawah standar agama kita. Lewat standar ganda ini pula muncul klaim-klaim kebenaran dan janji-janji keselamatan yang ada di agama masing-masing. Bahkan saking ekstrimnya, janji tentang keselamatan agama, terkadang berujung dengan ‘mengeluarkan’ pemeluk agama tertentu dari partisipasi bersama-sama di jalan Tuhan.

Janji keselamatan bisa kita lihat, sebagaimana dikutip Rahman, dalam agama Kristen dan Islam. Dalam Kristen ada pandangan bahwa Yesus adalah satu-satu jalan yang sah untuk keselamatan. “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes: 14: 6). “ Atau juga ayat, “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan” (Kisah Para Rasul 4, 12). Dalam kristen contoh-contoh ayat tersebut menjadi simbol tentang tidak adanya keselamatan di luar Yesus Kristus.

Sementara dalam Islam, ada ayat-ayat al-Qur’an yang sering disitir umat Islam untuk mengkalim janji keselamatan, semisal: “Barang siapa menerima agama selain Islam, maka tidaklah diterima dan pada hari akhirat ia termasuk golongan yang rugi” (Q.S Ali Imron 3: 85), “Sungguh, agama pada Allah ialah Islam” (Q.S Ali Imron 3: 19).

Ayat-ayat di atas, baik oleh kalangan Kristen atau Islam, terutama yang beraliran tekstualis selalu dijadikan legitimasi untuk menjustifikasi kebenaran yang ada di agama

masing-masing dan yang lain tidak. Implikasi dari penafsiran ayat-ayat tersebut seringkali menimbulkan klaim kebenaran. Agama lain dianggap tidak memiliki jalan keselamatan dan bertentangan dengan agama yang dianutnya.

Ketika kompleksitas di atas -klaim kebenaran dan janji keselamatan agama - tak mamupu dikendalikan penganutnya, menurut kebanyakan ilmuwan sekular, maka sikap kritis dari cara pikir beragama akan menjadi tumpul dan tak sedikit menjadi penyebab konflik-konflik antaragama.

Dalam al-Kitab (Bibel) dikatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mungkin lebih benar lagi kalau dikatakan cinta Tuhan adalah akar segala kejahatan. Agama adalah tragedi umat manusia. Ia mengajak kepada yang paling luhur, paling murni, paling tinggi dalam jiwa manusia, namun hampir tidak bertanggungjawab atas berbagai peperangan, tirani, dan penindasan. Marx menggambarkan agama sebagai candu rakyat; tetapi agama jauh lebih berbahaya daripada candu. Agama mendorong orang untuk menganiaya sesamanya, untuk mengagungkan perasaan dan pendapat mereka sendiri atas perasaan dan pendapat orang lain, untuk mengklaim bagi diri mereka sendiri sebagai pemilik kebenaran.” (A.N. Wilson, 1992: 1, sebagaimana dikutip Nurcholis Madjid dalam buku *Islam Agama Kemanusiaan*, 1995: 121)

Ketiga, agama dijadikan legitimasi etis hubungan sosial. Sikap tersebut bukan sakralisasi hubungan sosial, tetapi pengklaiman tatanan sosial tertentu yang mendapat dukungan agama tertentu. Identifikasi sistem sosial, politik, ekonomi tertentu dengan dukungan agama tertentu mudah memperkeruh suasana kehidupan beragama dan tak jarang berakhir dengan kekerasan.

Ambil contoh tatanan sosial yang akhir-akhir ini dikampanyekan Amerika Serikat, yakni perang melawan teroris(me). Bagi sebagian kelompok Islam, kampanye itu tak ubahnya dengan bentuk tatanan sosial yang identik dengan Kristianisme. Karena itu, mereka menolak keras kampanye tersebut. Penolakan itu bukan pertama-tama keberatan terhadap substansi perang melawan teroris(me), tetapi lebih karena klaim bahwa nilai-nilainya berasal dari agama dan budaya yang berbeda dengan agama yang mereka yakini. Akibatnya, tatanan sosial tersebut bukan menjadi keteduhan hidup, tetapi malah mengarah pada permusuhan dan saling curiga antarumat beragama.

Keempat, klaim kepemilikan agama oleh kelompok sosial (etnik) tertentu. Pada sikap tersebut, seseorang acap mengidentikkan kelompok sosial tertentu dengan agama tertentu, semisal etnik Jawa atau Aceh yang identik dengan Islam, Bali dengan Hindu, Flores dengan Kristen.

Identitas etnik secara tidak langsung juga digunakan untuk menandai agama atau keyakinan yang dianutnya. Artinya, ketika seseorang berdomisili di kelompok atau etnik tertentu, maka secara otomatis dia dianggap memeluk agama tertentu.

Hal membahayakan dalam sikap itu adalah jika terjadi konflik pribadi atau kelompok karena bisa membuka keran konflik lain, yakni konflik antaragama. Seringkali konflik itu dimulai dengan hubungan pertentangan antara dua atau lebih etnik (individu atau kelompok) yang memiliki

atau merasa memiliki, sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan. Bentuk pertentangan alamiah dihasilkan oleh individu atau kelompok etnik, baik intraetnik maupun antaretnik, yang memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai-nilai kebutuhan.²⁸ Dengan kata lain, konflik lintas agama bukan hanya dipicu perbedaan keyakinan dan agama, tetapi juga dipicu konflik etnik atau kelompok sosial.

Empat sikap beragama yang bisa menimbulkan konflik, sebagaimana disebutkan di atas, bersifat kondisional. Tergantung konteks di mana ia berada. Sebab konflik tidak bisa dilepaskan dengan konteks situasi sosial, historis, kesadaran sosial, ekonomi, ideologi, dan politik.²⁹ Suatu negara atau wilayah yang tingkat toleransinya tinggi, situasi sosial, historis, ekonomi, atau politik stabil, tidak terganggu, maka kecil kemungkinan bisa menimbulkan konflik. Sebaliknya, di wilayah atau negara yang situasi sosial, ekonomi, politik dan lainnya tidak stabil atau kacau balau, semisal di Indonesia, Filipina, atau Palestina, maka sikap beragama di atas rentan konflik dan bisa mengarah pada tindak kekerasan.

Konflik yang mengarah pada kekerasan atas nama agama pada prinsipnya dipicu oleh fanatisme berlebihan terhadap empat sikap beragama tersebut. Fanatisme, menurut Hannah Arendt, adalah bentuk penolakan terhadap yang berbeda

²⁸ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 146

²⁹ *Ibid*, hlm. 257

dan menjadi lahan subur bagi para pelaku kekerasan yang tak merasa bersalah. Lebih jauh, dia mengatakan, fanatisme adalah musuh besar dari kebebasan. Fanatisme selalu menimbulkan masalah: konflik dan kekerasan.

Lahan subur fanatisme bukan pertama-tama orang bodoh yang mudah dipengaruhi, tetapi mungkin lebih dekat dengan apa yang oleh Arendt disebut “individu massa” yang tak berkepribadian, yakni orang yang tidak dapat membedakan antara kenyataan dengan makna apa yang terjadi atau orang yang terlepas dari pijakan realitas.³⁰ Kelemahan mendasar seorang fanatik ialah tidak mampu mengambil jarak dengan keyakinannya, tidak kritis terhadap keyakinan dan tindakannya. Dengan demikian, kaum cerdik pandai pun rentan terhadap fanatisme.

Fanatisme sebagai kategori sosiologi bertolak belakang dengan toleransi. Seorang fanatik memiliki kebiasaan mengagumkan anggota kelompoknya, di satu sisi, dan memiliki sikap destruktif pada kelompok lain, di sisi lain. Hal ini memang sering terjadi dalam masyarakat dengan agama heterogen, di mana kelompok (golongan) luar atau *out group* menjadi korban.

Seorang fanatik yang tertutup dalam dunia kecilnya sendiri tidak dapat melihat kebenaran eksistensial ini bahwa manusia –juga manusia beragama wahyu– tidak pernah memiliki kebenaran selengkapya dari apapun juga yang ditangkaptanya dengan otak, apalagi mengenai kebenaran

³⁰ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.67

supra-empiris, semisal masalah iman.³¹ Bagi dia, menyadari bahwa orang lain juga memiliki kebenaran seperti yang dia yakini adalah hal yang sulit. Seorang yang fanatik akan dapat menjadi orang bijak dan toleran bila dia mampu memberangus pendirinya; kalau dia dapat melepaskan pendiriannya yang salah, bahwa apa yang benar bagi saya adalah salah bagi orang lain; apa yang suci bagi saya adalah dosa bagi orang lain dan lainnya.

Di samping empat penyebab di atas, menurut Hendropuspito, konflik yang bersumber dari persoalan agama juga bisa dipengaruhi oleh empat hal. (1) perbedaan doktrin dan sikap mental, (2) perbedaan suku ras umat beragama, (3) perbedaan tingkat kebudayaan, (4) masalah mayoritas dan minoritas kelompok keagamaan tertentu.³²

Pertama, perbedaan doktrin dan sikap mental keagamaan. Konflik dalam agama acap kali dipicu oleh doktrin kelompok agama tertentu yang mereka anggap paling benar, sementara doktrin kelompok agama orang lain dianggap salah atau mungkin sudah diselewengkan. Cara pandang seperti susah dipertemukan. Apalagi doktrin tersebut diikuti dengan sikap fanatisme berlebihan. Maka, tak heran tatkala dua doktrin kelompok agama yang berbeda, maka yang muncul adalah prasangka dan konflik. Idealnya perbedaan doktrin bukan menjadi ladang perselisihan, melainkan melahirkan sikap saling menghormati perbedaan. Hal ini akan semakin keruh manakala pemeluk atau kelompok agama tertentu

³¹ Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Kanisisus, Yogyakarta, 1983), hlm. 156

³² *ibid*, hlm. 151-154:

membalut dirinya dengan sikap mental kegamaan yang destruktif, seperti sombong, intoleransi, buruk sangka, muda menyalahkan orang dan lain sebagainya.

Kedua, perbedaan suku dan ras umat beragama. Perbedaan suku dan ras seringkali dilekatkan pada kelompok agama tertentu. Sehingga ketika ada konflik terkait dengan suku atau ras tertentu kerap kali berujung pada konflik agama. Semesila suku dayak selalu identik dengan agama Kristen dan suku Madura identik dengan agama Islam. Pada saat terjadi konflik berdarah antara suku Dayak dan Madura, kemudian mengarah pada isu konflik agama, yakni Kristen dan Islam.

Ketiga, perbedaan tingkat kebudayaan. Kebudayaan amat mempengaruhi pola perilaku seseorang dalam masyarakat. Ada kecenderungan semakin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, maka semakin dewasa pola pikir suatu masyarakat tersebut. Sebaliknya, semakin rendah kebudayaan suatu kelompok, maka semakin rendah kedewasaan dan pola pikirnya. Agama pada umumnya mendorong kemajuan kebudayaan. Namun terkadang penganutnya tidak mampu menafsir nilai-nilai kebudayaan yang dalam agamanya. Konflik suatu agama kerap kali dipicu oleh perbedaan kebudayaan di antara dua kelompok yang berseteru. Perseteruan antara kelompok agama yang berkebudayaan tinggi dengan yang berkebudayaan rendah. Hal ini bisa terjadi di antara penganut dalam satu agama atau antar pemeluk agama.

Keempat, persoalan mayoritas dan minoritas kelompok keagamaan tertentu. Dalam perjalanan sejarah umat

manusia di dunia, agama-agama besar atau kelompok agama besar tidak selalu memiliki penganut mayoritas. Pasti ada kelompok yang menjadi minoritas. Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas, namun demikian ada sebagian kecil ada yang memeluk agama non Islam. Nahdatul Ulama (NU) atau Muhamadiyah merupakan dua kelompok agama yang memiliki penganut yang sangat besar. Bahkan sebagian besar penganut dua organisasi tersebut bisa dibilang mayoritas. Sebaliknya ada kelompok atau organisasi keagamaan lain yang jumlahnya relatif sedikit, semisal Syiah, Ahmadiyah, Jamaah Tabligh, dan lain-lainnya. Perbedaan antara mayoritas dan minoritas kerap kali menjadi ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tak jarang pada aksi kekerasan atau pertumpahan darah.

F. Macam-Macam Konflik

Banyak tokoh berusaha membagi macam-macam konflik. Di antara mereka tidak ada kata sepakat berapa jenis konflik tersebut. Karena tidak ada kata sepakat inilah, jenis konflik menjadi banyak ragamnya. Fisher, et al, membagi konflik menjadi tiga macam jenis konflik.³³ *Pertama*, konflik laten. Konflik jenis ini sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan, sehingga dapat ditangani secara efektif. *Kedua*, konflik terbuka. Konflik model ini berakar amat dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. *Ketiga*, konflik di permukaan. Konflik tipe terakhir ini memiliki akar

³³ Simon Fisher, et al, *Mengelola Konflik....Ibid.*, hlm. 6-7

yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran.

Dari segi pendorong, konflik bisa dibedakan menjadi empat macam:³⁴ (1) konflik internal; (2) konflik eksternal; (3) konflik realistik; (4) konflik tidak realistik. Konflik internal timbul karena disposisi, respon, reaksi psikologis yang muncul dari dalam diri seseorang karena dia merasa kebutuhan atau keinginan pribadinya tidak dipenuhi. Kebalikan dari konflik internal adalah konflik eksternal. Jika konflik internal merupakan konflik batin yang dialami oleh seseorang, maka konflik eksternal dialami oleh antara dua orang.

Adapun konflik realistik adalah tipe konflik yang nyata, berstruktur, modus operandinya dapat diketahui, sehingga dapat dipecahkan. Kebalikannya, konflik tidak realistik bersumber dari alasan yang tidak jelas, tidak nyata, karena sumber atau sifat konfliknya tidak berstruktur, sehingga kita tidak mengetahui modus operandinya.

Di sisi lain, konflik juga dibedakan dengan konflik sosial. Cara termudah membedakan keduanya adalah dengan cara membedakan antara konflik individual dan konflik sosial.³⁵ Dalam rumusan paling sederhana, konflik individual merupakan aktualisasi perbedaan, perselisihan, ketegangan antara dua orang (sedikit orang), oleh sebab-sebab yang *private* serta mempunyai implikasi langsung pada pihak yang berkonflik.

³⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik...Op.Cit*, hlm. 268-269

³⁵ AAGN Ari Dwipayana, dkk, *Merajut Modal Sosial...Op.Cit*, hlm.12

Sedangkan konflik sosial mengandung arti pertentangan yang terjadi antara dua hal. Pertama, suatu konflik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Rumusan konflik sosial ini terjadi karena adanya pertentangan sebagai akibat dari kebijakan negara yang merugikan orang atau kelompok. Kedua, suatu kelompok/kelas sosial dalam masyarakat/kelas sosial masyarakat yang lain. Hal ini merupakan manifestasi dari perbedaan antara satu pihak dengan pihak lain dalam skala yang luas.

Konflik sosial dari segi dimensinya dapat dibagi menjadi tiga macam:³⁶ horisontal, vertikal, dan perpaduan dari keduanya. Konflik horisontal merupakan bentuk konflik yang terjadi di kalangan warga masyarakat. Kebalikan dari konflik horisontal, konflik vertikal merupakan bentuk konflik antar warga masyarakat dengan pemerintah. Adapun konflik perpaduan dari keduanya atau juga disebut konflik multidimensi terlihat jelas dalam fenomena konflik antar elit politik yang berimbas pada konflik massa dengan menggunakan sentimen dan atribut-atribut tertentu.

G. Analisis Konflik

Dalam memahami konflik diperlukan analisis konflik sebagai suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami konflik dari berbagai sudut pandang. Analisis konflik, menurut Fisher dkk, bertujuan untuk³⁷; (1) memahami latar belakang dan sejarah situasi dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 14-15

³⁷ Simon Fisher, etc, *Mengelola Konflik....Op.Cit*, hlm.17

kejadian-kejadian saat ini; (2) mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat, tidak hanya kelompok yang menonjol saja; (3) memahami pandangan semua kelompok dan lebih mengetahui bagaimana hubungannya satu sama lain; (4) mengidentifikasi faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik; (5) belajar dari kegagalan dan juga kesuksesan.

Alat bantu yang bisa digunakan untuk menganalisis dan memahami konflik, salah satunya, adalah teori pemetaan konflik yang dikemukakan Paul Wehr. Menurut Wehr dalam memetakan konflik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut³⁸:

1. Konteks atau situasi yang melatarbelakangi konflik. Konteks atau situasi bisa berupa batas geografis, struktur politik, hubungan, hukum, jaringan atau pola komunikasi, metode pembuatan kebijakan, atau lain-lainnya.
2. Pihak-pihak yang terlibat, langsung atau tidak langsung dalam konflik dan upaya perdamaian.
3. Isu atau masalah yang diidentifikasi sebagai obyek konflik.
4. Dinamika konflik.
5. Alternatif pemecahan masalah.

³⁸ Lihat “Wehr’s Conflict Map” dalam <http://www.campus-adr.org/Webquest/Wehr.htm> didownload tanggal 12 Mei 2008. lihat juga Lambang Trijono, dkk (ed), *Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia* Yogyakarta: CSPA Books, 2004), hlm. 246.

Dalam menganalisis konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah dengan menggunakan masjid sebagai basis gerakan perlawanan terhadap pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, pertama-tama akan dikupas situasi atau konteks baik yang sedang berlangsung atau telah terjadi. Konteks atau setting yang melatari yang dimaksud mencakup konteks politik, hukum dan pola komunikasi antara individu dan kelompok.

Kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik baik individu ataupun kelompok, baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik vertikal. Pihak yang terlibat langsung di sini adalah masyarakat dan pemerintah. Adapun yang tidak terlibat langsung adalah kementerian Agama Kulonprogo, Lembaga Swadaya Masyarakat, WALHI, Komunitas Mahasiswa, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam dan lainnya.

Analisis ketiga adalah berupaya mengungkap isu utama yang dikonflikkan dalam rekonstruksi rumah. Isu-isu ini bervariasi dan pihak-pihak yang berkonflik bisa memiliki pilihan yang berbeda-beda dalam waktu, tempat, dan isu yang berbeda.

Keempat adalah analisis dinamika atau pasang surut eskalasi konflik seputar pengelolaan masjid dan kecenderungan persekutuan, permusuhan dan pemisahan pihak-pihak yang terlibat konflik, baik aparat pemerintah. Dinamika konflik di balik penggunaan masjid sebagai

basis gerakan perlawanan antara masyarakat dan negara dalam pembangunan bandara Internasional di Kulonprogo Yogyakarta.

Analisis terakhir adalah alternatif yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat dan negara dalam pembangunan bandara Internasional di Kulonprogo Yogyakarta. Hal ini sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

H. Resolusi Konflik

Setelah analisis konflik dilakukan, maka tahap berikutnya yang tak kalah penting adalah resolusi konflik. Resolusi konflik bisa diartikan sebagai suatu upaya menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara pengambil kebijakan dengan kelompok yang bermusuhan.

Menurut Galtung, resolusi konflik merujuk pada upaya deskripsi konflik. Hal ini memuat tiga unsur utama yaitu:³⁹ (1) ketidaksesuaian di antara kepentingan, atau kontradiksi di antara kepentingan di antara nilai-nilai sosial dan struktur sosial; (2) perilaku negatif dalam bentuk persepsi atau stereotip yang berkembang di antara pihak-pihak yang berkonflik; dan (3) perilaku kekerasan dan ancaman yang diperlihatkan.

Bagi Galtung konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode

³⁹ Johan Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan, dan Peradaban*, terj Asnawi-Syafrudin, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 21

menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik.⁴⁰ Penanganan konflik atau resolusi konflik, sangat ditentukan oleh struktur konflik.

Dalam menyelesaikan konflik atau resolusi, menurut Fisher, dkk, perlu dilakukan berbagai cara sebagai berikut:⁴¹

1. Membangkitkan kepercayaan: membangkitkan kembali dan meningkatkan saling percaya dan keyakinan di antara pihak-pihak yang berkonflik.
2. Memfasilitasi dialog: memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi secara langsung.
3. Negosiasi: suatu proses yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
4. Mediasi: suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga, sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
5. Arbitrasi/perwalian dalam sengketa: tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

Sementara itu, Peter Colger sebagaimana dikutip Pruitt dan Rubin, menawarkan lima strategi penyelesaian konflik.⁴²

⁴⁰ Syafuan Rozi, dkk, *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, 2006), hlm. 19

⁴¹ Simon Fisher, etc, *Mengelola Konflik....Op.Cit*, hlm. 95-96

⁴² Dean. G. Pruitt, dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial....Op.Cit*, hlm. 56-58

1. Bertanding (*contending*). Strategi ini mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Seseorang lebih mementingkan pihak sendiri daripada pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri dan mencoba membucuk pihak lain untuk mengalah.
2. Mengalah (*yielding*). Maksud dari mengalah di sini adalah menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Tapi, penyerahannya tidak secara total.
3. Pemecahan masalah (*problem solving*). Staregi ini berusaha mencari alternatif yang bisa memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
4. Menarik diri (*withdrawing*). Strategi ini berbeda dengan strategi sebelumnya. Dalam menerapkan pola ini, pihak yang berkonflik ada yang memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis dan itu sifatnya permanen.
5. Diam (*inaction*). Pihak yang sedang berkonflik tidak malakukan apa pun. Strategi ini dipilih untuk menghentikan konflik, namun tindakannya bersifat temporal yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi.

BAB III



POTRET DESA DAN MASJID DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN BANDARA

A. Sekilas Tentang Desa Palihan

1. Sejarah

Asal-usul desa Palihan memiliki banyak versi. Hal tersebut disebabkan banyak tempat yang dikeramatkan yang kemudian dipercaya dan dijadikan pedoman sebagai orang yang pertama datang atau “babat alas” desa. Atas dasar itu, sejarah desa dibagi menjadi dua legenda. Keduanya diangkat dari orang dari Dusun Selong dan Dusun Palihan itu sendiri. Secara umum masyarakat menyakini bahwa keduanya merupakan orang yang membuat hutan menjadi Desa Palihan ini.¹

Pada abad ke 19 pasca perang Diponegoro melawan penjajah Belanda, dimana bangsa Indonesia mengalami kekalahan, banyak pengikut pangeran Diponegoro melarikan diri dari kejaran Belanda dan keluar dari daerah Mataram

¹ Dokumen Peraturan Desa Palihan, Nomor 09 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2016-2021.

untuk mencari tempat yang aman. Pada saat itu, Pangeran Tedjokusumi amat tidak suka pada ayahnya, Hamengkuraj Tegalarum. Sebab sang ayah bersekongkol dengan Belanda. Pangeran Tedjo Kusumo minta bantuan dengan Turnojoyo memberontak ayahnya. Namun, upayanya gagal sehingga melarikan diri sampai wilayah Adikarto/Sentolo di daerah Desa Palihan. Disinilah pangeran Tedjo Kusumo beralih nama Ki Palihan dan menetap di sini. Beliau beragama Islam yang selalu mengagungkan shalawat Nabi dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.²

2. Letak Geografis

Desa palihan berada di kawasan kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Desa ini memiliki luas wilayah 3.658.822,65 m² yang berjarak 3 km dari pusat kecamatan, berjarak 13 km dari ibu kota kabupaten dan berjarak 45 km dari ibu kota provinsi. Secara geografis, desa Palihan memiliki ketinggian tanah 250 m dari permukaan laut dan topografinya yaitu dataran rendah. Suhu udara rata-rata yaitu 24-32 derajat celcius dengan curah hujan 2000-2500 mm/tahun. Batas wilayah desa Palihan itu meliputi: Sebelah Utara ; Desa Karangwuluh, dan Janten kecamatan Temon; Sebelah selatan yaitu samudra Hindia; sebelah Timur adalah desa Glagah, dan Kebonrejo kecamatan Temon; dan sebelah barat adalah desa Sindutan, kecamatan Temon.³ Adapun peta Desa Palihan sebelum relokasi dapat dilihat di bawah ini:

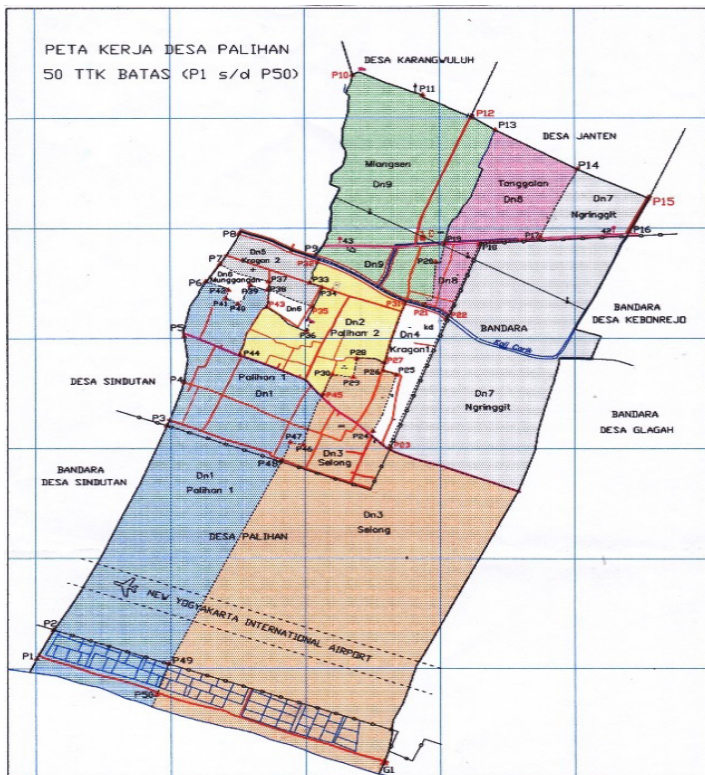
² Dokumen Peraturan Desa Palihan, Nomor 09 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2016-2021.

³ Wawancara dengan mbak sofiriana wulan afri (Kasi Pemerintahan desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB



Setelah relokasi oleh pihak bandara Internasional Yogyakarta, desa Palihan kehilangan dua dusun yang dipindahkan, yakni dusun Munggangan, dan Kragon II. Adapun perdukuan yang terkena relokasi bandara dan masih ada wilyahnya adalah pudukuhan Ngringggit yang tersisa 50% akibat relokasi, pedukuhan Kragon tersisi 40%, Dusun Palihan I yaitu daerah pertanian dan tambak terkena

relokasi bandara wilayahnya, dan Dusun Tenggalan masaih 70%.⁴ Adapun peta Desa Palihan setelah relokasi bandara sebagai berikut:



3. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Berdasar Usia

Penduduk Desa Palihan 2018 berjumlah 2443 jiwa yang terdiri dari 1219 berjenis kelamin laki-laki dan

⁴ Wawancara dengan mbak sofriana wulan afri (Kasi Pemerintahan desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB.

1224 berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk ini menyebar di Dusun Kragon I, Kragon II, Malangsén, Munggangan, Ngringgit, Palihan I, Palihan II, Selong, Tanggalkan. Berikut ini tabel jumlah penduduk Desa Palihan:

Tabel 1. Data Kependudukan Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
2	Laki-laki	1219	1219	-
2	Perempuan	1224	-	1224

Sumber: Monografi Desa Palihan 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Palihan didominasi oleh Perempuan. Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan survei tahun 2018 semester II secara demografi keseluruhan berjumlah sebanyak 2443 jiwa. Ini dilihat dari total penduduk tersebut dilihat dari jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 1219 jiwa dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 1224 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat ada sebanyak 890 KK.⁵

2. Jumlah Penduduk berdasar Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Palihan memiliki tingkat pendidikan yang variatif, meskipun fasilitas pendidikan

⁵ Wawancara dengan mbak sofriana wulan afri (Kasi Pemerintahan desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB.

di Desa Palihan belum cukup memadai atau belum lengkap. Lembaga pendidikan tersedia hanya pada tingkat PAUD, TK, SD/MI, hingga SMP saja. Tetapi, hal ini tidak menyurutkan niat masyarakat di Desa ini menempuh pendidikan hingga kejenjang Srata III. Desa palihan memiliki beberapa sarana pendidikan yaitu Sekolah Dasar Negeri Palihan Lor, Sekolah Dasar Bobkri (Sekolah Nasrani), Taman Kanak-kanak al-Mutaqin, Taman Kanak-kanak Seruni.⁶ Dengan demikian, tidak ada fasilitas pendidikan mulai dari Sekolah Menengah Pertama hingga Perguruan Tinggi. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.2. Data Kependudukan Menurut Jenjang Pendidikan

NO	Jenia Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Belum (Tidak Sekolah)	479	253 (52.82)	226 (47.18)
2	Belum (tamat SD)	240	127 (52.92)	113 (47.08)
3	Tamat SD	458	201 (43.89)	257 (56.11)
4	Tamat smp	356	167 (46,91)	189 (53.09)
5	Tamat SMA	767	410 (53.46)	357 (46.54)

⁶ Wawancara dengan bapak Bapak Sugiarta (Babin Kamtipnas masyarakat desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB.

6	Diploma I/II	11	5 (45,45)	6 (54.55)
7	Diploma III	24	11 (45.83)	13 (54.17)
8	Srata I	102	40 (39.22)	62 (60.78)
9	Srata II	5	4 (80,00)	1 (20.00)
10	Srata III	1	1 (100,00)	0 (0.00)

Sumber: Monografi Desa Palihan 2018

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa rata-rata jumlah penduduk di desa Palihan yang belum sekolah mencapai 479 jiwa. Rinciannya adalah laki-laki sebanyak 253 Jiwa, dan wanita sebanyak 226 jiwa. Jumlah ini sekaligus menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat desa Palihan belum mengenyam bangku pendidikan. Selain itu, dari data di atas juga bisa dilihat masyarakat kebanyakan lulus pada jenjang pendidikan SLTA sebanyak 767 dengan rincian 410 berjenis kelamin laki-laki dan 357 berjenis kelamin perempuan.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan atas Pekerjaan

Mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup masyarakat tergolong bervariasi. Ada yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, pegawai negeri sipil, hingga sektor jasa. Kebanyakan masyarakat Desa Palihan bekerja di sektor pertanian, karyawan swasta, dan wiraswasta.

Sektor yang mendominasi mata pencaharian masyarakat Desa Palihan adalah pertanian. Berbagai

hasil sektor pertaniannya seperti padi, terkadang jagung yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selebihnya dijual kepasar. Adapun lebih jelasnya tentang data kependudukan Desa Palihan menurut pekerjaannya bisa dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 3. Data Kependudukan Menurut Pekerjaan

NO	JENIS KELOMPOK	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Belum/Tidak Bekerja	495	272	223
2	Pengurus Rumah Tangga	243	0	243
3	Pelajar/ Mahasiswa	449	242	207
4	Pensiunan	39	22	17
5	Pegawai Negeri Sipil	41	17	24
6	Tentara Nasional Indonesia	11	11	0
7	Kepolisian Ri	8	8	0
8	Perdagangan	1	1	0
9	Petani/ Perkebunan	542	264	278

10	Nelayan/ Perikanan	1	1	0
11	Industri	1	1	0
12	Konstruksi	3	1	2
13	Karyawan Swasta	165	100	65
14	Karyawan BUMN	5	4	1
15	Karyawan Honoror	1	0	1
16	Buruh Harian Lepas	20	16	4
17	Buruh Tani/ Perkebunan	10	8	2
18	Tukang Cukur	1	1	0
19	Pendeta	1	1	0
20	Dosen	1	1	0
21	Guru	27	10	17
22	Bidan	1	0	1
23	Perawat	3	0	3
24	Sopir	7	7	0
25	Pedagang	20	9	11

26	Perangkat Desa	15	12	3
27	Kepala Desa	1	1	0
28	Wiraswasta	331	209	122

Sumber: Monografi Desa Palihan 2018

Dari tabel di atas kita bisa lihat bahwa dari jumlahnya kita dapat ketahui paling banyak penduduk desa Palihan merupakan petani. Hal ini merupakan indikator potensi yang cukup baik, karena mengindikasikan bahwa penduduk mampu berwirausaha. Namun, Setelah berlangsungnya proyek relokasi bandara masyarakat di desa Palihan berpindah pekerjaan sebagian membuka jasa sewa kos-kosan untuk para pekerja proyek.⁷

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Desa Palihan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk dengan penganut agama yang cukup beragam. Dari catatan monograf 2018 Desa Palihan menunjukkan orang yang beragama Islam sebanyak 2089, orang yang beragama Kristen sebanyak 329, dan orang yang beraga Khatolik sebanyak 25 orang. Jumlah masyarakat muslim di desa ini cukup banyak di bandingkan dengan penganut agama lainnya, untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini:

⁷ Wawancara dengan mbak sofiriana wulan afri (Kasi Pemerintahan desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB,

Tabel 4. Data Kependudukan Menurut Agama

NO	Jenis Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2089	1040	1049
2	Kristen	329	165	164
3	Katholik	25	14	11

Sumber: Monografi Desa Palihan 2018

Melihat dari paparan tabel di atas, jumlah penduduk yang beragama Islam berjumlah 2089 orang, Agama Kristen berjumlah 329 orang, Agama Katolik berjumlah 25 orang. Sedangkan pemetaan tempat ibadah untuk masing-masing agama meliputi masjid ada 4 buah, meliputi masjid al-Anwar, masjid al-Hidayah, masjid Sabilal Mutaqin, masjid Baitus Salam.⁸ Sedangkan langgar atau musala ada sebanyak 6 buah, meliputi musala al-Mubarak, musala al-Iklas, musala Sayyidina Ali, musala Baiturrahman, dan musala Zarkasih.⁹ Desa Palihan memiliki gereja sebanyak 2 buah, yaitu greja GKKJ Palihan yang menginduk ke Vatikan, dan gereja Krasulan yang menginduk ke Jerman.¹⁰ Toleransi di desa ini sangat terjaga, hal ini dikarenakan peran tokoh masyarakat,

⁸ Wawancara dengan Bapak Sugiarta (Babin Kamtipnas masyarakat desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiarta (Babin Kamtipnas masyarakat desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiarta (Babin Kamtipnas masyarakat desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB.

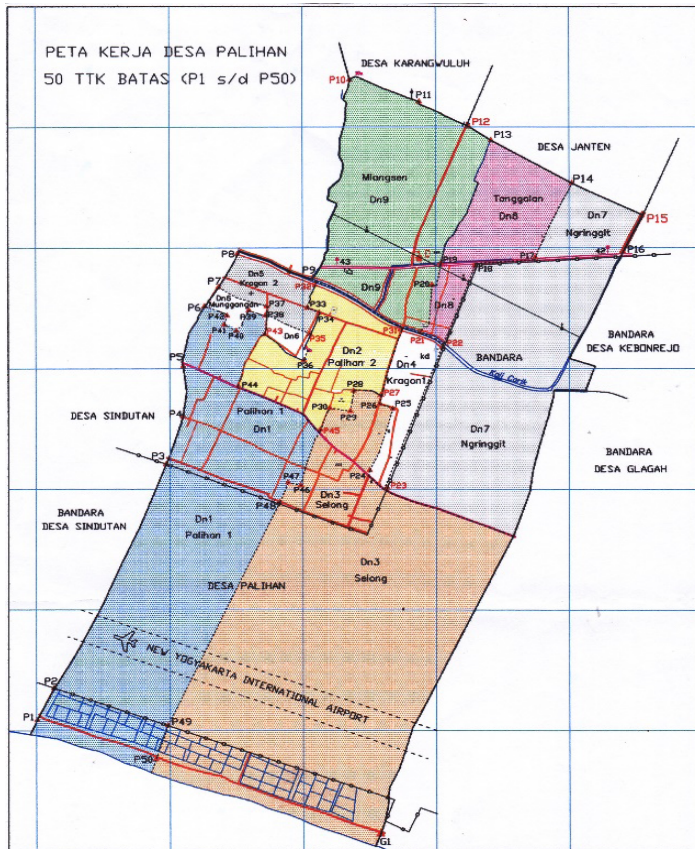
ulama, dan pemerintah desa saling bersinergi dan bekerja sama memperat tali kerukunan antar sesama.

4. Kondisi Pemerintahan

Secara administratif, desa Palihan ini terbagi menjadi 9 pendukuhan yaitu Palihan I, Palihan II, Selong, Kragon I, Kragon II, Muggangan, Ngringgit, Tenggalan dan Dusun Mlangsen. Sembilan pedukuhan ini terdiri dari 35 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT).

Setelah relokasi akibat pembangunan bandara Internasional Yogyakarta, desa Palihan kehilangan dua perdukuhan yang dipindahkan, yakni Pedukuhan Mungangan, dan Kragon II. Adapun pendukuhan yang terkena relokasi bandara yaitu pedukuhan Ngringgit yang tersisa 50% dan Kragon tersisa 40%. Dusun Palihan I yang merupakan daerah pertanian dan tambak terkena relokasi bandara dan Dusun Tenggalan, keduanya terdampak relokasi sebanyak 70% wilayahnya.¹¹ Semuanya ini berdampak pada peta desa Palihan. Adapun peta Desa Palihan setelah relokasi bandara sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan mbak sofiriana wulan afri (Kasi Pemerintahan desa Palihan) pada Selasa, 27 Agustus 2019, 09.30 WIB.



Desa palihan di pimpin oleh seorang kepala desa bernama Kalisa Paraharyana yang di bantu sekretaris bernama Susanti. Selain itu, desa Palihan juga memiliki Kaur Umum Aparatur Desa dan Aset yang di pimpin oleh Sujarwati. Desa Palihan juga memiliki Kaur Pendapatan dan Keuangan yang di pimpin oleh Supratimiyati. Desa Palihan juga dilengkapi dengan Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan yang dipimpin oleh Ngatijan. Desa ini juga memiliki Kasi Kemasyarakatan yang

dipimpin oleh Muslihudin Sukardi, dan Kasi Pemerintahan oleh Sofriana Wulan Afri. Selain itu, Desa Palihan Juga memiliki Staf Honorer, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5. Data Kepengurusan Desa

Nama	Jabatan
Susanti	Sekretaris Desa
Kalisa Parahayana	Kepala Desa
Sujarwati	Kaur Umum Aparatur Desa Dan Aset
Supratimiyati	Kaur Pendapatan Dan Keuangan
Ngatijan	Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan
Muslihudin Sukardi	Kasi Kemasyarakatan
Dian Astuti	Staf Honorer
Sofriana Wulan Afri	Kasi Pemerintahan
Sutinaruminingsih	Staff Honorer

Sumber: Monografi Desa Palihan 2018

Desa Palihan terbagi menjadi 9 perdukuan yang dipimpin oleh kepala dukuh. Adapun nama-nama kepala Dukuh Desa Palihan dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 6. Data Kepala Dukuh Desa Palihan

Dusun	Kepala Dusun
Kragon I	Susanto- 3401012509550001
Kragon II	Wiharto- 3401011506650013
Malangsen	Iskamto- 3401012902680003
Munggangan	Yuyun Krisna W.- 3401010508820002

Ngringgit	Muslihuddin Sukardi- 3401010911610004
Palihan I	Suradi-340101300480002
Palihan II	Danang Sukenoro-3401010501840004
Selong	Siswanto-3401010811630001
Tanggalan	Iskamto-341012902680003

Sumber: Monografi Desa Palihan 2018

B. Masjid Al-Hidayah Sebelum dan Sesudah Relokasi

1. Sejarah

Masjid al-Hidayah merupakan salah satu dari empat masjid yang ada di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo¹². Masjid yang berada di Dusun Kragon II ini mulai dibangun pada tahun 1984 kemudian selesai dan diresmikan pada bulan September tahun 1985. Masjid al-Hidayah memiliki luas total 292 meter persegi berikut serambinya. Dengan ukuran seluas itu, masjid ini dapat menampung 100 jamaah lebih dalam pelaksanaan shalat berjamaah.

Masjid al-Hidayah dibangun di atas tanah wakaf dari Siswo Sumarno –warga dusun Kragon II yang saat itu menjabat sebagai Kasi Kemasyarakatan Desa Palihan. Masjid

¹² <https://kulonprogokab.bps.go.id/publication/2018/09/26/0d6872af05e7a8723a027837/kecamatan-temon-dalam-angka-2018.html>

ini dibangun secara bergotong-royong oleh warga. Siswo Sumarno berinisiasi membangun masjid karena belum ada masjid yang berdiri di Desa Palihan pada waktu itu. Sebagai pewakaf, Siswo memberi mandat kepada Muslihuddin Sukardi –warga dusun Kragon II- sebagai nadir sekaligus takmir masjid al-Hidayah pertama. Muslihuddin menerima amanah ini kemudian membentuk kepengurusan takmir masjid al-Hidayah periode pertama¹³.

Tabel 6. Susunan Pengurus Ta'mir Tahun 1985-2013

JABATAN	NAMA
PENASEHAT	Daryo karsono
KETUA	1. Muslihudin 2. R.Sutontro
SEKRETARIS	Sudarto
BENDAHARA	1. Wiharto 2. Yuni Rohmat
SEKSI SEKSI	
BIDANG IDAROH/ Administrasi	1. Sudarto 2. Edy Sartono
BIDANG IMAROH/Ibadah	1. Sarriyo 2. Muh Jahadi

¹³ Data pengurus tamir masjid al-Hidayah diperoleh dari Muslihuddin (Kasi Kemasyarakatan sekaligus Nadir Masjid Al-Hidayah tahun 1985-2013) berdasarkan wawancara pada 03 september 2019

BIDANG RIAYAH/ Pembangunan	1. Suroto 2. R.Ratri winarno 3. Drs. Hermanto
---------------------------------------	---

Sumber: wawancara pada 03 september 2019

Struktur sebagaimana tabel di atas merupakan struktur kepengurusan takmir masjid sejak tahun 1985-2013. Tidak ada perubahan kepengurusan selama 28 tahun perjalanan masjid al-Hidayah sejak didirikannya. Hal ini menunjukkan tidak adanya batasan waktu tertentu untuk masa jabatan pengurus takmir masjid al-Hidayah. Waktu yang sangat lama untuk satu periode ini juga mengisyaratkan bahwa Muslihuddin sebagai ketua takmir dianggap masih mampu mengemban amanah dalam memakmurkan masjid al-Hidayah. Disamping membentuk kepengurusan inti, Muslihuddin juga membentuk kepengurusan remaja masjid al-Hidayah yang berfungsi membantu kegiatan-kegiatan yang telah menjadi agenda masjid. Berikut struktur kepengurusan remaja masjid al-Hidayah¹⁴.

Tabel. 7. Pengurus remaja masjid al hidayah

JABATAN	NAMA
PENASEHAT	Daryo karsono
KETUA	1. Agus Widodo 2. Enang Kalbaranto

¹⁴ Data pengurus remaja masjid al-Hidayah diperoleh dari Muslihuddin (Kasi Kemasyarakatan, Nadir Masjid Al-Hidayah, sekaligus ketua takmir tahun 1985-2013) berdasarkan wawancara pada 03 september 2019

SEKRETARIS	1. Anik Setiyani 2. Enok Parsiati
BENDAHARA	Ika Novitasari
SEKSI SEKSI	
KEBERSIHAN	1. Erik Riyanto 2. Teguh Rahmat Pambudi
HUMAS	1. Raji Mardiyanto 2. Danang Adi Nugroho
KESENIAN	1. Enang Kalbaranto 2. Trianto Nugroho

Sumber: wawancara pada 03 september 2019

Pada tahun 2013 wacana pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo sudah mulai menguat dan memanas. Bahkan mendekati tahun 2013 warga pun sudah terlihat mulai terpecah. Perpecahan ini menjelaskan adanya pro dan kontra diantara warga yang rumah dan lahannya terdampak pembangunan Bandara NYIA. Hubungan antar warga mulai terganggu meskipun aktifitas masing-masing masih berjalan seperti biasanya. Masjid al-Hidayah yang berada di Dusun Kragon II juga termasuk ke dalam area perencanaan pembangunan Bandara. Sehingga hal ini pun menimbulkan pro dan kontra tersendiri dalam internal kepengurusan. Muslihuddin yang saat itu sudah menjadi perangkat Desa Palihan sebagai Kasi Kemasyarakatan mengaku sepakat terhadap

rencana pembangunan Bandara. Menurut dia, mendukung terhadap pembangunan Bandara yang sudah disetujui dan diputuskan oleh pemerintah merupakan bentuk kepatuhan warga negara terhadap undang-undang. Keberpihakan Muslihuddin terhadap wacana proyek Bandara ini bukan tidak menimbulkan konsekuensi sama sekali. Dia oleh warga kontra dianggap sebagai seorang penghianat, menjual tanah masjid dan dipandang sebagai orang yang tidak benar dan tidak amanah sebagai nadir sekaligus takmir masjid¹⁵. Padahal ia dan juga takmir lainnya pada awalnya tidak mau kalau tanah wakaf itu diganti dengan uang, maunya tanah diganti dengan tanah. Karena inilah pembongkaran masjid al-Hidayah berjalan alot sehingga masjid ini menjadi bangunan terkakhir yang berhasil dibongkar¹⁶.

Puncaknya pada tahun 2013 Muslihuddin diturunkan dari jabatannya sebagai ketua takmir masjid al-Hidayah. Hal ini dikarenakan keluarga si pewakaf yang dalam hal ini anak-anak dan cucu Siswo Sumarno termasuk warga yang tidak setuju bahkan menentang proyek pembangunan Bandara. Secara sepihak dan tidak resmi jabatan ketua takmir akhirnya dipegang oleh Hermanto salah satu anak dari almarhum pewakaf, Siswo Sumarno. Hermanto pun membentuk struktur kepengurusan baru untuk pengelolaan masjid al-Hidayah.

¹⁵ Wawancara dengan Muslihuddin (Kasi Kemasyarakatan, Nadir Masjid Al-Hidayah, sekaligus ketua takmir tahun 1985-2013) pada 03 september 2019

¹⁶ Wawancara dengan Wiharto (Dukuh Kragon 2 sekaligus bendahara masjid periode kepemimpinan Muslihuddin) pada 27 Agustus 2019

**Tabel 8. Susunan pengurus Ta'mir masjid al hidayah
Periode 2013 - 2018**

JABATAN	NAMA
PENASEHAT	1. Kalisa Paraharyana 2. Muslihudin
KETUA	1. Drs. Hermanto 2. Sumartono
SEKRETARIS	1. Yuyun Krisna Windarmanto 2. Fajar Ahmadi
BENDAHARA	1. Yuni Rohmat 2. Triyono
SEKSI SEKSI	
BIDANG IDAROH/ Administrasi	1. Yuyun Krisna Windarmanto 2. Fajar Ahmadi
BIDANG IMAROH/ Ibadah	1. Supriyanto 2. Kardiyono 3. Sariyo
BIDANG RIAYAH/ Pembangunan	1. Nuryono 2. Salbiyanto 3. Muh Zaini Tirto Wahono
HUMAS	1. Yunarto 2. Rubiyono 3. Parwoto Sukendar

Sumber: wawancara pada 03 september 2019

Struktur kepengurusan di atas jika dilihat lebih jeli dan teliti, maka akan terlihat berbeda dengan struktur kepengurusan sebelumnya. Personel yang posisinya masih tetap dalam kepengurusan hanyalah Yuni Rohmat sebagai Sekretaris masjid. Sedangkan Muslihuddin masih dalam struktur kepengurusan menjadi penasehat karena statusnya sebagai nadir tidak bisa dicopot begitu saja secara sepihak sehingga ia masih dimasukkan dalam struktur. Hal berbeda lainnya dari struktur kepengurusan yang baru adalah adanya batasan masa jabatan 5 tahun untuk satu periode kepengurusan. Perubahan besar struktur kepengurusan takmir masjid ini mengindikasikan bahwa pengurus takmir yang mendukung atau yang minimal tidak mau menentang proyek pembangunan Bandara persentasenya jauh lebih besar dari pada yang kontra. Bahkan secara keseluruhan warga Kragon II pun sebenarnya lebih banyak yang pro dari pada yang kontra dengan persentase kira-kira 40 banding 60 persen¹⁷.

Ada beberapa alasan dibalik penolakan relokasi masjid al-Hidayah. Menurut Fajar Ahmadi, adik kandung Hermanto, Siswo Sumarno ayahnya dulu mewakafkan tanah itu untuk dibangun masjid, agar masyarakat bisa salat berjamaah. Oleh sebab itu, dia tidak mau jika bangunan masjid itu harus dirobohkan untuk hal lainnya ataupun untuk Bandara. Dia masih ingat bagaimana dulu perjuangan membangun masjid al-Hidayah yang tidak mudah. Warga bergotong-royong

¹⁷ Wawancara dengan Muslihuddin (Kasi Kemasyarakatan, Nadir Masjid Al-Hidayah, sekaligus ketua takmir tahun 1985-2013) pada 03 september 2019

mendirikan masjid itu tanpa bantuan dari pemerintah, namun sekarang masjid itu harus direlakan untuk pembangunan proyek Bandara NYIA¹⁸.

Penolakan senada juga dilakukan oleh Suprianto atau yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Sopyan. Dia menolak relokasi masjid karena dia melihat masjid sebagai tempat yang suci dan sakral. Dalam pandangannya, masjid itu murni hanya untuk tempat ibadah bukan untuk hal yang lain termasuk Bandara. Dia menganalogikan hal ini dengan masjid pada zaman nabi dimana waktu itu masjid tidak memiliki bangunan, yang ada hanyalah patok-patok batas wilayah masjid. “Masjid tetap masjid meskipun tidak ada bangunannya” tuturnya¹⁹.

Hasrat pemerintah untuk memuluskan pembangunan Bandara tidak terbendung. Proyek yang diretas sejak tahun 2012 ini merupakan satu dari 248 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirumuskan dalam Perpres 58 tahun 2017²⁰. Realisasinya pun semakin nyata ketika Presiden Jokowi didampingi Gubernur DIY SRI SULTAN HB X meresmikan Bandara ini pada tanggal 27 Januari tahun 2017²¹. 23 Oktober 2017 Jokowi kembali menerbitkan Perpres nomor 98 tahun

¹⁸ <https://tirto.id/nasib-warga-kulon-progo-yang-belum-sudah-digusur-proyek-Bandara-cCuU>

¹⁹ Wawancara dengan Supriyanto alias ustadz Sopyan (warga Dusun Kragon 2 dan pengurus takmir masjid al-Hidayah bidang imarah/ibadah periode 2013-2018) pada 27 Agustus 2019

²⁰ <https://tirto.id/peran-jokowi-memuluskan-megaprojek-Bandara-kulon-progo-cBe3>

²¹ <https://www.republika.co.id/berita/inpicture/nasional-inpicture/17/01/27/okfo45283-peletakan-batu-pertama-Bandara-kulonprogo>

2017 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara NYIA.

Sepekan setelah perpres ini dirilis tepatnya pada 30 Oktober 2017, PT Angkasa Pura I ditunjuk oleh Jokowi menjadi pelaksana pembangunan dan pengoperasian Bandara²². Proses relokasi pun mulai dilakukan. Warga dari lima desa terdampak di Kecamatan Temon direlokasi ke beberapa titik²³. Untuk warga dari beberapa Pedukuhan di Desa Palihan sendiri direlokasi ke dua titik lahan, yaitu titik lahan Pedukuhan Palihan II dan titik lahan Desa Janten²⁴.

Proses pengusuran tidak berjalan mudah, pada awal Mei 2018 dari 2 ribu KK lebih yang harus direlokasi, tercatat masih ada 37 KK yang memilih bertahan di lahan terdampak baik di Desa Palihan maupun Desa Glagah²⁵. Sementara warga pro sudah mulai membangun tempat tinggal di lahan relokasi mulai akhir 2016 sampai tahun 21017, para warga kontra lebih memilih mendirikan tenda di sana setelah rumah mereka terbongkar ketimbang harus pindah ke tempat tinggal sementara yang sudah disediakan oleh Angkasa Pura I dan Pemkab Kulon Progo. Sedangkan beberapa dari mereka yang bertahan ini memilih untuk bertahan di masjid al-Hidayah. Masjid ini belum dibongkar karena masjid

²² <https://tirto.id/peran-jokowi-memuluskan-megaprojek-bandara-kulon-progo-cBe3>

²³ Empat desa yang terdampak adalah Desa Glagah, Palihan, Jangkar, Sindutan dan Kebonrejo.

²⁴ <https://jogja.tribunnews.com/2017/10/20/inilah-kilas-data-program-relokasi-warga-terdampak-bandara-kulonprogo?page=all>

²⁵ <https://www.jawapos.com/jpg-today/07/05/2018/warga-penolak-proyek-nyia-disewakan-rumah/>

penggantinya di tanah relokasi masih belum jadi. Mereka warga penolak yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) bertahan di masjid selama berbulan-bulan. Masjid ini menjadi basecamp mereka bersama para aktivis lainnya baik dari LSM maupun mahasiswa yang sama-sama menolak pembangunan Bandara NYIA²⁶.



(sumber: <http://globalindo.co>)

Setelah proses yang lama pada akhirnya warga penolak pun menyerah. Sedikit demi sedikit jumlah mereka berkurang. Menurut Yuyun, Dukuh Munggangan yang sempat bertahan di masjid beberapa bulan, faktor logistik,

²⁶ Wawancara dengan Yuyun Krisna Windarmanto (Kepala Dusun Munggangan, Desa Palihan dan pengurus takmir masjid al-Hidayah bidang Idarah/administrasi periode 2013-2018) pada 30 Agustus 2019

kebutuhan sehari-hari dan debu pembangunan Bandara yang berhembus ke arah masjid menjadi faktor utama yang menjadikan mereka memutuskan menyerah dan pindah²⁷.

2. Kegiatan Masjid

Sebagai masjid Jami', jamaah masjid al-Hidayah bukan hanya berasal dari warga Dusun Kragon II saja, tetapi juga warga Dusun Mungangan dan Ngringgit. Selain digunakan untuk salat 5 waktu, masjid ini juga digunakan untuk jamaah salat Jum'at dan salat hari raya idul fitri dan idul adha. Selain itu, masjid al-Hidayah juga memiliki kegiatan pengajian rutin malam Rabu. Program pengajian ini diadakan di rumah Pak Dalhar dari Purworejo. Pada setiap bulan Ruwah (bulan Sya'ban) diadakan tahlilan setiap malamnya. Ritual ini lebih sering dipimpin oleh Muslihuddin. Jika ada dari warga yang ingin mendoakan saudaranya yang sudah meninggal, maka dia hanya perlu menuliskan namanya di kertas kemudian diberikan kepada pemimpin tahlil agar didoakan bersama-sama. Di luar bulan Ruwah, tahlil rutinan juga diadakan setiap malam Minggu Legi. Kegiatan bulanan ini dipimpin oleh Pak Dalhar. Beliau juga lah yang memimpin pengajian rutin Selapanan yang dilaksanakan setiap Rabu Kliwon²⁸.

²⁷ Wawancara dengan Yuyun Krisna Windarmanto (Kepala Dusun Mungangan, Desa Palihan dan pengurus takmir masjid al-Hidayah bidang Idarah/administrasi periode 2013-2018) pada 30 Agustus 2019

²⁸ Wawancara dengan Wiharto (Dukuh Kragon 2 sekaligus bendahara masjid periode kepemimpinan Muslihuddin) pada 27 Agustus 2019

KEGIATAN KBM DI MASJID AL HIDAYAH



Sumber: Doukumentasi Muslihuddin, via WhatsApp pada 24 September 2019

Sekitar tahun 1993, Muslihuddin mengumpulkan anak-anak yang mau mengaji al-Qur'an di Masjid al-Hidayah. Di sela-sela kesibukannya yang waktu itu sudah menjadi Kasi Kemasyarakatan, dia menyempatkan waktu setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu di sore hari sepulang dari kantor. Dia mengajar sendiri anak-anak tersebut. Wadah ini dia beri nama TPA (Taman Pendidikan al-Qur'an) al-Hidayah. Tahun 2012 ada surat resmi yang datang dari pemerintah mengenai rencana pelebaran jalan. Letak masjid al-Hidayah yang persis di pinggir jalan menyebabkan bangunannya harus dipindah untuk merealisasikan rencana ini. Ahmad Rifa'i, seorang

warga dari Wates, Kulon Progo yang mempunyai istri warga Palihan, menghubungi Muslihuddin. Ia menanyakan apakah ada tanah yang bisa dibeli di sekitaran masjid yang ingin dia wakafkan. Muslihuddin pun mencari dan mendapatkan pekarangan yang kosong yang akhirnya bisa dibeli oleh Ahmad Rifa'i. Tanah inilah yang kemudian hari menjadi bangunan TPA al-Ikhlas²⁹.

USTADZ DAN SANTRI



Gambar para santri dan pengajar TPA al-Ikhlas di depan Gedung TPA (Sumber: Muslihuddin)

Adanya gedung baru TPA memberikan dampak yang sangat baik. Antusias masyarakat meningkat untuk menitipkan anaknya di sana. Sebelum relokasi dilakukan, tercatat lebih dari 200 santri yang terdaftar di TPA ini meskipun yang aktif setiap sorenya berkisar 100 santri

²⁹ Wawancara dengan Muslihuddin (Direktur TPA al-Ikhlas) pada 03 September 2019

lebih. Muslihuddin pun tidak lagi mengajar sendiri tetapi dibantu oleh beberapa tenaga pengajar termasuk diantaranya Supriyanto alias Ustadz Sopyan beserta istrinya. Di pagi hari bangunan ini difungsikan sebagai sekolah PAUD dimana istri Ustadz Sopyan juga ikut mengelolanya³⁰.

Bulan November 2017 listrik di Desa Palihan diputus oleh PLN tanpa adanya pemberitahuan. Hal ini cukup mengganggu kegiatan-kegiatan masjid meskipun masih bisa dilaksanakan dengan bantuan genset yang dibeli oleh tiga orang warga yang mengontrak di sekitar masjid. Adapun kegiatan masjid pasca-relokasi menurut Wiharto tidak ada perubahan atau penurunan. Malahan ada kegiatan baru yaitu kajian kitab Fiqh setiap malam Selasa. Sedangkan jumlah jamaah salat 5 waktu pun juga tidak jauh berbeda ketika masjid belum direlokasi.

3. Masjid Pasca Relokasi

Pada 26 Agustus 2018 peletakan batu pertama masjid al-Hidayah di lahan relokasi Desa Palihan dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh banyak warga dan juga beberapa tokoh seperti Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, Ketua DPRD Kulon Progo, pihak Angkasa Pura I, Camat Temon, Kades Palihan, dan banyak aparat kepolisian dari Polres Kulon Progo³¹. Dalam kesempatan ini, juru bicara Angkasa Pura, Agus Pandu Purnama menyampaikan bahwa ukuran Masjid al-Hidayah yang baru ini 3 kali lipat lebih luas dari

³⁰ Wawancara dengan Supriyanto alias ustadz Sopyan (tenaga pengajar TPA al-Ikhlas) pada 27 Agustus 2019

³¹ <http://jogja.polri.go.id/website/?p=15361>

pada masjid al-Hidayah yang lama. Masjid al-Hidayah yang ada di area terdampak pembangunan Bandara ukurannya 290 meter persegi, sedangkan yang baru ini berukuran 788,2 meter persegi. Masjid yang dibangun dengan dana hampir mencapai 500 juta ini direncanakan rampung dalam waktu dua bulan³².



Rancangan bangunan masjid al-Hidayah di lahan relokasi Desa Palihan (sumber: Muslihuddin (Kasi Kemasyarakatan, Nadir Masjid Al-Hidayah, sekaligus ketua takmir periode 1985-2013) pada 03 september 2019

Pada saat masjid al-Hidayah yang baru sudah bisa difungsikan maka masjid yang lama pun dirobohkan. Beberapa barang dari masjid lama seperti karpet, pengeras suara dan lainnya yang masih bisa difungsikan dan tidak masuk dalam penilaian tim appraisal, digunakan untuk masjid al-Hidayah

³² http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/565215/sosial/pt_angkasa_pura_i_pindahkan_masjid_al_hidayah_dari_lahan_bandara.html

yang baru³³. Para warga penolak yang dulu tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) sudah tidak ada lagi yang berada dalam pagar area pembangunan Bandara³⁴. Sebagian besar dari mereka pada akhirnya mengambil uang ganti rugi rumah dan lahan mereka di pengadilan. Tetapi tidak semuanya memilih tinggal di tempat relokasi. Beberapa memutuskan untuk tinggal di tempat lain. Namun ada juga yang sampai sekarang, Oktober 2019, belum mau mengambil uang ganti rugi karena masih belum rela tanahnya dirampas demi kepentingan Bandara³⁵.



Gambar masjid al-Hidayah di lahan relokasi yang masih dalam proses pembangunan (sumber: Muslihuddin)

³³ <https://jogja.tribunnews.com/2018/11/23/terdampak-bandara-baru-kulonprogo-bangunan-pengganti-masjid-al-hidayah-sudah-selesai-100?page=3>

³⁴ Sebelumnya kelompok warga penolak ini diberi nama WTT (Wahana Tri Tunggal) diketuai oleh Sumartono, kemudian setelah Sumartono menyerah dan mencairkan dana ganti ruginya di pengadilan kelompok ini berubah nama menjadi PWPP-KP (Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo). Sumber dari Muslihuddin

³⁵ Wawancara dengan Yuyun Krisna Windarmanto (Kepala Dusun Munggangan, Desa Palihan dan pengurus takmir masjid al-Hidayah bidang Idarah/administrasi periode 2013-2018) pada 30 Agustus 2019

Keberadaan masjid al-Hidayah yang baru dan menyebarnya para pengurus takmir periode 2013-2018 serta berakhirnya masa kepengurusan mereka mengharuskan adanya kepengurusan takmir yang baru. Untuk periode ini yang menjadi ketua adalah Wiharto Kepala Dusun Kragon II.

**Tabel 9. Susunan Pengurus Ta'mir Masjid al Hidayah
Periode 2018 - 2023³⁶**

JABATAN	NAMA
PELINDUNG	1. Kepala Desa Palihan 2. Kalisa Paraharyana
PENASEHAT	Kasi Kemasyarakatan Muslihudin Sukardi
KETUA	1. Wiharto 2. Heru Supi Irianto
SEKRETARIS	1. Andar 2. Sukiyo
BENDAHARA	1. Suryadi 2. Triyono
SEKSI SEKSI	
BIDANG IDAROH/ Administrasi	1. Parwoto Sukendar 2. Agung Widayat

³⁶ Data diperoleh dari Muslihuddin (Kasi Kemasyarakatan, Nadir Masjid Al-Hidayah, sekaligus ketua takmir tahun 1985-2013) berdasarkan wawancara pada 03 september 2019

BIDANG IMAROH/ Ibadah	1. Warsono 2. Sagiyo Wiyadi 3. Sugiyono
BIDANG RIAYAH/ Pembangunan	1. Purwo Wiyoto 2. Dhidhi Wijonarko 3. Salbiyanto
HUMAS	1. Arif Subiyantoro 2. Sujan 3. Sukijan 4. Heri Triyanto

Sumber: wawancara pada 03 september 2019

BAB IV



MASJID SEBAGAI BASIS PERLAWANAN MASYARAKAT DALAM KONFLIK PEMBANGUNAN BANDARA

Masjid merupakan bangunan suci yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat untuk menyembah pada Allah. Di samping itu, masjid juga menjadi wahana merajut persaudaraan, saling mengasihi, dan saling membantu sesama muslim. Dengan bahasa lain, masjid merupakan tempat ibadah, sekaligus wahana tempat menciptakan integrasi sosial sesama umat Islam.

Menurut sejarah Islam, masjid memiliki fungsi yang beragam. Pada masa Nabi Muhammad, masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah (shalat, zikir), tempat konsultasi dan komunikasi (ekonomi-sosial budaya), tempat pendidikan, tempat santunan sosial, tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, tempat pengobatan para korban perang, tempat perdamaian dan pengadilan sengketa, tempat

menerima tamu, tempat menawan tahanan, dan pusat penerangan atau pembelaan agama¹

Dalam konteks sejarah Indonesia, masjid tidak hanya sekedar tempat shalat lima waktu, tetapi juga basis perlawanan menentang penjajah Belanda. Umat muslim saat itu memanfaatkan masjid sebagai sarana diskusi, serta menyiapkan strategi melawan kompeni. Sebut saja Masjid Al Makmur yang berdiri di kawasan Cikini, Jakarta. Masjid ini dikenal sebagai simbol perlawanan rakyat terutama Syarikat Islam terhadap pemerintahan kolonial Belanda (www.ppp.or.id). Di masa perjuangan Pangeran Imam Bonjol melawan Belanda, masjid juga menjadi tempat menyiapkan strategi perang dan serangan fajar setelah shalat subuh. Belanda meyakini bahwa masjid hanya sebagai tempat ibadah (www.buletinkritis.wordpress.com). Keyakinan dan sekaligus kelemahan Belanda ini kemudia benar-benar dimanfaatkan Pangeran Imam Bonjol dan para pejuang untuk menggalang kekuatan dari masjid.

Dalam konteks Indonesia kekinian, masjid mayoritas hanya dijadikan tempat ibadah, belajar mengaji, belajar agama, pengembangan ekonomi dan sederat ritual keagamaan lainnya. Namun demikian, ada yang berbeda dan sangat unik dengan Masjid Al Hidayah Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Masjid ini berada di lahan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2006), hlm. 51

sebagai posko gerakan rakyat menentang penggusuran rumah, tanah, fasilitas umum dan tempat ibadah (masjid) yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*. Dengan kata lain, masjid yang semula berfungsi sebagai tempat ibadah bergeser menjadi tempat kuasa simbolik masyarakat dalam menentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan bandara.

Melihat realitas di atas, dalam sub bab ini peneliti akan mendiskripsikan dan menelaah secara kritis masjid sebagai basis perlawanan masyarakat dalam konflik pembangunan bandara dari konteks yang melatari terjadi konflik, sumber-sumber konflik, pihak-pihak pelaku konflik, dinamika konflik dan resolusi konflik.

A. Kebijakan Negara Yang Kontraproduktif

Konteks Konflik memang beragam, tergantung ruang dan waktu. Beberapa konteks yang membayangi konflik, menurut Paul Wher, bisa pada dimensi batas geografis; struktur politik, hubungan dan hukum; jaringan dan pola komunikasi, dan metode pembuatan keputusan.² Dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan sejumlah informan, peneliti menemukan konteks konflik yang menyebabkan masjid sebagai basis perlawanan masyarakat dalam konflik pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta adalah kebijakan pemerintah yang kontraproduktif, .

² Lihat artikel berjudul "Wehr's Conflict Map" dalam www.campus-adr.org/Webquest/Wehr.htm didownload tanggal 12 Mei 2008

Desa Palihan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Desa tersebut membentang sampai sebelah Utara dibatasi oleh Desa Karang Wulu, dan Janten kecamatan Temon. Di sebelah selatan oleh samudra Hindia, sebelah Timur dipungkasi dengan Desa Glagah, dan Kebonrejo kecamatan Temon; dan sebelah Barat adalah Sesa Sindutan, Kecamatan Temon.

Penduduk desa Palihan tergolong sebagai penduduk mandiri dengan mata pencaharian mayoritas sebagai petani dan perkebunan kelapa. Sehari-hari mereka hidup tenteram, aman, dan relatif makmur dalam kesederhanaan dan kerukunan yang terjaga dengan baik. Namun ketentraman tersebut ternyata tidak selamanya. Ketenangan itu harus terusik oleh desas-desus wacana relokasi pembangunan bandara baru di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Tidak terlalu jelas kapan tepatnya digulirkannya isu pembangunan bandara tersebut. Namun isu itu telah dimulai desas desusnya saat pemerintahan bupati Kulon Progo periode sebelumnya, Pak Hasto. Kemudian pada tahun 2012, berdasarkan rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Nomer 1 Tahun 2012, pemerintah bertujuan merelokasi Bandara Adi Sucipto ke Kulon Progo.

Pada awal kemunculannya, wacana relokasi menjadi tanda tanya warga. Semakin lama bukan semakin meredup, tapi justru menjadi isu sensitif bagi warga. Tak berselang lama setelah munculnya wacana tersebut warga pun mulai

terfragmentasi ke dalam dua kubu, antara pro dan kontra. Perlahan tapi pasti dampak isu tersebut mulai terasa. Dampak perpecahan sosial dan ekonomimulai dirasakan oleh warga. Setidaknya ada lima desa terdampak pembangunan bandar udara di Kulon Progo, antara Desa Palihan, Glagah, Sindutan, Kebonrejo, dan Desa Jangkaran. Kelima desa tersebut Desa Palihan dan dan Glagah yang terkena dampak paling luas.

Bagi sistem perencanaan pemerintah, pembangunan bandara ini memang sudah selayaknya dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkap dalam penelitian Sri Bintang Pamungkas dan Anggalih Bayu³ bahwa pemerintah beralasan perlunya pembangunan Bandara Internasional baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Angkasa Pura I 2015), yaitu: **Pertama**, Kapasitas terminal Bandara Adisutjipto tidak lagi bisa menampung pesawat yang *take off and landing*. Adapun daya tampung Bandara Adisutjipto adalah 1,2 s.d 1,5 juta, sedangkan jumlah per 2014 sudah mencapai 6,2 juta penumpang. Kapasitas area parkir pesawat (apron) hanya menampung 7+1 (apron baru).

Kedua, transportasi udara yang baru di Yogyakarta memang dirasa perlu. Mengingat Yogyakarta sebagai destinasi para wisatawan baik mancanegara maupun lokal, memerlukan jasa transportasi yang efektif, efisiensi, dan nyaman. Transportasi udara menjadi pilihan para pelancong dalam berpergian antar negara dan antar kota. Selain

³ Sri Bintang Pamungkas dan Anggalih Bayu, "Prahara Mega Proyek Pembangunan Bandara Kulon Progo" dalam <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601> akses 29 September 2019

itu pembangunan bandara baru juga untuk memenuhi kebutuhan jasa penerbangan baik domestik maupun non-domestik, mengingat akan kebutuhan konsumen yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Ketiga, Bandara Adisutjipto adalah milik Pangkalan TNI AU yang sebenarnya bukan untuk komersil, sehingga tidak jarang ketika TNI AU mengadakan latihan pesawat penerbangan domestik terganggu sehingga adanya *delay* atau penundaan baik ketika pesawat mau turun maupun terbang.

B. Sumber Konflik

Pembangunan bandara udara Kulon Progo sampai hari ini masih meninggalkan ragam persoalan. Masalah-masalah tersebut masih menggantung beberapa warga yang hak-haknya belum terselesaikan, atau mereka—dengan idealismenya—sengaja tidak mau lagi peduli dengan hak-haknya. Mereka tak mau lagi berurusan dengan pihak-pihak pemerintah maupun PT Angkasa Pura. Mereka lebih memilih menata lagi kehidupan barunya karena merasa dizalimi, meski jumlah berapa masih dalam hitungan jari.

Memetakan sumber-sumber konflik dengan mengacu pada keterangan di atas masih menyisakan kesimpangsiuran. Jika dilihat secara normatif, sejatinya sumber konflik tidak sekadar yang tampak di permukaan saja. Namun jika dilihat secara apa adanya (holistik), justru akan banyak konflik di luar perkiraan yang akan mengemuka. Pemerintah dan PT Angkasa Pura mungkin sudah melakukan standar

operasional secara tepat. Sehingga pihaknya “merasa” benar—jika memang benar—dalam melaksanakan tugasnya. Namun persoalannya tidak sesederhana itu. Hal-hal di luar nalar normatif justru sangat banyak sekali. Problem-problem sosial, ekonomi, budaya tidak dapat sekadar dikalkulasi secara kuantitatif. Problem-problem tersebut harus dilihat secara holistik dan mendalam sehingga mampu menemukan muara yang merangkum keseluruhan konflik.

Dalam hal ini, Sri Bintang Pamungkas dan Anggalih Bayu membuat pemetaan konflik yang, menurut hemat penulis, masih terbilang normatif. Meski demikian, pemetaan ini menjadi dasar munculnya berbagai konflik berkelanjutan. Menurutnya, ada tiga faktor pemantik konflik yang beroperasi dalam mega proyek pembangunan bandara di Kulon Progo: *Pertama*, persoalan agraria teridentifikasi sebagai akar konflik (yang memiliki kaitan erat dengan sejarah panjang persoalan agraria di DIY); *kedua*, ketimpangan kekuasaan dalam desentralisasi terkategori sebagai pendorong munculnya konflik; dan *ketiga*, keterlibatan investor asing dalam pembangunan bandara tersebut merupakan pemicu konflik.⁴

Selain itu, sumber konflik yang kemudian menfungsikan masjid sebagai gerakan perlawanan terhadap pembangunan Bandara anatra masyarakat dan pemerintah adalah persoalan livelihood (sumber penghidupan ekonomi), persoalan agraria,

⁴ Sri Bintang Pamungkas dan Anggalih Bayu, “Prahara Mega Proyek Pembangunan Bandara Kulon Progo” dalam <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601> akses 29 September 2019

pudarnya hubungan sosial, kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai dengan ekspektasi dan status tanah wakaf, kesakralan dan pergeseran fungsi masjid.

Pertama, persoalan livelihood atau mata pencarian. Ini menjadi penting karena berkaitan kelangsungan dan strategi untuk melangsungkan kehidupan warga terdampak bandara baru. Soal ganti rugi itu lain hal, namun warga yang sebagian besar sebagai petani lahan dan perkebunan sangat tergantung dengan lahan, pengairan, kondisi geografis, dan lain sebagainya.

Sebenarnya, ketika isu pembangunan bandara baru di Kulon Progo bergulir, warga tidak sepenuhnya setuju. Dengan pertimbangan karena lahan yang akan digunakan sebagai bandara baru ini merupakan lahan pertanian produktif dan sebagai mata pencaharian utama. Tidak hanya bagi warga setempat, namun juga oleh warga di luar daerah. Sepanjang musim lahan ini bisa menciptakan lapangan kerja.

Sedikitnya sekitar 25 warga yang tergabung dalam paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT) sempat melayangkan protes dan mendatangi rumah dinas Bupati Kulon Progo dengan mengungkapkan alasan penolakannya. Warga memandang keberadaan bandara akan mengusir pemukiman penduduk dan mata pencaharian warga. Oleh karena itu, mereka menuntut pemerintah untuk memikirkan masyarakat di wilayah yang akan menjadi bandara dan tidak asal mengusir.⁵

⁵ Dewi Susilowati, 2014. “Perubahan Sosial Akibat Kebijakan Relokasi Bandara Adi Sucipto di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo” *Skripsi*,

Tidak berhenti di situ, seperti dilaporkan [solopos.com](https://www.solopos.com) gelombang protes juga dilakukan ratusan warga pesisir pantai di Kulon Progo yang tergabung dalam WTT pada tanggal 7 Oktober 2014. Mereka mendatangi kantor Kepatihan di Jalan Malioboro untuk bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X guna menyampaikan aspirasinya.

Warga yang mendatangi kantor Kepatihan dengan membawa berbagai macam sayuran sebagai simbol kesuburan tanah mereka yang selama ini ditempati dan menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang melimpah. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Purwinto, ketua Paguyuban WTT, “Tanah kita tanah produktif, tanah subur. Bukan tanah yang kering dan kritis.” Ia juga mengatakan bahwa sejak awal warga yang terancam terkena dampak pembangunan proyek bandara sudah menolak proyek tersebut tanpa syarat. Mereka juga meminta izin penetapan lokasi pembangunan bandara Temon dibatalkan.⁶

Persoalan di atas semakin santer dengan munculnya beragam konflik. Pihak warga hampir tidak pernah menemukan solusi yang memuaskan dari aparat pemerintah. Mereka seperti digantung persoalan yang terus berjalan. Sementara pembebasan lahan, pematokan, dan penggusuran tetap berjalan, meski ditolak oleh sebagian besar warga. Protes-protes dan berbagai mediasi tidak cukup memuaskan warga penolak.

Ilmu Administrasi Negara (Manajemen dan Kebijakan Publik) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 4

⁶ <https://www.solopos.com/bandara-kulonprogo-ratusan-warga-temon-kirim-sayuran-ke-kepatihan-542449>

Dilihat dari sisi ekonomi memang sangat memprihatinkan. Para warga sekarang merasa kesulitan untuk menyiasati bersawah ladang. Mereka harus menyewa lahan dan merasa kesulitan air, seperti diungkap oleh Ustadz Sofyan:

“Di sini tempat kehidupan saaya, di sini tempat saya lahir. Saya bergantung pada pertanian. Kalau dilihat dari segi ekonomi hasil pertanian disana itu besar sekali, apalagi kalau dibandingkan dengan sekarang. Dilihat dari airnya di sana airnya gampang, kalau disini sampai sekarang aja susah.”

Satu per satu warga mulai merasakan kesulitan menyesuaikan diri. Secara perlahan dampak kesulitan ekonomi yang sebelumnya telah dicurigai oleh para warga terdampak mulai jadi kenyataan. Padahal jauh sebelum penggusuran tersebut, warga pernah dijanjikan solusi oleh bapak bupati guna menyiasati peralihan profesi dan meningkatkan kualitas ekonomi warga. Dia berencana membangunkan satu komunitas ekonomi dengan sistem dan mekanisme masing-masing. Namun hingga hari ini solusi tersebut tidak pernah terealisasi. Bahkan sekarang kondisinya lebih susah ketimbang sebelumnya.

Ini seperti dikisahkan Pak Yuyun, salah seorang warga penolak NYIA:

“Dulu aku pernah sowan ke Pak Bupati, ke Pak Hasto. Ketika itu konfirmasi kita lakukan selaku anak cerita sama orang tua toh, gimana tentang pertanian kita warga masyarakat nanti yang mata pencahariannya memang pertanian kan susah toh memindahkan aktivitas. Tidak semudah itu. Terus aku selaku peternak gimana? Jawabannya enak “Ya nanti kita bikin tim. Yang peternak kita bikinkan tim peternakan, nanti kita carikan

lahan.” Tapi sampai sekarang mana? Ga ada reaksi sama sekali. Kemudian yang petani ya tetep sekarang petani ini. Kayak pak Bahrin itu. Sekarang (lahan) pertaniannya jauh. Sekarang nyewa di daerah Pleret, bukan pleret Bantul ya, Pleret sini loh ya. Kan ada Pleret toh sini lewat Panjatan. Tiap pagi dia berangkat. Nyewa itu”⁷

Lebih dari itu, ketika peristiwa penggusuran petugas appraisal yang didatangkan pihak PT Angkasa Pura bukanlah dari kalangan ahli taksir. Mereka tidak lebih dari mahasiswa yang tidak tahu menahu tentang harga taksiran suatu barang. Sehingga taksiran mereka banyak meleset, bahkan jauh di bawah harga pasaran. Misalnya, soal ganti rugi rumah. Para petugas hanya menaksir sekenanya saja. Mereka tidak tahu jenis kayu yang digunakan sebagai jendela, kusen, daun pintu. Mereka tidak menghitung rumah-rumah yang bergypsum dan tidak. Demikian pula dengan perkebunan. Harga taksir tanaman jati, mahoni, kelapa dihitung sama. Mereka tidak peduli lagi dengan tanaman yang baru menanam dengan yang akan panen.

“Terus pak Harjo, sekarang tinggal di sini bingung juga dia. Soalnya kan dulu aktivitas pokoknya pertanian toh mas. Menanam cabe, semangka. Sekarang bingung. (Uang) ganti rugi udah mulai habis itu. Dan dia mengambil ganti rugi itu karena terpaksa sebenarnya. Memang terpaksa, gak ada pilihan lain. Jadi memang sengaja mereka (Angkasa Pura) ini memutuskan mata rantai pencaharian kita. Memang sengaja itu. Awalnya dari listrik kemudian pohon-pohon kelapa yang bisa kita petik untuk menopang kehidupan dirobuhkan sama tanaman cabe tanaman semangka. Wong semangka baru mau berbuah itu langsung *diiles-iles* (digilas alat berat) *entek* (dilibas habis) mas.”

⁷ Wawancara dengan Yuyun 3 Agustus 2019

Kenyataan ini benar-benar dialami oleh para warga terdampak. Bisa jadi bagi mereka yang bekerja sebagai staf perkantoran atau karyawan perusahaan tidak terlalu merasakan dampak yang cukup signifikan. Karena mereka hanya berpindah tempat tidur dan ruang interaksi. Sementara pekerjaan tetap berada di kantor yang tidak bergantung pada cuaca dan kondisi air. Namun bagi petani lahan dan perkebunan kondisi tersebut sangat menyulitkan. Mereka harus berjuang menaklukkan hunian baru, ruang sosial baru, lahan yang berjauhan dari tempat tinggal, dan kondisi air yang berbeda, dan cuaca yang berbeda.

Kedua, konflik itu kemudian diperparah dengan persoalan agraria yang tidak jelas dengan langkah-langkah dan mekanisme pemerintah yang tidak menampung aspirasi warga terdampak. Pihak Pemkab tidak melakukan mediasi dengan baik dengan warga, sehingga terkesan langkah-langkah yang mereka ambil cenderung represif. Sebut saja kasus pematokan lahan warga. Menurut Martono dari pihak Wahana Tri Tunggal (WTT), seperti dikutip [solopos.com](https://www.solopos.com) ia menyayangkan sikap dan tindakan Pemkab Kulonprogo yang tidak berunding terlebih dahulu sebelum melaksanakan pematokan. Kejadian ini, menurutnya, menunjukkan warga sudah diserang dari belakang. Sebenarnya warga WTT tidak mempersoalkan pematokan sepanjang tidak dilakukan di lahan milik warga.⁸

Pembangunan bandara jika boleh dikatakan merupakan sumber konflik utama. Artinya, penolakan warga menjadi

⁸ <https://www.solopos.com/bandara-kulonprogo-wtt-sebut-ingin-menggugat-bupati-570160>

pemicu konflik antara pihak pemerintah dan PT Angkasa Pura. Warga beralasan bahwa lahan mereka merupakan lahan produktif untuk dijadikan relokasi pembangunan bandara. Tidak hanya itu, air di kawasan tersebut tergolong jernih dibanding tempat lain. Sehingga warga merasa keberatan jika harus dikorbankan untuk kepentingan pemodal.

Persolan lahan jelas mengancam kehidupan petani desa Palihan. Seperti dikatakan oleh Yogi Zulfadli bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo berdampak pada hilangnya pekerjaan petani. Kemudian dampak di tataran sosial adalah munculnya konflik antar tetangga, bahkan keluarga.⁹ Hal ini secara tegas diungkapkan oleh Pak Yuyun, salah satu warga penolak bandara:

“Sebenarnya yang paling kita pikirkan itu masalah mata pencaharian *tok*. Pertama mata pencaharian, terus hubungan sosial kemasyarakatan kita pun ikut ambruk.”¹⁰

Hal ini juga terjadi pada beberapa warga lainnya. Pernyataan Yogi Fadli secara kongkret juga diamini oleh Badri, relawan solidaritas penolak NYIA. Ia menganggap penggusuran lahan tersebut tidak hanya berdampak pada harta (ekonomi), namun juga pada hubungan kultural antar masyarakat (sosial). Selama pembangunan bandara berproses, hubungan antar masyarakat kian menjadi terpecah-pecah. Mulai dari yang pro, kontra, hingga yang berusaha untuk moderat. Warga saling menumbuhkan sekat

⁹ “Ini Dampak Pembangunan Bandara di Kulon Progo” dalam <https://kabarkota.com/ini-dampak-pembangunan-bandara-di-kulon-progo/> akses 29 September 2019

¹⁰ Wawancara dengan Yuyun 3 Agustus 2019

dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari mereka. Hal tersebut bahkan terjadi di dalam keluarga sendiri.¹¹

Misalnya Sudiono, warga Desa Palihan. Ketika peristiwa penggusuran, Sudiono hanya bisa meluapkan kekesalannya melihat puing-puing bangunan rumahnya yang sudah rata dengan tanah. Ia terus menerus mengungkapkan kekesalannya sambil meracau, *“Aku diapusi. Nek wes padang tak obrak-abrik kabeh! (Saya ditipu. Nanti kalau sudah cerah saya hancurkan semua!)”*. Ia pun dikabarkan sempat mengalami gangguan jiwa dan mengalami stres berat. Ketika hujan turun, Sudiono hanya tidur di bekas kandang ayam milik Purwinto, tetangganya.

Menurut keterangan Purwinto, Sebelum rumahnya diratakan dengan tanah, ia memang sudah agak stres, tetapi belum terlalu parah. Namun saat rumahnya digusur, kondisinya semakin memprihatinkan. Apalagi saat ini ia hanya hidup sebatang kara. Tak punya anak dan istri. Sementara 8 saudaranya sudah berkeluarga. Sebenarnya Sudiono tidak pernah berniat menjual tanahnya, tetapi saudara-saudaranya justru menyerahkan kuasa tanah kepada pihak PT Angkasa Pura. Beberapa kali ia diajak keluarganya menempati tempat relokasi, namun ia memutuskan untuk bertahan.¹²

Ketiga, pudarnya hubungan sosial. Pembangunan badara yang diikuti dengan penggusuran berdampak pada

¹¹ “Tolak NYIA: Saya Ditipu, Esok Saya Ambrukkan Semua!” dalam <https://lpmarena.com/2017/12/12/tolak-nyia-saya-ditipu-esok-saya-ambrukkan-semua/> Akses 27 September 2019

¹² *Ibid.*,

merengangnya hubungan sosial baik dalam lingkup keluarga atau pertemanan. Pisahnya beberapa keluarga dari sanak familinya. Antara orang tua dan anak-anaknya, seperti yang dialami Ustadz Sofyan, salah satu aktifis masjid Al-Hidayah. Sebelum terjadi peristiwa penggusuran, Ustadz Sofyan hidup bersama ibunya di Desa Palihan. Namun paska relokasi, sebagai pihak yang tidak mau direlokasi akhirnya mempersilakan ibunya untuk menempati hunian relokasi yang dibelinya sebagai ganti rumah yang tergusur.

Hal ini sejatinya tidaklah mudah. Mereka harus menyesuaikan dengan lingkungan baru. Satu sisi mereka harus terpisah dengan sanak keluarga dan tetangga yang sebelumnya hidup susah maupun senang bersama. Akan tetapi, keharmonisan tersebut harus hilang berganti dengan tetangga baru gabungan dari berbagai kampung-kampung yang sebelumnya berjauhan seperti Dusun Kragon 2 dan Mungganggan menjadi satu area perumahan di perumahan relokasi. Alhasil, mereka harus memulai gaya interaksi baru dengan rumah petak dan letak geografis yang berdekatan. Tanpa halaman dan perkebunan.

Memang secara idealisme warga kontra relokasi berusaha untuk mempertahankan tanah dan tempat tinggalnya. Mereka berpikir jangka panjang dengan diri dan lingkungan barunya kelak. Mereka yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah-ladang dan penderes kelapa harus berpikir keras ketika lahan mereka harus tergadai dengan bangunan baru di lokasi baru. Sementara

mereka sendiri belum memiliki solusi kongkret untuk berganti mata pencaharian.

Sebaliknya, sebagian warga yang pro relokasi memiliki harapan baru dengan hadirnya Bandara NYIA. Adanya bandar baru diharapkan bisa memperbarui dan menunjang kehidupan mereka lebih layak dari sebelumnya. Sehingga dengan berbagai “iming-iming” mereka menerima tawaran demi tawaran dari pihak PT Angkasa Pura. Beberapa di antaranya mereka dijanjikan diangkat sebagai pegawai bandara baru dan diperbolehkan membuka stan atau warung di dalam area bandara baru. Dengan begitu, tanpa berpikir panjang mereka pun menerima tawaran tersebut.

Memang pada awalnya mereka diajak dan dilatih dengan skil yang memadai agar memenuhi standar kelayakan sebagai pegawai bandara. Namun jejak mereka sebagai petani dan sebagian pekerja serabutan tidak bisa memenuhi standar tersebut. Pada akhirnya, satu per satu warga yang telah bergabung dengan PT Angkasa Pura mulai kandas, hanya tersisa dua atau tiga orang.

Persoalan di atas seperti dikisahkan oleh Pak Yuyun:¹³

“Ya janjinya itu akan merekrut tenaga kerja lebih dari 5000 orang diutamakan warga terdampak, nyatanya gak ada, awal-awal itu kan ada pelatihan-pelatihan macem-macem. Tapi pelatihan itu ya gak ada manfaatnya sebenarnya. *Wong* pelatihannya cuman program dari BLK itu kok. Disambungkan ke BLK Wates, misalnya ya supir, ya bengkel... tapi justru yang didatangkan tenaga kerja dari luar daerah semua. Padahal dulu ya ada pelatihan alat berat, tapi gak pernah terealisasi.”

¹³ Wawancara dengan Yuyun 3 Agustus 2019

Warga yang pro relokasi dengan segera menikmati hasil ganti lahan, yang mungkin cukup besar. Namun, mereka sekadar euforia dengan uang ganti rugi tersebut tanpa memikirkan mencari mata pencaharian pokok sebagai ganti sebelumnya. Mereka pun segera membeli perkakas dan barang-barang baru. Sifat konsumtif dan foya-foya mulai menjangkiti warga Desa Palihan yang pro relokasi. Namun, tak terasa uang di tangan semakin menipis tanpa hasil yang jelas.

Kenyataan ini menjadi dampak sosial yang cukup signifikan, bahkan sampai sekarang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Martono, Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT) di laman kabarkota.com. Menurutnya, dampak pembangunan bandara sudah dirasakan. Di dalam masyarakat sudah muncul kelas sosial dengan menunjukkan si kaya dan si miskin, yang seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Perilaku masyarakat yang sudah mendapatkan ganti rugi berubah jadi konsumtif dengan langsung menggunakan uang ganti rugi untuk membeli mobil dan motor. Masyarakat mulai lupa diri dalam mengonsumsikan uangnya.¹⁴

Selain itu, ketika mulai pembebasan lahan para warga penolak bandara tersebut dituntut berhati-hati untuk menerima tamu. Pasalnya salah seorang warga penolak pernah menerima ancaman dari keluarganya melalui pesan singkat atau SMS tentang penandatanganan surat terima tanah dari Angkasa Pura. Jika ia tak menyerahkan tanahnya atau tetap

¹⁴ “Ini Dampak Pembangunan Bandara di Kulon Progo” dalam <https://kabarkota.com/ini-dampak-pembangunan-bandara-di-kulon-progo/> akses 29 September 2019

menolak, maka keluarganya menuntut uang ganti rugi. Sebab secara administratif tanah tersebut dulunya memang dipegang oleh keluarga. Semenjak ia menerima pesan tersebut, kini ia merasa sulit lagi untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Namun hingga hari ini, ia tetap memilih bertahan di rumahnya, sekalipun hubungan mereka sudah mulai renggang.

Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Sofyan:

“Sebenarnya waktu awal ketika ada isu-isu pembangunan bandara ada serangan-serangan yang membuat masyarakat itu takut duluan. Jadi (sebenarnya-red.) kalau ditanya rata-rata mau nggak kalau tanahnya di jual? Mereka jawabnya gak boleh (mau).”¹⁵

Keempat, kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai dengan ekspektasi dan harga taksir yang seharusnya. Ini penting diungkap karena pihak bandara hanya menghitung bangunan dan lahan terdampak, tanpa menelisik lebih lebih secara kualitas bangunan dan tanaman. Apakah bangunan itu bagus atau tidak, jenis kayu yang digunakan sebagai kusen, gawang pintu, gypsum, yang disamaratakan dengan bangunan lainnya. Selain itu, tim appraisal juga tidak mempertimbangkan jenis pohon dan tanaman, berapa usia pohon, apakah tanaman siap panen atau baru tanam. Karena hal ini menjadi konflik ekonomi yang cukup signifikan bagi warga terdampak. Lebih dari itu, pihak pemerintah dalam menjalankan tugasnya terkesan kasar dan menyia-nyiakan warga terdampak, tanpa memperhatikan hal-hal yang kecil, tapi cukup berharga bagi warga.

¹⁵ Wawancara dengan Sofyan 7 Agustus 2019

Hal ini sebagaimana diungkap Pak Yuyun,

“Yang petani ya sempet susah soalnya ini toh tanaman cabe baru siap panen itu dihancurkan pake bego dikawal sama aparat. Aku (punya) kandang ayam kapasitas 4500. Tiga hari sebelum panen listriknya dicabut, tapi aku sudah sedia jenset memang dari awal. Itu selama satu tahun aku pake jenset sebelum rumah dirobuhkan.”

Kisah tragis juga dialami Ustadz Sofyan. Ia menceritakan waktu itu ia punya cabe yang belum panen, dan saat itu cabe sedang tinggi harganya dan baru panen tiga kali. Tapi terpaksa harus dihancurkan menggunakan alat berat. Demikian pula dengan nasib salah seorang warga difabel, tuna wicara, yang mempunyai tanaman cabe yang siap panen. Sekali panen dalam 5 hari itu paling tidak memperoleh hasil sekitar 2 juta rupiah. Besok mau dipanen, tapi hari ini sudah digilas. Ia juga punya kelapa di depan rumahnya itu juga digilas pakai alat berat.¹⁶

Dengan demikian, selayaknya dibutuhkan tindakan resolusi konflik yang dapat menjadi penyelesaian kedua belah pihak agar bandara tidak sekadar menjadi nyanyian para pemodal dan duka lara warga terdampak, tetapi selayaknya pihak pemerintah mau menampung dan menindaklanjuti aspirasi warga. Untuk kemudian menjadi jalan solusi terbaik bagi keberlangsungan masyarakat dan pemerintah.

Kelima, status tanah wakaf, kesakralan dan pergeseran fungsi masjid. Tanah masjid Al-Hidayah adalah tanah wakaf. Selain itu, kesakralan masjid itu sendiri yang dianggap tidak

¹⁶ Wawancara dengan Ustadz Sofyan

bisa digantikan oleh masjid berikutnya setelah relokasi. Berikut adalah pernyataan yang bisa didapatkan oleh peneliti mengenai perlawanan warga atas masjid al-Hidayah:

“ Kalau yang seperti itu, saya tidak paham secara hukum. Tapi, setau saya bahwa, masjid itu pemindahan secara selaras. Soalnya kan masjid itu tanahnya tanah wakaf. Sekarang, kan pemindahannya di tanah kesultanan. Kalau secara undang-undang, saya nggak tau yang benar yang mana. Kalau sepemahaman kami, dari kenyataan penggantian hak kami, tidak sesuai syarat. Kan harusnya ada syarat-syarat yang terpenuhi ya pak.”

“... masjid menurut saya kan tempat Ibadah. Bagi umat Islam, menurut saya ini paling sakral, tempat yang paling suci. Jadi, menurut saya tidak bisa ditempati tempat lain. Masjid tetap masjid, meski tidak ada bangunannya. Itu menurut saya masih tetap masjid. Menurut saya masjid, karena tanah yang sudah diwakafkan, zaman Nabi, kan tanah dikasih patok itu masjid.”¹⁷

Aspek-aspek di atas dikhawatirkan oleh warga. Selain itu, ketika masjid direlokasi masjid tidak sanggup lagi menjadi media integrasi sosial. Setidaknya, hingga sekarang jama'ah yang ada di masjid relokasi tidak sekuat dan seharmonis di masjid al-Hidayah sebelum relokasi. Padahal, di antara fungsi masjid yang paling mendasar setelah tempat ibadah adalah, tempat merajut persaudaraan sejati, saling mengasihi, mengayomi dan membantu satu dengan yang lain, menyatukan hati dan langkah untuk kemaslahatan umat.¹⁸

Aspek lain yang juga tergusur adalah aspek fungsi masjid Hidayah yang juga tempat anak-anak dan masyarakat belajar

¹⁷ Ustadz Sofyan, 27 Agustus 2019.

¹⁸ Masudi, (2006), hlm. 9

al-Qur'an. Kantong-kantong peribadatan dan pendidikan Islam non formal terpaksa harus tunduk dengan pemodal. Seperti cerita Ustadz Sofyan, salah seorang penggerak keagamaan di Desa Palihan yang telah merintis TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), yang semula bertempat di Masjid Al-Hidayah karena tidak lagi mencukupi akhirnya dengan swadaya masyarakat bisa membangun gedung baru. Karena saat itu muridnya sudah hampir mencapai 100 orang. Dan secara kebetula ada rencana pelebaran jalan, sehingga ada wacana penggusuran sebagian bangunan. Gedung itu kalau pagi digunakan sebagai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang dikelola oleh istrinya.

“Awalnya dulu di masjid sebelum ada bangunan pengganti. Jadi awalnya itu kan bangunan TPA itu dibangun karena untuk rencana pemindahan masjid yang mau kena gusur jalan waktu itu. Tapi setelah dibangun, ya alhamdulillah yang waktu itu anak di TPA nya cuman berapa gitu puluhan, setelah dipindah itu langsung besar itu peminatnya. Kalau menurut saya untuk ukuran desa itu sudah lumayan, sekitar 100-an dari beberapa desa itu. Tiap sore dan liburnya itu hanya hari Ahad, pagi itu kan buat PAUD anak-anak sampai sekitar jam 11-an.”

Ustadz Sofyan bersama istrinya hanya bisa mengelus dada dan menangis melihat peristiwa itu. Gedung TPA yang digadang-gadang sebagai tempat kaderisasi Islam harus ditumbangkan oleh para pemodal kapital. Akhirnya, mereka harus pasrah karena merasa sulit untuk mengumpulkan kembali di tempat yang baru.

“Jadi saya cuma bisa mengelus dada dan menangis sebenarnya, tapi saya tidak bisa mengeluh sama siapa pun karena waktu

itu juga kan istri saya juga mengurus anak PAUD itu. Jadi waktu itu tanpa pemberitahuan saya tidak tahu rembukannya (pembicaraannya) seperti apa sama pihak yang mewakafkan dulu. Karena yang diwakafkan dulu itu istilahnya hak miliknya masih dimiliki seseoranglah, jadi saya tidak tahu ceritanya. Apa itu dikasih ganti rugi sama Angkasa Pura atau bagaimana saya tidak paham. Intinya waktu itu saya belum berangkat ke sana (TPA). Ketika itu istri saya sudah di sana saat jam belajar mau dimulai. Ternyata tukang-tukang datang kesitu mau bongkar bangunan itu, itu pas jam belajar pagi anak PAUD itu. Yaa saat itu juga istri saya ya menyerahkan anak-anak ke orang tuanya masing-masing. Jadi yaa cukup tragis, termasuk TPA-nya mau gak mau ya saya serahkan ke orang tua masing-masing kembali.”

Saat ini, Ustadz Sofyan hanya bisa menangi dalam hati menyaksikan masjid yang sepi pengunjung, meski masih ada kegiatan rutin, tetapi shalat jamaah harian masih terbilang sepi. Ganti rugi itu mungkin bisa dirasakan secara langsung dengan banyaknya uang, sehingga mereka pun membelikan anak-anak mainan baru, gadget baru, tanpa memikirkan kembali kondisi keagamaan di tempat yang baru. Dan anak-anak pun sekarang tidak lagi mengaji, baik sore maupun malam. Mereka disibukkan dengan gadget dan bermain game di dalamnya. Inilah yang dirasakan Ustadz Sofyan terasa berat. Mereka bercerai berai tanpa penggerak dan koordinator seperti sebelumnya.

Lima persolan di atas memicu masyarakat desa Palihan menjadikan masjid sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah dalam persolan pembangunan bandara internasional di Yogyakarta.

C. Pihak-Pihak Konflik

Sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial, konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, apalagi ditinggalkan. Dengan demikian, konflik bisa terjadi dalam konteks keluarga, masyarakat, atau bangsa. Bisa pula dalam konteks ekonomi, politik, etika, agama, dan lain-lain. Keniscayaan ini pulalah yang menjadikan manusia, sebagai subjek dari setiap konflik harus hadir sebagai orang yang sadar akan esensi dari setiap konflik.

Secara etimologi, konflik berasal dari kata *con* dan *fligere* yang bermakna benturan atau tabrakan.¹⁹ Dengan demikian, konflik adalah benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang melibatkan minimal dua kelompok, atau lebih. Karena konflik hadir di antara dua orang, dua kelompok, atau lebih, maka penyelesaiannya pun tidak selalu mudah. Oleh sebab itu, memahami jenis konflik, dan latar belakang munculnya menjadi hal yang sangat penting untuk merumuskan solusi konfliknya. Di samping itu, kemampuan memetakan pihak-pihak yang berkonflik pun, akan membawa orang ketiga (mediator) untuk mengambil keputusan yang akan diambil. Selain itu, memahami aktor-aktor dalam konflik pun sangat bisa membantu kemudahan dalam menyelesaikan konflik.

Dalam konteks pembangunan Bandara NYIA di Kulonprogo, ternyata membawa dampak yang sangat serius bagi warga sekitar. Kepentingan umum dan kemaslahatan

¹⁹ Mulyadi, "Konflik Sosial Ditinjau dari Segi Struktur dan Fungsi" dalam Jurnal Humaniora, Vol. 14, no. 3, 2002.

yang selalu dilontarkan oleh pihak Angkasa Pura dan Pemerintah dalam pembangunan Bandara, tidak selalu diterima oleh warga terdampak. Sejak 2012, wacana pembangunan bandara NYIA sudah menjadi bahan diskusi di tengah-tengah warga. Baru setelah adanya kepastian kabar, dan mulainya ada sosialisai proyek bandara, para warga yang diproyeksikan akan terdampak, mulai melakukan gerakan dan penolakan. Mulai dari penolakan lisan, tulisan, bahkan penolakan yang bersifat aktif.

Kekhawatiran para warga sekitar proyek pembangunan bandara NYIA tersebut di atas, ternyata terbukti. Setidaknya kondisi ini bisa digambarkan oleh salah satu warga terdampak, yaitu ustadz Sofyan. Ia, salah satu tokoh warga yang secara keras menentang adanya pengggusuran terhadap warga. Selain itu, ia juga termasuk warga yang berjasa besar untuk menghidupkan aktifitas masjid dan TPA yang ada di desa Kragon. Berikut adalah ungkapan yang disampaikan olehnya, ketika peneliti melakukan wawancara di tempat kediaman barunya.

“Sebenarnya, waktu awal ketika ada isu-isu pembangunan bandara, terdapat serangan-serangan yang membuat masyarakat itu takut duluan. Jadi, kalau ditanya rata-rata mau nggak kalau tanahnya dijual? Mereka jawabnya: “Gak boleh (mau). Di sini, tempat kehidupan saya, di sini tempat saya lahir. Saya bergantung pada pertanian. Kalau dilihat dari segi ekonomi, hasil pertanian di sana itu besar sekali, apalagi kalau dibandingkan dengan sekarang. Dilihat dari airnya, di sana airnya gampang, kalau di sini sampai sekarang aja susah.”²⁰

²⁰ Wawancara dengan ustadz Sofyan, 27 Agustus 2019. Sebagai tambahan informasi, ustadz Sofyan memilih untuk tidak tinggal di tempat relokasi. Hal ini sebagai

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa kekhawatiran warga, bukan sekedar aspek ekonomi yang meliputi tanah, rumah, dan lain-lain. Namun juga meliputi aspek psikologis yang harus dimulai dengan pola hidup yang berubah. Perubahan dari pola hidup bertani, menjadi bisnis atau berdagang. Kehidupan yang harus memaksa mereka untuk memulai hidup dengan warga baru. Serta kehidupan yang harus meninggalkan berbagai kenangan di tempat lama.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, setiap konflik pasti berkaitan dengan dua pihak atau lebih. Selain itu, dalam setiap konflik, pasti ada pihak yang terkait langsung, dan tidak langsung. Dalam pada itu, konflik dalam konteks pembangunan bandara NYIA dengan warga sekitar bisa dirinci sebagai berikut;

1. Pihak Primer Konflik

Dalam kasus konflik Bandara dan masjid al-Hidayah, maka yang menjadi pihak primer adalah warga desa Palihan sendiri, secara khusus Dusun Kragon 2. Di sisi lain, adalah pihak bandara NYIA sendiri, yaitu Angkasa Pura sebagai pemilik proyek pembangunan. Dalam konteks ini, pihak warga sekitar terdampak, adalah sebagai pihak korban, karena tidak memiliki kuasa, sekaligus harus dipaksa tunduk terhadap putusan pihak pemilik proyek, serta pihak pemerintah sebagai pemilik kekuasaan.

bentuk protes dan ketidaksetujuan atas putusan pemerintah dan pihak bandara NYIA, Angkasa Pura.

Berdasar pada hasil wawancara peneliti dengan pihak warga, pada awalnya, mereka tidak bersedia jika daerah mereka harus dijadikan sebagai bandara NYIA. Bagi mereka, keberadaan Bandara hanya akan menimbulkan kerugian, karena akan merusak seluruh lahan kerja, dan tempat tinggal.

Sementara itu, pihak primer kedua, Angkasa Pura sebagai pemilik proyek memunculkan wacana bahwa bandara bertujuan untuk kemaslahatan umum. Sehingga, bandara akan membawa perbaikan ekonomi bagi khalayak umum, termasuk bagi warga sekitar, bahkan warga terdampak. Dengan alasan semacam ini pula, pihak bandara sampai menjanjikan bahwa warga terdampak punya hak prioritas untuk mendapat hak akses dan pekerjaan di berbagai sector bandara.

Janji ini pula yang akan menjadi salah satu penyebab munculnya konflik baru antara warga terdampak dengan bandara. Dari berbagai informasi yang didapat oleh peneliti, ternyata janji tersebut tidak dapat direalisasikan secara maksimal, bahkan beberapa warga yang sudah mendapatkan pekerjaan, justru tergeser atau terpinggirkan dengan sendirinya. Dengan alasan kapasitas, dan profesionalitas yang tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Informasi secara detail tentang konflik ini, akan dijelaskan di sub bab berikutnya.

2. Pihak Sekunder Konflik

Dalam hal ini, pihak sekunder adalah pihak yang memiliki kepentingan secara tidak langsung dengan konflik.

Berdasar pada hasil penelitian, maka pihak sekunder di antaranya adalah, mahasiswa atau aktifis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Komnas HAM, WALHI. Selain itu ada juga pihak dari Kemenag, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Kulomprogo sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai mediator dalam konflik ini.

Mahasiswa dan aktivis berperan sebagai penyokong kekuatan bagi warga terdampak. Banyak di antara mereka yang ikut gabung memberikan bantuan pada warga, baik bantuan materil dan moril. Seperti dalam menyuarakan keberatan warga terdampak, secara langsung di lokasi konflik, maupun lewat sosial media. Sementara itu Komnas HAM, hadir untuk memberikan dukungan pada warga terdampak. Termasuk dalam hal ini, mengeluarkan surat rekomendasi bahwa masjid al-Hidayah tidak boleh dibongkar dan direlokasi.

Dalam hal ini sesuai dengan pemaparan ustaz Sofyan;

“Ngak ada. Saya sama temen-temen ngajuin surat ke pusat, tapi nggak ada respon. Dari Komnas HAM juga sudah ngajuin surat, masjid nggak boleh dibongkar sebelum ada musyawarah di antara takmir-takmir masjid. Pak Wiharto selaku tim sukses pembongkaran masjid itu merasa kecewa. Soalnya, kesepakatan pertama pembongkaran masjid itu tidak menggunakan alat berat, tapi ketika pembongkaran tetap menggunakan alat berat. Jadi itu salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak terkondisikan.”²¹

Pihak sekunder lainnya, hadir sebagai mediator yang ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura adalah, Bupati Kulonprogo

²¹ Wawancara dengan Sofyan 7 Agustus 2019

dan Kemenag. Peran Kemenag dalam hal ini adalah, meyakinkan warga, bahwa relokasi masjid al-Hidayah tidak akan mempengaruhi statusnya sebagai masjid wakaf. Setidaknya, secara administratif, statusnya akan disamakan dengan dengan masjid sebelumnya.

D. Dinamika Konflik

Hakikatnya, konflik dalam kehidupan sosial, adalah sebuah keniscayaan. Karena konflik adalah buah dari setiap adanya interaksi sosial. Dengan demikian, konflik tidak pula selalu dimaknai sebagai sebuah dampak negatif dari adanya interaksi sosial. Dalam hal ini, konflik bisa negatif, atau positif, bisa pula bersifat *desruptif* atau *konstruktif*. Bahkan dalam kesempatan tertentu, konflik justru hadir membawa manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat, jika bisa mendorong perubahan, mengangkat persoalan yang ada hingga bisa menanganinya. Pada prinsipnya, faktor yang menentukan apakah sebuah konflik akan negatif atau positif, *desruptif* atau *konstruktif* adalah manajemen konflik yang dibangun.²²

Sebelum lebih jauh untuk melihat dinamika konflik yang ada dalam konteks pembangunan Bandara NYIA, dan relokasi masjid al-Hidayah, desa Palihan, Dusun Kragon 2, penting untuk memahami makna dari konflik itu sendiri. Bagi Pruitt dan Rubi, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceive divergence of interest*)

²² Rizal Panggabean, *Manajemen Konflik untuk Polisi*, (Yogyakarta: The Asia Foundation, Yayasan Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, tt), hlm. 38.

atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.²³ Sementara itu, Kriesberg menekankan definisi konflik pada aspek keyakinan, yaitu, konflik akan terjadi ketika pihak-pihak meyakini bahwa mereka memiliki tujuan yang bertentangan satu sama lain. Ada pun Boulding lebih menekankan pada aspek situasi yang melatar belakangi konflik, yaitu ketidakselarasan antara kepentingan dan tujuan.²⁴

Selanjutnya, dalam buku yang ditulis oleh Rizal Panggabean, *Manajemen Konflik untuk Polisi*, dikenalkan konsep Segitiga Konflik, yaitu, situasi konflik, sikap konflik, dan perilaku konflik.

Pertama, situasi konflik. Hal ini bicara tentang latar belakang yang mendahului konflik, bagaimana konflik bisa terbentuk di masyarakat, dan apa saja isu atau pokok yang disengketakan. Contohnya adalah kelangkaan, kompetisi, perubahan sosial, migrasi, dan perubahan fungsi lahan. Situasi ini disebabkan ketidak selarasan antara tujuan dan kebutuhan, serta kepentingan berbagai pihak.

Kedua, sikap konflik. Aspek ini menggambarkan sikap atau persepsi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik terhadap lawan atau musuhnya, serta bagaimana sikap, dan persepsi itu dipertahankan. Contohnya, rasa marah, salah paham, curiga, dendam, kecewa, prasangka buruk, *dehumanisasi*, dan lain-lain.

²³ Dean. G . Pruitt dan Jeffrey Rubin, *Teori Konflik Sosial*. penerjemah Helly P. Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),, hlm. 9-10.

²⁴ Lebih detail tentang pengertian konflik bisa dilihat dalam karya Rizal Panggabean, *Manajemen Konflik untuk...*Op,Cit, hlm. 38-39.

Ketiga, adalah perilaku konflik. Yaitu, apa saja yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan konflik, baik itu strategi, taktik, atau alat yang digunakan. Contohnya, melempar, membakar, membunuh, demonstrasi, memblokir jalan, mengintimidasi, dan lain-lain.²⁵

Dalam konteks konflik yang terjadi antara warga desa Palihan, dusun Kragon 2, dengan Angkasa Pura dan pemerintah dalam pembangunan Bandara NYIA, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dan masjid al-Hidayah sebagai basis perlawanan, teori di atas menjadi sangat relevan dijadikan sebagai pisau analisis.

1. Situasi Konflik

Latar belakang yang mengawali adanya konflik antara pemerintah atau angkasa pura dengan warga adalah, adanya kegiatan pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo. Menurut penuturan salah satu Dukuh, Yuyun mengatakan bahwa setidaknya pembangunan bandara NYIA ini meliputi lima (lima) desa terdampak.²⁶ Sementara itu, menurut ustadz Sofyan, keresahan sudah mulai muncul semenjak adanya wacana pembangunan bandara. Dalam hal ini ia menuturkan sebagai berikut:

Perjalanan warga itu, kan sejak 2012. Semenjak isu itu, warga sudah bergejolak. Jadi, bukan karena ada mahasiswa datang, terus warga baru muncul menolak. Ya enggak, cuman beritanya mencuat karena mereka itu *upload-upload*.

²⁵ Rizal Panggabean, *Manajemen KonflikIbid.*

²⁶ Wawancara dengan Yuyun (Dukuh Mungghahan), 30 Agustus 2019.

Jadi, memang media tidak mau meliput, karena itu tidak menguntungkan. Kan kira-kira begitu. Jadi, kalau berita di luar itu memang macem-macam, bahwa ini memang provokatornya dari mahasiswa dan lain-lain. Tapi, itu semua terbantahkan. Karena waktu itu penolakan sudah ada sejak awal.²⁷

Dalam pada itu, kuatnya penolakan akan proyek pembangunan Bandara NYIA di Kulo Progo, adalah murni dari warga yang terdampak. Artinya, berdasar pada statemen ustadz Sofyan di atas, sama sekali tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang sengaja menunggangi mereka dengan tujuan memperkeruh masalah. Bahkan, gerakan penolakan ini kemudian berubah menjadi paguyuban atau perkumpulan yang mereka sebut Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP).²⁸

Pembangunan proyek sebesar dan seluas Bandara NYIA Kulonprogo, tidak sekedar berdampak pada pengambilan tanah pemerintah, atau dalam hal ini tanah kesultanan. Namun juga, berdampak pada lahan-lahan produktif yang dimiliki oleh warga, seperti sawah, kebun, ternak, dan lain-lain. Dalam konteks warga terdampak, mayoritas adalah orang yang bekerja sebagai petani turun temurun. Oleh sebab itu, pembangunan proyek ini, tidak juga hanya mengambil lahan produktif, tapi juga sekaligus mengganggu psikologis warga yang harus memulai hidup dari nol kembali.

²⁷ Wawancara dengan Sofyan, 07 Agustus 2019.

²⁸ Ahmad Syarifuddin dalam “<http://jogja.tribunnews.com/2017/12/05/warga-penolak-pembangunan-bandara-baru-memilih-bertahan-di-posko-utama-masjid-alhidayah?page=2>.” Diakses, Senin 30 September 2019.

Dampak semacam ini sangat terasa bagi para warga yang tidak memiliki keterampilan lain selain bertani. Gambaran ini sebagaimana diungkapkan oleh Yuyun:

“yaa, dampaknya luar biasa menurutku. Memang mereka-mereka para pembesarnya, orang yang di atas itu, ya memang menikmati betul mega proyek ini. Tapi, kita yang di bawah malah sengsara mas. Jangankan warga kontra, warga pro aja sekarang banyak yang mengeluh dari sisi penghasilan.”

“Tapi, kalo orang petani, apalagi tidak punya lahan, dikasih uang 200 juta mau usaha apa yaa habis. Bukan sesuatu yang mudah. Tapi, kalau dulu Angkasa Pura ngomong: “Yaa, nanti kita bisalah jualan pulsa, buka *laundry*.” Lah, yang mau beli pulsa, memang siapa? Yang mau *laundry*, siapa? Enak saja kalau ngomong. Yaa, tetap enakan jadi petanilah. Petani itu tidak terikat apapun, jadi waktu itu yang mengatur kita. Kapan kita beribadah ke masjid. Sedangkan hasil panen kita dimakan burung, itu termasuk sedekah, dimakan tikus, itu yaa termasuk sedekah.”²⁹

Berdasar pada apa yang disampaikan oleh Yuyun di atas, jelas sekali ada dampak psikologis pada warga terdampak. Uang ganti rugi, suatu saat akan mengalami penyusutan terus menerus, apalagi dikelola oleh orang yang tidak punya keahlian dan keterampilan. Dalam hal ini, kelangkaan ilmu pengetahuan terhadap tata kelola keuangan menjadi salah satu penyebab konflik. Di sisi lain, perubahan aktifitas keseharian, yang awalnya adalah bertani, kemudian beralih pada bisnis, secara tidak langsung juga akan mengubah pola hidup, dan gaya interaksi warga. Gaya hidup petani yang lebih banyak mengedepankan kerja sama dan gotong royong,

²⁹ Wawancara dengan Yuyun, 30 Agustus 2019.

bisa jadi akan hilang, atau minimal akan mulai berkurang disebabkan oleh gaya hidup bisnis.

Selain konflik yang mengakibatkan perubahan lahan pertanian menjadi bandara, serta prediksi warga akan adanya kelangkaan ilmu untuk mengelola dana ganti rugi. Ternyata aspek psikologis juga menjadi salah satu penyebab lainnya. Dalam hal ini, tempat tinggal dan geografis yang sudah ditempati selama bertahun-tahun secara turun temurun, sudah pasti menanamkan memori dan rasa harmonis yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, imajinasi akan relokasi di tempat baru selalu mendatangkan bayangan buruk, atau setidaknya akan tidak sama dengan tempat yang lama. Kerekatan emosional yang terbangun lama dengan warga lainnya, akan merenggang karena akan terpisah setelah relokasi. Pola hidup bertani menjadi pola bisnis. Pertanian yang awalnya menggarap lahan sendiri dengan jarak tempuh yang relatif dekat, terpaksa harus mencari lahan garapan baru. Bisa saja membeli lahan baru dengan dana ganti rugi, atau bahkan hanya menyewa lahan orang lain yang pasti jaraknya akan lebih jauh. Kondisi semacam ini digambarkan oleh warga yang menolak, maupun yang pro atau menerima relokasi.

“... kemudian, yang petani ya tetep sekarang petani. Ini kayak pak Bahrin itu. Sekarang pertaniannya jauh, sekarang nyewa di daerah Pleret. Bukan pleret Bantul ya. Pleret sini loh ya. Kan ada Pleret toh sini lewat Panjatan. Tiap pagi dia berangkat. Nyewa itu.”³⁰

³⁰ Wawancara dengan Yuyun, 30 Agustus 2019.

Pernyataan psikologis semacam ini pun dirasakan oleh ustadz Sofyan. Dalam hal ini, ia menjelaskan sebagai berikut:

“... anak saya sampai sekarang itu masih ngomong: “Pak, saya pengen kembali ke sana.” Saya jawab: “Nak, rumah yang sekarang sama rumah yang dulu, kamu pilih yang mana?” Dia jawab: “Pilih yang sana. Kembali ke sana aja.” Padahal, secara dohir lebih bagus rumah yang sekarang. Dan itu, bukan hanya anak saya yang begitu, karena anak tetangga kemarin itu, ada juga yang minta kesana untuk kembali.”³¹

Selain faktor perubahan lahan, kelangkaan sumber daya, dan psikologis, ada pula faktor ketidak sinkronan antara janji dengan realitas. Dalam hal ini, janji-janji dari pihak pemerintah dan Angkasa Pura terhadap warga yang terdampak, banyak yang tidak dipenuhi. Namun demikian, kesimpulan yang didapat oleh peneliti ketika terjun ke lapangan untuk wawancara dan observasi, ada perbedaan pendapat. Di antara warga terdampak mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah menjalankan janjinya. Sementara pihak lainnya mengatakan tidak menepatinya.

Menurut pengakuan Yuyun, banyak tindakan represif yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan Angkasa Pura. Angkasa Pura berjanji akan menghitung total kerugian dari setiap hasil tanam, dan kayu-kayu keras yang ada di setiap tanah warga yang terdampak. Namun realitasnya, Angkasa Pura malah ingkar akan janjinya.

“... Dulu, aku pernah sowan ke pak Bupati, ke pak Hasto. Ketika itu konfirmasi. Ya, kita selaku anak cerita sama orang

³¹ Wawancara dengan Sofyan, 07 Agustus 2019.

tua toh? Gimana tentang pertanian kita? Warga masyarakat nanti yang mata pencahariannya memang pertanian, kan susah toh memindah aktivitas? Tidak semudah itu. Terus, aku selaku peternak gimana? Jawabannya enak (Bapak Bupati): “Ya, nanti kita bikin tim. Yang peternak, kita bikinkan tim peternakan. Nanti, kita carikan lahan.” Tapi sampai sekarang mana? Ga ada reaksi sama sekali.”³²

Hal senada juga disampaikan oleh ustdaz Sofyan. Sesuai pemaparannya, banyak hasil pertanian warga yang ditumbangkan, dirusak secara sepihak dan semena-mena oleh pihak Angkasa Pura.

Namun demikian, beberapa kesaksian yang bertolak belakang juga ada. Menurut mereka, pihak Angkasa Pura dan pemerintah telah memaksimalkan segala usaha untuk memenuhi tuntutan warga terdampak. Termasuk dalam hal ganti rugi seluruh harta yang dimiliki oleh warga. Seluruh harta bernilai, yang di bawah tanah, dan di atas tanah betul-betul disurvei dan kemudian dihargai sesuai dengan harga yang berlaku.

“Iya pak, dari hasil penjualan tanah dan bangunan. Tanah, bangunan, kandang, tanaman, itu dihitung semua.”

“Sama pihak satgas, seluruh bangunan, tanah, tanaman, yang ada di atas atau di dalam bumi itu dihitung. Bahkan, sampai palon yang untuk nyiram-nyiram itu dihitung berapa meternya.”³³

Dalam konteks konflik masjid al-Hidayah, pihak Angkasa Pura dan Pemerintah pun melanggar janji. Dalam beberapa

³² Wawancara dengan Yuyun, 30 Agustus 2019.

³³ Wawancara dengan Wiharto, 27 Agustus 2019.

pertemuan, sebagaimana terekam oleh media, dan kesaksian warga, mereka menjanjikan bahwa perobohan masjid akan dilaksanakan secara manual. Hal ini sesuai dengan tuntutan warga, karena masjid dipandang sebagai tempat suci yang sakral. Sehingga harus dibongkar secara wajar pula, sebagai wujud dari penghargaan dan kesakralan pula. Akan tetapi, realitasnya justru berbanding terbalik dan mengecewakan warga. Masjid al-Hidayah justru dibongkar dan dirobohkan dengan menggunakan alat berat.

“... Pak Wiharto, selaku tim sukses pembongkaran masjid itu merasa kecewa. Soalnya, kesepakatan pertama, pembongkaran masjid itu tidak menggunakan alat berat. Tapi, ketika pembongkaran, tetap menggunakan alat berat. Jadi, itu salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak terkondisikan.”³⁴

Sebagaimana terekam dalam media *online*, Bupati Kulonprogo, Hasto secara terang mengatakan bahwa pembongkaran masjid akan dilakukan secara manual.

“Tidak seperti perobohan rumah-rumah warga, kata dia, perobohan tempat ibadah itu akan dilakukan secara manual. Genteng atap dan kayu akan diturunkan terlebih dulu. “Kita tidak robohkan, karena ada yang kita *openi* (manfaatkan),” ucapnya.”³⁵

Pernyataan ini, tentu bertolak belakang dengan apa yang ada dalam foto di bawah ini.

³⁴ Wawancara dengan Sofyan 27 Agustus 2019.

³⁵ Dikutip dari <https://www.inews.id/daerah/yogya/226557/warga-penolak-bandaranya-di-masjid-al-hidayah-diminta-segera-pindah>. diakses Selasa, 01 September 2019.



Sumber: <https://jogjapolitan.harianjogja.com>

Dengan dalih bahwa, masjid al-Hidayah masuk dalam lahan yang akan dijadikan proyek Bandara NYIA, maka harus direlokasi juga, sebagaimana bangunan lainnya. Namun, karena perlawanan warga banyak dipusatkan di masjid al-Hidayah, menyebabkan pembongkaran dan relokasi masjid adalah yang paling akhir dilakukan. Dalam beberapa informasi, setidaknya ada 20 anggota kepala keluarga (KK) yang tinggal di masjid saat konflik berlangsung.³⁶ Mereka melakukan segala aktifitas keseharian di masjid. Bahkan ada yang mendirikan tenda-tenda juga sebagai tempat tinggal.

Di samping itu, ratusan warga penentang lainnya juga setiap hari kumpul di masjid. Mereka tidak mau menempati

³⁶ Surat *Kabar Harjo*, 25 Juli 2018

tempat relokasi atau kontrakan yang disediakan oleh pihak PT Angkasa Pura dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Sebab mereka tidak pernah diajak komunikasi sebelumnya. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat berlindung dan posko dalam rangka menyiapkan strategi melawan petugas.

Selain sebagai tempat bertahan paling akhir, setelah semua lahan dan rumah dibongkar, relokasi masjid al-Hidayah menjadi alot, karena beberapa faktor. *Pertama*, tata cara pembongkaran yang harus dilakukan secara manual, dan tidak boleh menggunakan alat berat. *Kedua*, statusnya yang merupakan masjid dan tanah wakaf. *Ketiga*, kesakralan masjid itu sendiri yang dianggap tidak bisa digantikan oleh masjid berikutnya setelah relokasi. Aspek ketiga inilah mungkin yang kemudian dikhawatirkan oleh warga, yaitu masjid relokasi tidak sanggup lagi menjadi media integrasi sosial. Setidaknya, hingga sekarang jama'ah yang ada di masjid relokasi tidak sekuat dan seharmonis di masjid al-Hidayah sebelum relokasi. Padahal, di antara fungsi masjid yang paling mendasar setelah tempat ibadah adalah, tempat merajut persaudaraan sejati, saling mengasihi, mengayomi dan membantu satu dengan yang lain, menyatukan hati dan langkah untuk kemaslahatan umat.³⁷

Berikut adalah pernyataan yang bisa didapatkan oleh peneliti mengenai perlawanan warga atas masjid al-Hidayah:

“Kalau yang seperti itu, saya tidak paham secara hukum. Tapi, setau saya bahwa, masjid itu pemindahan secara selaras. Soalnya kan masjid itu tanahnya tanah wakaf. Sekarang, kan

³⁷ Masudi, (2006), hlm. 9

pemindahannya di tanah kesultanan. Kalau secara undang-undang, saya nggak tau yang benar yang mana. Kalau sepemahaman kami, dari kenyataan penggantian hak kami, tidak sesuai syarat. Kan harusnya ada syarat-syarat yang terpenuhi ya pak.”

“... masjid menurut saya kan tempat Ibadah. Bagi umat Islam, menurut saya ini paling sakral, tempat yang paling suci. Jadi, menurut saya tidak bisa ditempati tempat lain. Masjid tetap masjid, meski tidak ada bangunannya. Itu menurut saya masih tetap masjid. Menurut saya mesjid, karena tanah yang sudah diwakafkan, zaman Nabi, kan tanah dikasih patok itu masjid.”³⁸

Berbulan-bulan harus berhadapan dengan konflik, sebagaimana dirasakan oleh warga terdampak pembangunan bandara NYIA bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi jika yang dihadapi adalah pihak yang memiliki modal dan dekat dengan *ring* kekuasaan. Artinya, peluang untuk memenangkan konflik bisa mendekati *nir* atau mustahil. Oleh sebab itu pula, berbagai pihak dimintai pertolongan untuk mendampingi mereka. Namun pada akhirnya, harus digusur dan direlokasi di tempat yang sudah disepakati.

Sebagaimana dipaparkan oleh para warga yang menolak, masjid adalah bangunan terakhir yang dibongkar oleh pihak bandara ketika itu. Namun demikian, berbagai intimidasi pun dirasakan oleh warga, mulai dari pemadaman listrik secara sepihak oleh PLN. Pencongkelan beberapa bagian dari masjid, hingga penggalian lubang di sekeliling masjid. Hal ini dilakukan, dengan tujuan agar warga dengan sendirinya mengosongkan masjid tersebut. namun ternyata, warga

³⁸ Wawancara dengan Sofyan, 27 Agustus 2019.

justeru semakin kukuh, dan terus menjalankan aktifitasnya ditengah-tengah galian lubang, dan poadamnya listrik. Berbagai perlawanan terus dilakukan, seperti penyediaan mesin Genset secara mandiri, dan penutupan galian lubang secara bersama-sama.

Gambaran situasi ini bisa dilihat sebagaimana dipaparkan oleh ustadz Sofyan;

Jadi, misalkan bayangkan! Saya hidup sudah, tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan. Terus mau ngapain lagi? Padahal, anak istri saya harus makan dan harus sekolah. Waktu itu, tinggal 37 rumah tanpa listrik karena sudah dicabut, dan jalan-jalan masuk sudah dilubangi pakai Beko (alat berat) yang dalamnya sekitar 1 sampai 2 meter gitu. Gundukannya ditumpuk sehingga orang gak bisa keluar. Jalan ke rumah saya itu, sudah dirobohkan pohon-pohon besar. Jadi, gak bisa dilewati lagi. Ya, peran-peran kemanusiaan dari Mahasiswa itu, ya disitu, karena teman-teman mahasiswa dan relawan itu kan melihatnya dari sisi kemanusiaan bukan karena politik dan lain sebagainya, *insya Allah* tidak. Jadi, mereka itu benar-benar mau menolong warga, karena warga kok sampek seperti ini, dan diperlakukan begini. Jadi, mereka ya membuka jalan, memberi makanan.³⁹

2. Sikap Konflik

Sikap konflik, adalah aspek yang menggambarkan sikap atau persepsi yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik terhadap lawan atau musuhnya. Di samping itu, sikap konflik

³⁹ Wawancara dengan Sofyan, 27 Agustus 2019.

juga menggambarkan bagaimana sikap, dan persepsi itu dipertahankan. Contohnya, rasa marah, salah paham, curiga, dendam, kecewa, prasangka buruk, *dehumanisasi*, dan lain-lain.

Dalam konteks proyek pembangunan bandara, dan warga, banyak sikap konflik yang muncul. Secara global, sikap konflik menyangkut aspek-aspek kognisi dan emosi, seperti rasa bermusuhan yang dialami pihak-pihak yang terlibat konflik.

Segala bentuk sikap yang diekspresikan oleh warga terdampak proyek Bandara NYIA, tentu bukan sesuatu yang hadir di tengah-tengah kehampaan sebab musabab. Bagi mereka, intimidasi dari pemilik modal, dan kekuasaan sangat terlihat ketika berhubungan dengan rakyat kecil. Relasi kuasa bermain keras dalam pengambilan hak-hak warga dalam pembangunan mega proyek bandara NYIA tersebut. Banyak hal yang dilakukan oleh pihak bandara tanpa komunikasi terlebih dahulu, atau tanpa hasil kesepakatan yang dimusyawarahkan antara dua pihak. Misalnya dalam hal pemutusan aliran listrik. Dalam hal ini, Yuyun menggambarkan bagaimana represifnya pihak Bandara untuk menguasai lahan yang masih mereka jadikan sebagai tempat tinggal.

“Ah iya, yang di dalam pagar itu kan pertama kali dieksekusi itu toh. Pertama kali eksekusi sebelum rumah dirobohkan, listrik dicabut semua. Itu tanpa konfirmasi listrik dicabut semua.”⁴⁰

⁴⁰ Wawanacara dengan Yuyun 27 Agustus 2019.

Pemutusan aliran listrik bahkan terjadi berbulan-bulan. Akan tetapi, warga yang merasa kecewa dan marah terhadap tindakan represif tersebut, tetap tidak surut untuk melakukan perlawanan. Segala aktifitas keseharian tetap berjalan sebagaimana biasanya. Bahkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi, warga berinisiatif untuk membeli alat Genset yang digunakan untuk memasok kebutuhan listrik. Selain itu, WALHI memberikan bantuan alat pemasok listrik bagi warga pada saat itu.

Ya, gak ada (bantuan). Makan-makan sendiri, itu bantuan dari kawan-kawan kita yang di Jogja. Itu relawan-relawan. Pas setelah eksekusi itu, relawan-relawan dari WALHI itu juga datang ngasih Genset. Kemudian ada bantuan listrik yang pake Solar apa pake Matahari itu yang pasangan itu.⁴¹

Kondisi semacam inilah yang kemudian menambah kekecewaan dari warga terdampak. Represifitas pihak Bandara diapandang banyak melampaui batas, atau bahkan melanggar Hak Asasi Manusia. Praktek-praktek *demuhanisasi* semacam ini bahkan berlanjut hampir setahun. Hidup tanpa listrik, akses diputus dengan cara penggalian lubang.

Ada sebagian warga yang pindah karena tidak tahan di sana. Tapi, ya kadang malamnya datang ke masjid itu. Jadi lama-lama, kan berkurang-berkurang, karena kebutuhan warga ini gak tahan toh? Debu itu tiap hari, gak pernah berhenti loh mas. Memang sengaja, atau gimana aku gak tau. Dikeruk, itu debu masuk ke masjid. Nah, kita anak-anak

⁴¹ Wawancara dengan Yuyun 27 Agustus 2019.

batuk semua, anakku kecil bayi itu sudah Herpes itu. Tak (aku) bawa ke puskesmas gak sembuh. Kena debu, batuk 3 bulan kemarin. Jadi, pas lahirnya anakku ini sengsara betul aku, wong rumahku dicongkel pintunya dan pohon-pohon dirobohkan, istriku pas hamil tua, jadi punya bayi aku itu sangat sengsara aku mas.⁴²

Masjid itu sempat digali (lubang dalam di sekelilingnya) kok. Bukan cuman rumah (yang disekelilingnya ada galian lubang). Yang mau masuk masjid itu, yang depan jalan raya, pintu masuknya itu digali dalam banget. Kemudian sama relawan, kawan-kawan langsung ditimbun ulang, relawan sama warga bareng-bareng.⁴³

Kecewaaan atas represifitas pihak bandara tidak berhenti pada pembongkaran secara paksa, namun juga pada hasil bumi yang tidak dipandang penting. Dalam hal ini, banyak hasil tani yang secara sepihak dihancurkan secara paksa dan semena-mena. Berikut adalah ungkapan dari ustdaz Sofyan;

“Karena waktu itu ya parah. Saya itu punya cabe belum panen. Waktu itu cabe sedang mahal-mahalnya itu, baru panen tiga kali itu, dihancurkan pakai Beko. Warga lainnya yang difabel, tidak bisa bicara itu, ada dia punya tanaman cabe. Itu sekali panen dalam 5 hari itu, paling tidak dapat 2 Juta. Nah, waktu itu baru mulai panen, besok mau dipanen tapi hari ini sudah digilas. Dia juga punya Kelapa di depan rumahnya, itu juga digilas pakai alat berat.”⁴⁴

⁴² Wawancara dengan Yuyun 27 Agustus 2019

⁴³ Wawancara dengan Yuyun 27 Agustus 2019

⁴⁴ Wawancara dengan Sofyan 30 Agustus 2019.

Berbagai macam repesifitas inilah yang memunculkan kekecewaan, sakit hati, dan ketidakpercayaan pada pihak bandara saat itu. Di sisi lain, pemerintah yang dianggap sebagai orangtua warga, juga tidak bisa berbuat banyak. Bahkan justru terkesan tunduk pada pemilik modal, atau pihak bandara NYIA. Dengan demikian, berbagai macam kecurigaan pun muncul di tengah warga. Dalam hal ini, Yuyun mengungkapkan sebagai berikut;

“Lahannya? Lahannya dieksekusi, dirobahkan. Dulu aku pernah sowan ke pak Bupati, ke pak Hasto. Ketika itu konfirmasi. Ya, kita selaku anak, cerita sama orang tua toh? Gimana tentang pertanian kita? Warga masyarakat nanti yang mata pencahariannya memang pertanian, kan susah toh memindah aktivitas. Tidak semudah itu. Terus, aku selaku peternak gimana? Jawabannya enak: “Ya, nanti kita bikin tim. Yang peternak, kita bikinkan tim peternakan, nanti kita carikan lahan.” Tapi, sampai sekarang mana? Gak ada reaksi sama sekali. Kemudian yang petani, ya tetep sekarang petani. Ini kayak pak Bahrin itu, sekarang pertaniannya jauh. Sekarang nyewa di daerah Pleret, bukan Pleret Bantul ya, Pleret sini loh ya. Kan ada Pleret toh sini lewat Panjatan. Tiap pagi dia berangkat. Nyewa itu.”⁴⁵

Pemaparan di atas, didukung oleh apa yang disampaikan oleh ustadz Sofyan sebagaimana berikut;

“Yang menyampaikan waktu itu bapak Hasto (Bupati Kulon Progo), beliau mengungkapkan tidak ada paksaan dalam pembangunan bandara. Tapi, ujung-ujungnya kok malah jadi paksaan.”⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Yuyun 27 Agustus 2019

⁴⁶ Wawancara dengan Sofyan 30 Agustus 2019.

3. Perilaku Konflik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, perilaku konflik adalah apa saja yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan konflik, baik itu strategi, taktik, atau alat yang digunakan. Contohnya, melempar, membakar, membunuh, demonstrasi, memblokir jalan, mengintimidasi, dan lain-lain.⁴⁷ Karena konflik yang terjadi dalam konteks penelitian ini adalah konflik vertikal, yaitu antara penguasa atau pemegang kebijakan dengan warga, maka konflik yang terjadi pun sangat beragam dan berwarna.

Berdasar pada pengamatan dan hasil penelitian di lapangan, maka berikut adalah tahapan-tahapan perilaku konflik yang ada;

a. Perlawanan dengan Tulisan-tulisan atau Spanduk

Dalam konteks ini banyak tulisan perlawanan yang muncul, di antaranya adalah:

1. QS. al-Baqoroh: 144: *“dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? ... Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.”*
2. Masjid untuk Ibadah Bukan Bandara.
3. Masjid Ini Tidak Dijual.

⁴⁷ Rizal Panggabean, *Manajemen Konflik untuk...*, Ibid, hlm. 39-40.

Berikut adalah poster-poster perlawanan yang dibuat oleh warga.





Dari poster-poster di atas, terlihat sekali fungsi masjid dijadikan sebagai basis perlawanan terhadap repsesifitas kekuasaan. Masjid tidak dijual, adalah simbol perlawanan atas tindakan yang menganggap bahwa seolah-olah modal

bisa mengalahkan segalanya. Kesakralan masjid sebagai tempat ibadah, tidak akan bisa digantikan oleh modal kapitalis. Apalagi masjid tersebut hanya akan digunakan untuk urusan yang bersifat duniawi.

Masjid, menurut saya kan tempat Ibadah. Bagi umat Islam, menurut saya ini paling sakral, tempat yang paling suci. Jadi, menurut saya tidak bisa ditempati tempat lain. Masjid tetap masjid, meski tidak ada bangunannya. Menurut saya, tetap saja masjid, karena tanah yang sudah diwakafkan. Zaman Nabi kan tanah di kasih patok itu masjid.⁴⁸

Di sisi lain, peran masjid sebagai tempat sakral, yaitu tempat ibadah tentunya tidak terbatas pada bentuk fisik semata. Oleh sebab itu, seandainya fisik masjid sudah dibongkar, maka nilai tempat tersebut sebagai sesuatu yang disakralkan akan tetap melekat. Oleh sebab itu, tanahnya pun harus diperjuangkan, karena ia diwakafkan sebagai masjid (tempat ibadah) yang bersifat *ukhrawi*, bukan untuk bandara yang bersifat duniawi.

b. Perlawanan Spiritualitas berupa *Mujahadah*

Selain perlawanan lewat lisan dan tulisan, perlawanan warga juga mencakup perlawanan spiritualitas, yaitu berupa *mujahadah*. Hal semacam ini disampaikan oleh ustadz Sofyan sebagai berikut;

“... Sering saya tanamkan pada masyarakat, bahwa momen-momen seperti ini, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya dengan sarana *mujahadah* itu. Atau dengan *mujahadah* yang

⁴⁸ Wawancara dengan Sofyan 30 Agustus 2019

lebih ringan, dengan cara *tahlil*. Iya, itu memang kami galakkan ke masyarakat. Walaupun pandangan mereka negatif kepada kita, karena kita menolak keputusan negara. Namun, kita tetap berusaha di hadapan Allah.”⁴⁹

Di bawah ini adalah salah satu dokumentasi yang secara real mengarah pada perlawanan atas kesewenang-wenangan pihak bandara terhadap warga. Tema perayaan Maulid Nabi yang diusung oleh warga, secara gamblang menggambarkan atas ketidak sukaan atas proyek pembangunan bandara NYIA.



Sumber. <https://jaganyala.wordpress.com>

Gambar ini menceritakan warga yang tetap melakukan aktifitas keagamaan, walaupun listrik telah diputus secara sepihak oleh PLN. Bahkan Paguyuban Warga Penolak Pengusuran Kulon Progo (PWPP-KP) sengaja mengusung

⁴⁹ Wawanacara dengan ustadz Sofyan, 27 Agustus 2019.

teman yang erat kaitannya dengan situasi yang sedang mereka hadapi, yaitu “Mengenang Semangat Perjuangan Nabi Muhammad saw.: Menanam dan Mempertahankan Lahan adalah Ibadah.”⁵⁰

Lewat perlawanan ini, warga ingin menyampaikan bahwa fungsi masjid tidak sekedar ibadah semata, namun juga sebagai ruang yang tepat untuk menyusun rencana dan strategis untuk menyuarakan bahwa kezaliman, dan penindasan adalah sesuatu yang harus dilawan.

c. Perlawanan Sikap

Dalam hal ini, warga terus bertahan di masjid, walaupun akses menuju masjid sudah diblokir oleh pihak Angkasa Pura. Di samping itu, para warga yang menolak relokasi pun menjalankan segala aktifitas mereka sehari-hari di sekitar masjid.

“... nggak sebenarnya, soalnya kita tinggal di masjid itu, karena kita udah nggak punya tempat tinggal lagi, kita tidur disana istirahat disana iya itu karena tempat tinggal kita udah digusur semua.”⁵¹

Baik ustadz Sofyan, maupun pak Yuyun menyatakan bahwa pihak Angkasa Pura betul-betul membuat kesengsaraan kepada warga penolak yang tinggal di masjid.

⁵⁰ Fair Faza, dalam <https://jaganyala.wordpress.com/2017/12/03/listrik-diputuskan-pln-warga-palihan-kulon-progo-tetap-peringati-maulid-nabi-muhammad-saw/>. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa ada beberap unsure yang turut hadir dalam acara tersebut, yaitu; Gus Ubaidillah Achmad dari Ponpes Bayt al-Suffah al-Nahdhiyah, Rembang. Selain itu, ada juga Beny Susanto dari Ponpes Sunan Kalijaga. Diakses 15 November 2019.

⁵¹ Wawancara dengan Sofyan, 27 Agustus 2019.

Pihak Angkasa Pura memutuskan akses jalan dengan membuat galian dalam di jalan menuju masjid. Selain itu, listrik pun dipadamkan secara sepihak.⁵²

Perlawanan sikap berikutnya adalah, penolakan atas relokasi masjid al-Hidayah, hingga status masjid sebagai wakaf bisa dipertegas dan sesuai tuntutan. Para warga yang menolak, meyakini, jika statusnya tidak tepat, maka akan terputusnya *sanad* wakafnya. Oleh sebab itu, solusinya adalah, masjid harus dibangun dulu, sertifikat masjid disesuaikan dengan atas nama *al-marhum* yang mewakafkan, dan lain-lain.

Dari pihak Angkasa Pura sendiri, sempat juga melakukan perlawanan atas warga yang tetap kukuh untuk mempertahankan masjid. Sebagaimana dimuat dalam media *online*. Dalam laporannya disebutkan bahwa ada ratusan pasukan proyek bandara yang mendatangi warga. Di antaranya adalah pihak kepolisian, dan dari unsur lainnya. Hampir lebih dari satu jam berlangsung aksi perlawanan antara warga dan pasukan proyek. Di sela-sela pertengkaran tersebut pula, tiga alat besar digerakkan untuk terus melakukan perobohan atas rumah-rumah, dan pepohonan milik warga.⁵³

⁵² Wawancara dengan pak Yuyun dan ustadz Sofyan 27 Agustus 2019.

⁵³ <https://selamatkanbumi.com/id/kronologi-pengepungan-dan-penyergapan-ruang-solidaritas-masjid-al-hidayah-palihan-temon-kulonprogo/>. Dalam laporan berita ini secara lengkap dijelaskan kronologi pengepungan atas warga, pembongkaran, hingga orang-orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Diakses 17 November 2019.

E. Resolusi Konflik Berbasis Masjid

Dalam bahasa Inggris, resolusi konflik disebut dengan *conflict resolution*. Menurut Weitzman & Weitzman, resolusi konflik adalah tindakan untuk memecahkan masalah secara bersama.⁵⁴ Sementara itu, dalam *Webster Dictionary*, Levine menyatakan bahwa resolusi konflik adalah, proses mengurai suatu permasalahan, pemecahan, dan selanjutnya, penghapusan atau penghilangan permasalahan.⁵⁵ Dengan demikian, resolusi konflik adalah cara untuk menyelesaikan masalah, dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka, atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil.

Di sisi lain, resolusi konflik harus diposisikan sebagai cara untuk memahami akar dari suatu konflik, hingga mampu menemukan solusi dan penyelesaiannya. Cara kita mengatasi konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Usaha ini, bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai, sehingga memungkinkan untuk mengakhiri konflik. Dengan berakhirnya konflik, maka tujuan berikutnya adalah, mentransformasi konflik yang ada menjadi perubahan social yang lebih baik. Atau dengan kata lain, menjadi lebih konstruktif.

Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan sosial.

⁵⁴ Dikutip dari Wisnu Suhardono, dalam <https://www.academia.edu/15116981>. diakses, Jum'at, 04 Oktober, 2019.

⁵⁵ Dikutip dari Wisnu Suhardono, dalam <https://www.academia.edu/15116981>. diakses, Jum'at, 04 Oktober, 2019.

Namun demikian, setiap konflik harus difahami embrio yang menjadi pemicunya. Oleh karenanya, penting untuk memahami berbagai macam situasi yang bisa menyebabkan konflik di dalam masyarakat. Dalam pada itu, pemetaan dinamika konflik adalah langkah awal untuk mengelola konflik. Tindakan pemetaan atas dinamika konflik, akan membantu kedua belah pihak untuk memahami lebih jelas asal usul, sifat, dan kemungkinan resolusi konflik yang akan diambil.

Resolusi konflik yang diambil dalam kasus pembangunan Bandara NYIA dan warga terdampak adalah sebagai berikut;

1. Komunikasi

Keterlambatan membangun komunikasi adalah awal dari munculnya konflik. Oleh sebab itu, seberapa baik komunikasi yang tercipta, maka akan sebesar itu pula peluang untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, komunikasi efektif yang harus lebih dikedepankan, adalah komunikasi yang mampu mengungkapkan serta mengekspresikan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan. Yang kedua adalah komunikasi yang mampu mendengar dengan baik, yaitu mendengar dengan empati, keterbukaan, kesadaran, dan tidak menghakimi.⁵⁶

Dalam kasus konflik pembangunan Bandara NYIA dan warga terdampak yang bertahan di masjid al-Hidayah. Beberapa informasi menyebutkan bahwa pihak Bandara sudah melakukan komunikasi dengan berbagai cara, di

⁵⁶ Rizal Panggabean, *Manajemen Konflik dengan ...*, Op.Cit, hlm. 44-48.

antaranya, sosialisasi, musyawarah, mendatangi rumah warga, dan lain-lain.

Hal ini setidaknya diungkapkan oleh pak Muslihuddin sebagai berikut:

“... Nah, pas 2013 itu kan pas panas-panasnya ada bandara itu. Terus *deal*-nya pembayarannya akhir 2016. Jadi, selang 3 tahun itu sosialisasi, terus ada tahapan-tahapannyalah...”⁵⁷



Rombongan PT Angkasa Pura I dan Pemkab Kulonprogo bertemu dengan warga penolak bandara di serambi Masjid Al Hidayah, Palihan, Kecamatan Temon, untuk berdialog, Jumat (15/12). Sumber. <https://www.suaramerdeka.com>

2. Negosiasi

Negosiasi dianggap sebagai cara menyelesaikan masalah yang ideal karena menghindari biaya yang tidak perlu, seperti

⁵⁷ Wawancara dengan pak Muslihuddin, 03 September 2019.

kematian dan kerusakan properti, dan mengedepankan kalkulasi strategis. Di samping itu, negosiasi dapat digunakan untuk menangani berbagai jenis masalah mulai dari level keluarga hingga level internasional yang melibatkan negara. Kelebihan-kelebihan utama negosiasi ini tidak dimiliki pendekatan lain, misalnya penyelesaian masalah lewat jalur perang dan hukum. Akan tetapi, salah satu hambatan negosiasi yang hingga kini belum bisa diatasi adalah betapa sulitnya membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan.⁵⁸

Tahapan negosiasi merupakan tahapan awal yang dapat dilakukan melalui proses musyawarah dan bila tahapan ini gagal mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap kedua yang melibatkan mediator yaitu proses mediasi, dan tahapan arbitrase untuk mendapatkan *win-win solution*.⁵⁹

Dalam konteks ini, pihak bandara adalah yang paling aktif untuk melakukan negosiasi. Pihak bandara dalam hal ini mencoba melakukan penggantian secara proporsional atas semua kerugian yang dialami oleh warga. Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya, para warga diberikan hak kompensasi atas semua kerugian yang ada. Baik tanah, tanaman, dan berbagai macam kerugian lainnya.

3. Mediasi

Mediasi adalah usaha menghadirkan orang ketiga atau mediator yang tidak memiliki kepentingan kepada pihak

⁵⁸ Rizal Panggabean, *Maajemen Konflik dengan ...*, hlm. *Op.Cit*, hlm. 51-52.

⁵⁹ Muhammad Isa Yusaputra, "Resolusi Konflik Masyarakat Kelurahan Baiya dan Kelurahan Lambara", dalam *Jurnal Academica Fisip Untad*, vol. 05, No. 02, 2013, hlm. 1324-1325.

yang bertikai atau konflik. Dengan demikian, mediator diharapkan memiliki pandangan yang lebih umum, dengan tujuan mampu membantu pihak yang berkonflik hingga mencapai penyelesaian yang memuaskan.⁶⁰

“ ... Yang mengadakan itu dari pemerintah, dari pertanahan. Tapi saat itu angkasapura itu datang, dari masyarakat juga datang, dari pemerintah juga ada.”⁶¹

Demikian pengakuan pak Wiharto tentang adanya mediasi dari pihak Angkasa Pura. Pengakuan ini juga sebenarnya diamini oleh pak Muslihuddin.

“Mediasi banyak sekali sering, tapi yang penolak itu kalau didatangi gak mau pokoknya. Misalnya ada dari pemerintah mau datang kesini ditanya tujuannya apa kalau masalah bandara gak diterima disuruh pergi begitu, kalau misalkan dari pemerintah datang mau memberi bantuan bukan urusan bandara ya diterima tapi kalau untuk mendamaikan biar akur ya nggak mau....”⁶²

Mediasi yang dilakukan oleh pihak warga sebagai korban adalah, mendatangkan pihak Komnas HAM. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa, pihak bandara telah melakukan pelanggaran HAM, termasuk kesewenang-wenangan yang akan membongkar masjid al-Hidayah. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM, dihasilkan rekomendasi bahwa pembongkaran atas masjid adalah pelanggaran HAM. Berikut adalah pemaparan ustadz Sofyan tentang rekomendasi Komnas HAM;

⁶⁰ Rizal Panggabean, *Maajemen Konflik dengan ...*, hlm. 67.

⁶¹ Wawancara dengan Wiharto, 27 Agustus 2019.

⁶² Wawancara dengan Muslihuddin, 03 September 2019.

“... saya sama temen-temen ngajuin surat ke pusat tapi nggak ada respon. Dari komnas HAM juga sudah ngajuin surat, masjid nggak boleh di bongkar sebelum ada musyawarah di antara takmir-takmir masjid. Pak Wiharto selaku tim sukses pembongkaran masjid itu merasa kecewa, soalnya kesepakatan pertama pembongkaran masjid itu tidak menggunakan alat berat, tapi ketika pembongkaran tetap menggunakan alat berat. Jadi itu salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak terkondisikan.”⁶³



Gambar di atas menunjukkan bahwa warga punya harapan besar atas kedatangan Komnas HAM. Setidaknya, bisa terlihat dengan adanya ucapan sambutan atas kedatangannya. Namun demikian, kedatangan Komnas HAM tidak bisa mengubah keputusan atas pembongkaran masjid. Hal ini disebabkan, rekomendasi Komnas HAM sifatnya tidak bisa mengikat, apalagi bersifat putusan hukum.

⁶³ Wawancara dengan Sofyan 27 Agustus 2019.

4. Relokasi Masjid

Relokasi masjid adalah salah satu yang paling alot dalam konflik ini. Hal ini pula yang menjadikan bangunan masjid adalah yang terakhir dibongkar atau direlokasi. Hal ini dikuatkan oleh penjelasan ustadz Sofyan seperti di bawah ini.

“Iya masih banyak, mereka itu campur aduk dari berbagaimacam latar belakang. Bukan faktor ekonomi yang dipikirkan, walau saya pribadi tidak sepenuhnya ikut merawat masjid tapi melihat masyarakat memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan masjid. Tapi ada berbagai faktor. masjid adalah miniatur yang paling berhak dipertahankan dengan tujuan untuk menghormati masjid.”⁶⁴

Selain sebagai tempat bertahan paling akhir, setelah semua lahan dan rumah dibongkar, relokasi masjid al-Hidayah menjadi alot, karena beberapa faktor. *Pertama*, tata cara pembongkaran yang harus dilakukan secara manual, dan tidak boleh menggunakan alat berat. *Kedua*, statusnya yang merupakan masjid dan tanah wakaf. *Ketiga*, kesakralan masjid itu sendiri yang dianggap tidak bisa digantikan oleh masjid berikutnya setelah relokasi. Aspek ketiga inilah mungkin yang kemudian dikhawatirkan oleh warga, yaitu masjid relokasi tidak sanggup lagi menjadi media integrasi sosial. Setidaknya, hingga sekarang jama’ah yang ada di masjid relokasi tidak sekuat dan seharmonis di masjid al-Hidayah sebelum relokasi. Padahal, di antara fungsi masjid yang paling mendasar setelah tempat ibadah adalah, tempat merajut persaudaraan sejati, saling mengasihi, mengayomi

⁶⁴ Wawancara dengan Sofyan 30 Agustus 2019

dan membantu satu dengan yang lain, menyatukan hati dan langkah untuk kemaslahatan umat.⁶⁵

Untuk menguatkan kesimpulan peneliti di atas, berikut adalah beberapa tanggapan yang didapatkan dari warga terdampak;

“kalau yang seperti itu saya tidak paham secara hukum, tapi setau saya bahwa masjid itu pemindahan secara selaras. Soalnya kan masjid itu tanahnya tanah wakaf, sekarang kan pemindahannya di tanah kesultanan. Kalau secara undang-undang saya nggak tau yang benar yang mana. Kalau sepemahaman kami dari kenyataan penggantian hak kami tidak sesuai syarat. Kan harusnya ada syarat-syarat yang terpenuhi ya pak.⁶⁶

“Ya, karena dari awal saya memang sudah berniat. Menurut sepemahaman saya, bahwa cara-cara yang mereka lakukan itu tidak benar, dan menurut saya apa yang saya lakukan itu hal yang benar. Karena cara cara mereka itu tidak sesuai syariat menurut saya, karena tidak ada asas-asas musyawarah, Jadi, sampai sekarang pun saya belum bisa untuk mengikhlaskan.⁶⁷

Iya, karena pihak kontra itu khawatir terputusnya sanad wakaf.⁶⁸

Berdasar pada penelusuran peneliti, pak Muslih mengungkapkan bahwa semua surat dan administrasi wakafnya sama persis seperti pemilik awal, yaitu pak Kesra, Siswo Suwarno.⁶⁹ Selain berbagai macam syarat yang harus dipenuhi oleh pihak bandara, beberapa pihak juga berperan untuk melancarkan relokasi masjid al-Hidayah. Di antaranya

⁶⁵ Masudi, (2006), hlm. 9

⁶⁶ Wawancara dengan Sofyan 30 Agustus 2019.

⁶⁷ Wawancara dengan Sofyan 30 Agustus 2019.

⁶⁸ Wawancara dengan Wiharto 27 Agustus 2019

⁶⁹ Wawancara dengan Muslihuddin 3 September 2019.

adalah Kemenag Kulonprogo, bupati Kulonprogo, dan pihak-pihak lainnya.



General Manager Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, Ketua DPRD Kulonprogo melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Hidayah. Sumber Foto. Liputan6.com.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Azizi, Ahmad Naufal dkk, *Gerakan Organisasi Wahana Tri Tunggal Melawan Pembangunan Bandara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta: Jalan Menemukan Kembali Hak Atas Kota*, Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada 2017
- Fisher, Simon, etc, *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, penerjemah S.N. Karikasari, Jakarta: The British Council, 2000
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, penejemah: Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Maatt, A. Malik, *Pura dan Masjid : Konflik dan Integrasi Pada Suku Tengger, Kecamatan Sumber, Probolinggo*, Jakarta: BPPA, 2007
- Masudi, Masdar F. *Memakmurkan Masjid Nadhiyin untuk Umat dan Bangsa*, Jakarta: P3M, 2006
- Nasution, Harun, *Islam Rasional; Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 2000

- Nurhadi, *Masjid: Kajian Historis Perubahan Masyarakat Pasca Perang Jawa di Magetan tahun 1835-1850*, dalam Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018
- Pruitt, Dean. G . dan Rubin, Jeffrey, *Teori Konflik Sosial*. penerjemah Helly P. Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Pambuko, Octavian Galih, *Masjid Syuhada Sebagai Monumen Perjuangan Rayogyakarta Dalam Upaya Mempertahankan Dan Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia*, Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013
- Resnanto, *Dinamika Konflik Agraria Pasca Adanya Rencana Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (Nyia) Di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016*. Dalam Skripsi Universitas Airlangga 2017.
- Rahayu, Iin Tri dan Ardani, Tristiadi, *Observasi dan Wawancara*, Malang: Banyumedia, 2004
- Salim, Agus *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 2006
- Yin, Robert K, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, penerjemah M.Djauzi Muzakir, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Web

Wehr's Conflict Map" dalam *<http://www.campus-adr.org/Webquest/Wehr.htm>* didownload tanggal 12 Mei 2017

<http://ppp.or.id/berita/masjid-al-makmur-simbol-perlawanan-terhadap-kolonialisme.html>

<https://buletinkritis.wordpress.com/2008/09/17/jadikan-masjid-sebagai-pusat-gerakan-umat-islam/>

